



SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

SEKSI SEJARAH
PERLAWANAN
TERHADAP
BELANDA

2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL
1982



SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

SEKSI SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP BELANDA

2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL

1982

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	hal. i
SAMBUTAN DAN PENGARAHAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	iii
PERANG NGALI DAN PERANG SAPUGARA DI PULAU SUMBAWA TAHUN 1908	1
PENGKRISTENAN TANAH BATAK	14
RAJA JAILOLO, 1811 — 1832	
GERAKAN NATIVISME DI MALUKU	29
TRADISI LOKAL DAN PENULISAN SEJARAH BUTON.....	46
PEMBERONTAKAN PETANI DI TANGERANG, 1924	56
KERJA WAJIB NEGARA (HEERENDIENSTEN) DI KARESIDENAN KEDU PADA ABAD KE 19	69
PANGERAN PANJI NATAKESUMA	87
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 1981, di Hotel Wisata Internasional, Jakarta, telah berlangsung Seminar Sejarah Nasional III, hingga tanggal 15 Nopember 1981, dengan tema "Melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal kita bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa."

Dalam hal ini penelitian dan penulisan Sejarah Nasional dan Sejarah Lokal hendaknya kita lihat pada konteks yang luas, yaitu dalam rangka pembinaan kebudayaan, termasuk pula semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Itu mengandung arti, bahwa Pemerintah berkewajiban mewujudkan identitas nasional berlandaskan aneka ragam kebudayaan Indonesia; dan juga mewujudkan pedoman pola tingkah laku yang akan menyatukan bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang beraneka ragam itu.

Di sini perlu kita perhatikan adanya kenyataan, bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Di samping itu, dengan pengembangan kebudayaan nasional itu diharapkan akan menjadi pegangan ataupun pedoman tingkah laku pergaulan sosial antar warga negara ke luar batas lingkungan suku atau daerah. Kemudian, masih perlu diperhitungkan, bahwa terdapat pula beberapa masalah sebagai akibat pembangunan yang pada hakikatnya merupakan proses perubahan di segala bidang.

Kesemuanya itu berlangsung dalam ruang lingkup dan waktu, yang perlu kita buat inventarisasi dan dokumentasinya sebagai dukungan data yang memadai. Data dan informasi kesejarahan itu pada khususnya diperlukan antara lain untuk menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam rangka usaha pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula diperlukan untuk melihat berbagai kecenderungan yang terjadi dalam proses integrasi nasional secara menyeluruh. Dan yang lebih utama ialah agar masyarakat terbina kesadaran sejarahnya sebagai satu bangsa.

Di dalam Seminar Sejarah Nasional III itu dapat dipertemukan berbagai pihak yang menaruh minat dalam kesejarahan. Di dalam forum Seminar itu ialah dipersembahkan hasil penelitian para sejarawan, dan mereka memanfaatkannya untuk mempertajam konsep, menyempurnakan metode dan metodologi untuk mempertinggi kemampuan mengungkapkan kembali sejarah bangsa di tingkat nasional maupun daerah. Juga diharapkan untuk mencapai keseragaman bahasa dan penafsiran berbagai peristiwa sejarah bangsa, sehingga dapat menjernihkan berbagai masalah kesejarahan dan mempermudah penanaman kesadaran sejarah pada masyarakat.

Materi kesejarahan dalam Seminar Sejarah Nasional III itu meliputi keseluruhan sejarah nasional Indonesia, yang dibagi ke dalam enam panel, yaitu: prasejarah; sejarah kuno; sejarah pasca kuno meliputi masa sejarah masuk dan berkembangnya Islam; sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, sejarah awal abad ke-XX dan pergerakan nasional; dan sejarah mutakhir.

Kesemua materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan (Jakarta, Bali, Banda Aceh, Bandung, DI Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Riau, Banjarmasin,

Palembang, Bima, Ujungpandang, Sulawesi Utara, Medan dan Samarinda). Demikian pula tulisan tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinal, berskala nasional ataupun lokal; dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya, dengan diterbitkannya bahan hasil Seminar Sejarah Nasional III ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, 21 Agustus 1982
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

SAMBUTAN DAN PENGARAHAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PEMBUKAAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Saudara-saudara sebangsa, sebahasa dan setanah air

Kita berkumpul di sini hari ini untuk bersama-sama melalui seminar sejarah nasional yang ketiga kalinya. Pembahasan tentang sejarah merupakan suatu aktivitas intelektual yang tidak pernah basi walaupun andaikata tema pembahasan yang dipilih tetap sama. Secara naluri selalu ada kecenderungan pada diri manusia untuk mengetahui masa lalu dan berdasarkan pengetahuan tersebut berharap mendapat pelajaran guna menduga, bahkan membangun masa depan yang dikehendaki.

Pengamatan umum ini kiranya tercermin juga pada tema yang ditetapkan oleh seminar kali ini. Tema ini berupa "Melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal Kita Bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Dari bunyi tema ini segera dapat diketahui bahwa para peserta seminar tidak hanya menganggap bahwa penelitian merupakan aktivitas yang berguna, tetapi bahwa sejarah layak dijadikan obyek penelitian karena ia mengandung suatu arti (sense). Arti yang dikandung oleh sejarah ini harus digali melalui penelitian untuk kemudian dimasyarakatkan melalui penulisan dan selanjutnya dijadikan modal bagi pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Baik seminar sebagai aktivitas intelektual maupun tema yang dipilih oleh seminar sejarah ini, sangat saya hargai. Melalui semua ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak ingin dikutuk oleh sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Sebab memang acapkali justru dari sejarah kita belajar betapa kita tidak belajar dari sejarah. Namun harus diakui bahwa usaha untuk menarik pelajaran dari sejarah bukanlah pekerjaan yang sederhana. Usaha memperoleh angka yang tinggi dari studi sejarah, bahkan usaha meraih judicium yang membanggakan dari ujian mata pelajaran sejarah pasti jauh lebih mudah dari usaha memahami arti (sense) dari sejarah manusawi. Betapa tidak. Dengan bermodalkan diktat orang lain atau "singkatan" dari bahan kuliah yang dibuat oleh teman, seorang mahasiswa dapat saja mendapat angka yang lumayan dari ujian yang ditempuhnya. Namun untuk menggali, apalagi dapat menemui arti dari sejarah, si pelajar sejarah dituntut untuk menghayati, sesedikitnya membiasakan diri dengan, falsafah. Falsafah dalam artian pengutusan tentang hakikat dari relatinas, baik sebagai keseluruhanya ataupun mengenai salah satu atau beberapa aspek dari sekian banyak aspek yang dikandungnya. Mengingat arti essensial dari falsafah adalah pemikiran yang sistematis sedangkan bekerjanya pikiran manusia pada dasarnya sama, apapun obyek yang dijadikan bahan pemikiran itu, kiranya dapat dikatakan bahwa tidak ada satu falsafah tertentu yang secara khusus disediakan hanya bagi pemikiran sejarah.

Realitas berkaitan erat dengan fakta dan setiap ahli sejarah pasti akan menggunakan fakta tanpa ragu-ragu. Memang bagi ahli sejarah fakta-fakta mengenai masa lalu manusia merupakan perbandingaan dari bahan pekerjaannya. Tetapi ada baiknya ahli sejarah bertanya pada diri sendiri apa-

kah yang disebut fakta yang dianggapnya sebagai realitas itu dan di mana ia dapat atau telah memperolehnya. Apakah yang dianggapnya sebagai fakta-realitas itu adalah obyek di luar dirinya, seperti batu atau kayu yang dapat ditemui atau dikutip di sepanjang jalan? Apakah fakta-realitas itu sebenarnya bukan hasil ciptaan pikirannya sendiri yang tidak ada bandingnya (counterpart) di luar dirinya?

Pertanyaan seperti ini perlu diajukan mengingat, menurut hemat saya, yang disebut sebagai fakta-realitas itu tidaklah seluruhnya subjektif dan tidak pula seluruhnya objektif, tetapi merupakan benda separuh-buatan, sesuatu "semi-manufactured article". Andaikata benda yang terdapat di luar dirinya itu memang tidak bersesuaian dengan apa yang ada di dalam benak pikiran manusia, si pemikir tidak akan dapat mengenalnya dan lalu mengambilnya sebagai fakta. Di samping lain, si pemikir telah memilih sejempat bahan faktual ini dari sekumpulan massa yang mungkin kurang disadarnya bahwa jumlahnya melimpah ruah tidak terbatas. Tetapi kalau dia tidak mengadakan pemilihan dan tidak mempelajari beberapa contoh yang telah dipilihnya itu, dia tidak akan memperoleh fakta yang dapat diolahnya secara mental.

Di dalam melaksanakan proses pengolahan intelektual inilah perlu adanya penghayatan cabang falsafah yang dikenal sebagai "epistemologi", yaitu teori pengetahuan. Sebab pertanyaan mengenai hakikat dari fakta pada gilirannya menimbulkan persoalan tentang hubungan antara hipotesa dengan generalisasi di satu pihak dan di lain pihak tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan hipotesa dan generalisasi tersebut. Hipotesa dan generalisasi tidak begitu saja timbul dalam pikiran. Kehadirannya dalam pikiran karena desakan, suggesti, dari pengamatan atas fakta, tetapi perlu disadari bahwa fakta yang cukup suggestif ini belum tentu, bahkan jauh dari, konklusif. Kalau hipotesa dan generalisasi ini perlu dikukuhkan, validitasnya perlu diuji melalui lebih banyak lagi fakta yang relevan yang dapat dikuasai oleh si pemikir. Tetapi berapa banyak yang dapat dikuasainya? Setiap saat perbedaharaan fakta yang telah dimiliki dapat saja diragukan oleh lain-lain fakta yang selama ini belum diketahui atau belum dipertimbangkan dan berkat kehadiran fakta-fakta baru ini mungkin saja koleksi fakta yang suggestif tersebut runtuh berantakan. Memang pikiran manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mutlak memperoleh pengetahuan tertentu.

- Gambaran yang dibuatnya mengenai sesuatu gejala dalam batas cakrawalanya sendiri merupakan tidak lebih dari suatu pendekatan terhadap kebenaran yang mutlak.

Hal ini tidak hanya berlaku terhadap pemikiran manusia tentang hal non-manusia, tetapi juga tentang studi mengenai hal-ikhwal manusia. Data yang dapat dikumpulkan oleh orang-orang yang mempelajari hal-hal yang lain dari manusia memang sulit untuk dapat dikatakan lengkap dan pemilihan data itu sendiri juga dapat dikatakan arbitrair dan kebetulan. Jadi sejarah mengenai seleksi dan konstruksi intelektual di bidang studi bukan-manusia, kita betul-betul tergantung pada faktor kebetulan. Namun sejauh mengenai studi tentang hal-ikhwal manusia, kita masih tergantung pada beberapa faktor tambahan lainnya, seperti prasangka, pilih-kasih, kekacauan yang disadari atau tidak disadari. Hal ini karena pelajar tentang hal-ikhwal yang bukan-manusia merupakan pengamat yang tidak terlibat pada hal yang dipelajarinya sedangkan orang yang mempelajari hal-ikhwal manusia merupakan sekaligus peserta dan peninjau. Di samping berada di pentas dia berada pula di auditorium. Dia melakukan peranan ganda dan ini pula yang mempersulit situasi kerja intelektualnya.

Pelajar hal-ikhwal manusia sulit untuk melepas diri karena ia terlibat, secara emosional dan moral, dalam setiap perbuatan makhluk manusia yang dapat diketahuinya. Mungkin saja ia tidak akan mengutuk seekor harimau yang membantai habis seorang manusia karena mengetahui bahwa binatang buas ini bertindak mengikuti naluri yang berjalinan erat dengan susunan psikosomatik hewani. Tetapi ia pasti mengutuk atau sesedikitnya mengulas sesuatu tindakan seorang manusia dan penilaian moralnya diiringi dengan perasaan yang bobotnya berubah sesuai dengan derajat kebaikan atau keburukan dari tindakan yang berada dalam pengamatannya itu.

Inilah sebabnya mengapa tadi saya katakan betapa perlunya seorang pelajar sejarah menghayati falsafah dan khususnya epistemologi atau teori pengetahuan. Adalah bijaksana apabila seorang pemikir tentang apapun mempelajari lebih dahulu bagaimana bekerjanya pikiran manusia. Apabila hal ini diabaikannya ia tidak akan menyadari keterbatasan dari kekuatan pemikiran manusia. Bahkan di samping kelemahan-kelemahan yang umum terdapat pada pemikiran manusia, pemikiran manusia tentang hal-ikhwal manusia mempunyai keterbatasan okkupasionalnya sendiri. Orang yang mempelajari hal-ikhwal manusia harus menyadari akibat dari kedudukannya sebagai peserta yang sekaligus peninjau. Keadaan seperti ini intrinsik dengan obyek studinya, yaitu sesama makhluk manusia seperti dirinya sendiri juga, dan apabila hal ini kurang disadarinya ada resiko ia akan membuat kekeliruan yang mudah sekali dihindarkan oleh orang yang mempelajari hal-ikhwal yang tidak mengenai makhluk manusia.

Para peserta seminar yang terpelajar.

Falsafah, atau 'sedikitnya epistemologi, juga diperlukan di dalam menggali atau berusaha menemui arti dari sejarah. Hal ini mengingat adanya ambiguitas dalam perkataan "arti", yaitu arah atau pengertian.

Secara poesis orang sering kali mengatakan tentang "arus" atau "gelombang" sejarah dan sebagai arus atau gelombang, sejarah membawa, menghantarkan atau mengantarkan seseorang kesatu realitas dan meninggalkan atau membiarkan yang lain dalam kebingungan. Bila "arti" dari sejarah ini ditafsirkan sebagai "arus" atau "gelombang", kiranya ia ditanggapi sebagai "arah". Artinya, kita seperti melihat di dalam rangkaian momen yang berkesinambungan itu adanya satu arah yang berkelanjutan, yang ditentukan satu dan lainnya oleh kejadian kausal. Tetapi arah, orientasi atau arus ini tidak hanya sekadar diterima sebagaimana adanya. Orang cenderung pula untuk menilainya, bahkan dijadikan sumber dan ukuran dari setiap nilai. Bila demikian pada waktu yang bersamaan "arti" dari sejarah ini diberikan satu tafsiran yang lain, yaitu pengertian, makna atau dasar pengakuan (raison d'être). Dengan perkataan lain mempunyai "arti" sekaligus ditanggapi sebagai lawan dari "tanpa arti", lawan dari "non-sens". Jadi "tujuan" secara implisit dimasukkan dalam pengertian "arti" ini.

Soalnya lalu, apakah cukup bahwa sejarah mengandung suatu orientasi atau arah untuk dapat dinyatakan mempunyai arti? Sebaliknya, apakah suatu sejarah tanpa arah tidak mungkin dinyatakan mempunyai arti?

Menjawab pertanyaan seperti ini menjadi mudah selama kita menggunakan suatu waktu yang berdimensi tunggal, yang disimbolkan melalui satu garis lurus. Di sini sejarah berjalan sepanjang satu garis lurus yang mengarah dari masa lalu ke masa depan. kesesuaianya, kalaupun ada, membuktikan adanya kesinambungan dari momen yang beruntun saling menyusul, satu arah

yang jelas terbaca dari keseluruhan kejadian Arah yang berkelanjutan ini, kalaupun tidak dengan sendirinya dapat ditafsirkan sebagai suatu "arti" yang berupa dasar pengakuan, sesedikitnya dapat ditanggap sebagai suatu kondisi.

Agar supaya kesinambungan tersebut pada waktu yang bersamaan dapat ditafsirkan sebagai "pengertian", kita terpaksa untuk memasukkan "tujuan", yang juga bersifat lineair. Artinya, momen yang berkesinambungan dari sejarah hanya merupakan satu rangkaian yang berkesesuaian, satu arah yang berkelanjutan, tetapi juga satu penyelesaian. Dengan perkataan lain, pada "arah" atau "orientasi" ini perlu dibubuhinya tujuan, yang juga terletak pada garis lurus yang sama, dan yang dalam dirinya merupakan "raison d'être" dan sumber nilai bagi keseluruhan proses sejarah yang bersangkutan.

Bila demikian, bila pengetahuan kesejarahan telah mencapai tingkat perkembangan yang seperti ini, studi mengenai morphologi sejarah menjadi sama pentingnya dengan studi mengenai momen dan kejadian yang kita awasi kaitan yang satu dengan lainnya. Morphologi dari sejarah menjadi semakin penting dengan semakin meluasnya cakrawala pandangan ahli sejarah.

Usaha untuk membuat suatu rekonstruksi dari jalannya kejadian-kejadian masa lalu pada mulanya dibatasi pada penuturan atau cerita dari satu periode tertentu. Memang semua rekonstruksi kesejarahan terpaksa dilakukan dalam bentuk penuturan karena semua hal ikhwal manusia terus terjadi dalam dimensi waktu. Apabila kita berusaha menyetop jalannya kejadian-kejadian untuk sekedar memisahkannya agar tidak bertumpang tindih sebagai benang kusut, kita sebenarnya sudah mengganggu, kalaupun tidak merusak, realitas sejarah. Sejarah dapat dilukiskan sebagai suatu arus kejadian-kejadian yang secara metaphorik dapat disamakan dengan suatu arus dari aliran air dan sebagai hal ini, ia mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan dianalisa.

Apakah sejarah merupakan suatu gerakan yang kacau balau di mana arusnya tidak mempunyai suatu arah tertentu, atau, apakah arusnya ini jelas mempunyai satu orientasi, sama halnya dengan arus sebuah sungai? Apabila arus sesuatu sungai dapat disamakan dengan arus sesuatu sejarah, apakah sejarah berjalan (mengalir) dengan kecepatan yang sama, atau apakah kecepatan ini berubah-ubah menurut liku dan relung yang dilewatinya, atau apakah sejarah mempunyai kecenderungan umum untuk semakin lama semakin cepat jalannya atau secara bergantian semakin menurun? Dengan cara yang sama kita juga dapat bertanya apakah ia selalu bergerak dalam satu jalur atau selalu bergerak dalam berbagai cabang jalur yang paralel atau kadangkala bersatu atau kadangkala berpisah. Selanjutnya kita dapat pula bertanya apakah bentuk dari alur sungai yang sama tetap sama di titik manapun ia berada, atau berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dilampauinya, begitu rupa sehingga memudahkan atau mempersulit kita untuk membuat persamaan atau perbedaan di antara bentuk-bentuk tersebut. Cara mempelajari sejarah seperti inilah yang tadi saya sebutkan sebagai "morphologi" dari sejarah, yang agak berbeda dari epistemologi, tetapi biar bagaimanapun, dalam mempelajarinya, tetap diperlukan pemikiran yang sistematis, jadi artinya, tetap memperlakukan penghayatan falsafah. Lebih-lebih bila studi morphologi sejarah ini dilakukan demi menggali "arti" yang dikandungnya itu.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Biar bagaimanapun kita yang hidup dewasa ini sangat jauh lebih beruntung dari nenek moyang kita dahulu. Apakah manusia pertama di bumi pertwi ini diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuknya yang sempurna seperti makhluk manusia dewasa ini atau tumbuh secara evolutif seperti yang kita lihat dari fosil di lapisan-lapisan lumpur sepanjang tebing dan beting Bengawan Solo, dari manapun mereka berasal dan datang, dapat kita bayangkan betapa sulit dan beratnya hidup mereka itu. Walaupun secara berangsur-angsur mereka mampu membangun perlindungan dan meramban makanan, mereka tidak mempunyai keluarga yang dapat memberikan tunutan ataupun yang dapat dipakai sebagai contoh. Namun yang paling terasa tidak mereka punyai adalah suatu masa lalu. Mereka tidak mempunyai buku sejarah yang dapat menceritakan bagaimana manusia hidup sebelumnya. Mereka tidak mempunyai musik atau cabang kesenian lainnya, tidak mempunyai falsafah, tidak mempunyai konsep yang seragam tentang itu.

Kita dewasa ini lebih berbahagia dari mereka karena kita kini mempunyai satu masa lalu, mempunyai satu sejarah. Bagi kita sejarah ini merupakan satu warisan nasional. Sekarang kita berkumpul untuk menyimak, menggali "arti" dari warisan kita ini. Dan arti ini, kalau saya tidak keliru menangkapnya, adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukankah tema seminar kita ini adalah, saya ulangi, melalui penelitian dan penulisan sejarah nasional dan lokal kita bina semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bawa seminar sejarah ini dengan tema seperti ini dimulai pada tanggal 10 Nopember, sungguh merupakan satu kesengajaan yang membanggakan. Tanggal 10 Nopember, yang dengan setia kita peringati setiap tahun, adalah hari pahlawan, hari yang dihiasi dengan semangat patriotik. Sedangkan membina semangat persatuan dan kesatuan Bangsa, saya kira dapat digolongkan pada usaha yang didorong oleh semangat patriotik.

Tadi saya katakan bahwa bagi kita sejarah bangsa yang cukup tua ini merupakan satu warisan nasional. Dan satu warisan dalam dirinya merupakan satu hak-kelahiran. A heritage is in itself a birthright. Pada saat dan suasana di mana intrenasionalisme merupakan satu mode, di mana patriotisme dianggap sebagai satu nilai yang kolot, melalui seminar sejarah ini kita tunjukkan bahwa sejarah nasional dan lokal merupakan dasar dari patriotisme yang tidak kunjung padam. Maka itu marilah dengan penuh ketekunan dan melalui keteraturan berpikir, dari sejarah kita, dari warisan nasional ini, kita gali arti yang berguna bagi usaha pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan harapan seperti ini, dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada Hari Pahlawan ini, Selasa — tanggal 10 Nopember 1981, Seminar Sejarah Nasional ke-III, dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. Daoed Joesoef

PERANG NGALI DAN PERANG SAPUGARA

Di Pulau Sumbawa Tahun 1908

Oleh : Hellus Sjamsudin

1. Pendahuluan.

Letusan gunung api Tambora di pulau Sumbawa bulan April 1815 telah mengakibatkan lenyapnya dua unit politik di lereng-lereng dan kaki-kaki timur dan barat gunung itu yaitu kerajaan-kerajaan Tambora dan Pepakat.¹ Empat kesultanan/kerajaan yang dapat bertahan hidup dari malapetaka itu ialah Sumbawa, Dompu, Sanggar, dan Bima. Keempat kesultanan ini kemudian dapat melanjutkan pertumbuhannya sendiri-sendiri sampai memasuki pertengahan pertama abad ke-20.²

Dalam pengkajian ini saya batasi spasialnya pada kesultanan-kesultanan Bima dan Sumbawa saja. Pada tahun 1908 di kesultanan Bima dan kesultanan Sumbawa terjadi perang-perang terpisah melawan Belanda. Di kesultanan Bima perang itu sebenarnya terjadi secara sporadis di Ngali³, Rasanggaro, Dana dan Kala, sedangkan di kesultanan Sumbawa, perang itu terjadi di Sapugara, sebuah tempat di Taliwang, negara-vasal (*vazalstaat*) dari Sumbawa.

Situasi sosial-politik di pulau Sumbawa ketika itu begitu gawat sehingga gubernur sipil-militer *Celebes en Onderhoorigheden* letnan kolonel (overste) Infanteri H.N.A. Swart terpaksa datang sendiri memimpin tentara Belanda untuk memerangi dan menindas gerakan rakyat di Bima dan Sumbawa. Selama hampir tiga bulan waktu Swart tersita di pulau Sumbawa (Februari-Mei 1908). Laporannya mengenai “keijsverrichingen”⁴ di pulau itu merupakan salah satu sumber tertulis penting untuk merekonstruksi dan menganalisa perang itu. Meskipun laporannya jelas Belanda-sentris, tetapi fakta yang dikemukakannya dapat juga diolah dan digunakan untuk melihat perang-perang itu dari sudut Bima dan Sumbawa sendiri. Kajian ini merupakan salah satu upaya untuk menganalisa latar belakang perang-perang itu serta melihat dinamika gerakan sosial di Bima dan Sumbawa dalam menghadapi kekuasaan kolonial Belanda.⁵ Perang-perang itu menandai adanya fenomena perubahan sosial di Bima dan Sumbawa pada khususnya, di pulau Sumbawa pada umumnya pada dekade pertama abad ke-20.

2. Struktur politik dan sosial di Bima dan Sumbawa

Menurut administrasi pemerintahan kolonial Belanda, sesudah tahun 1815, afdeeling Bima terbagi atas empat landschap yaitu Sumbawa, Bima, Dompu dan Sanggar yang masing-masing merupakan *zelfbestuur*. Untuk seluruh pulau Sumbawa ditempatkan seorang *civiel gezaghebber* Belanda yang berkedudukan di Bima. Kemudian keempat landscap itu ditempatkan di bawah **Celebes en Onderhoorigheden.**

Pemerintahan tidak langsung (indirect rule) ini adalah khas pemerintahan kolonial di luar Jawa. Dengan cara ini Belanda membiarkan adanya dualisme dalam struktur politik pemerintahan. Di satu pihak Belanda mulai memasukkan birokrasi Barat dalam sistem pemerintahan kolonial, sedangkan di lain pihak "indigenous political system"⁶ yang tradisional untuk sementara tetap dipertahankan. Yang terakhir ini menyebabkan Sumbawa, Bima, Dompu dan Sanggar masing-masing tetap merupakan kesultanan yang diperintah oleh sultannya sendiri-sendiri.

Mengenai sistem pemerintahan dan susunan masyarakat Bima, tidak berbeda jauh dengan gambaran yang tertulis oleh H. Zollinger (1850)⁷ dan D.F. van Braam Morris (1890)⁸. Yang terakhir ini adalah gubernur Celebes en Onderhoorigheden yang pada tahun 1886 pernah mengadakan perjanjian dengan Sultan Bima, Ibrahim (1886-1915).

Pemerintahan Bima terdiri atas seorang raja yang bergelar Sultan -- orang Bima sendiri menyebutnya *Sangaji* atau *Hawo ro ninu* -- dan sebuah Dewan Hadat-Syara' yang dipimpin oleh Mangkubumi yang disebut *Raja Bicara* atau *Ruma Bicara*. Dewan masing-masing mewakili pemangku adat dan hukum Islam. Untuk Hadat, anggota-anggotanya 24 orang, yaitu *Turell* (enam orang), *Jenell* (enam orang) dan *Buml* (12 orang). Kesemuanya membentuk Dewan Kerajaan (*Rijksraan*). Adapun Syara' terdiri dari Kali (Kadi), Imam, Khatib, Lebe, Bilal dan Robo. Kecuali Kali yang hanya seorang untuk seluruh kesultanan dan berkedudukan di ibukota Bima, maka jabatan-jabatan Khatib, Imam, Lebe, Bilal dan Robo terdapat di setiap daerah kesultanan. Dewan Hadat-Syara' ini menggambarkan pembagian tugas antara urusan dunia dan akhirat. Semua petugas agama harus menjaga pelaksanaan ajaran Islam sambil memelihara tempat-tempat beribadat seperti mesjid atau langgar.

Menurut Braam Morris, Bima "asli"⁹ -- selain ibukota dan sekitarnya -- dibagi atas tiga bagian utama (distrik) yaitu Belo, Bolo dan Sape. Belo terletak di sebelah timur Teluk Bima, Bolo di sebelah barat Teluk Bima dan Sape terletak di ujung timur pulau Sumbawa. Masing-masing daerah ini diperintah oleh seorang (*Galara*(ng)) Kepala yang membawahi lagi Galara (ng)-Galara (ng) yang lebih rendah atau kepala kampung.

Mengenai pelapisan masyarakat, maka di Bima ada tiga "kelas" bangsawan (*de-adel*), kelas menengah (*middel-stand*) dan "pandelingan"¹⁰. Yang termasuk "kelas" pertama ialah Sultan, pangeran dan keluarga sultan serta sejumlah besar pembesar-pebesar tinggi dan terkemuka kesultanan (*ruma ro rato*); "kelas" kedua sejumlah kepala-kepala yang lebih rendah, golongan agama dan penduduk kampung yang merdeka. Mereka ini merupakan mayoritas rakyat. Kemudian "kelas" ketiga ialah orang-orang yang tergadai (pandelingan). Yang terakhir ini semula adalah orang-orang yang

pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya yang dikenakan denda itu. Dengan alasan ini mereka harus bekerja sebagai budak. Rupanya pada masa Braam Morris "kelas" ini ada sehingga ia merupakan kenyataan adanya budak (*ada*) yang bukan "pandelingen".

Suatu keistimewaan pula pada orang Bima ialah terutama sebagian dari golongan "kelas menengah" dibagi-bagi atas *dari-dari (gilden)*. Dari-dari ini mempunyai kewajiban-kewajiban khusus yang harus mereka pikul dan kerjakan. Sehubungan dengan tugas-tugas yang diwajibkan kepada mereka itu mereka mempunyai hak pula yaitu menikmati hasil panen dari apa yang disebut tanah hadat (*ornamentsvelden*). Mereka semua berada di bawah pengawasan tertinggi Bumi Luma Rasa Na'e dan Bumi Luma Bolo. Bumi Luma Rasa Na'e mengepalai para dari yang berada di sebelah timur Teluk Bima dan Bumi Luma Bolo mengepalai para dari yang berada di sebelah barat Teluk Bima.¹¹

Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa mayoritas rakyat Bima adalah petani dan agama Islam yang dipeluk di seluruh kesultanan (kecuali di Donggo dan pedalaman Manggarai) mempunyai pengaruh yang besar sekali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selanjutnya mengenai sistem pemerintahan dan susunan masyarakat di Sumbawa berbeda dengan di Bima. Kedua kesultanan ini meskipun sama-sama beragama Islam, akan tetapi terdapat perbedaan-perbedaan seperti dalam bahasa, adat-istiadat, susunan pemerintahan dan masyarakatnya. Gambaran mengenai sistem pemerintahan dan susunan masyarakat di Sumbawa tidak berbeda dengan apa yang ditulis oleh H. Zollinger (1850) dan A. Ligvoet (1876).¹²

Sultan yang menduduki posisi tertinggi dalam hierarki pemerintahan diangkat atas dasar turun-temurun atau atas dasar pengangkatan oleh suatu dewan yang mendampinginya sehari-hari yaitu Dewan Hadat-Syara' seperti di Bima. Sultan disebut oleh rakyatnya Dewa, suatu sebutan yang menunjukkan bahwa Sultan adalah penjelmaan bukan orang kebanyakan. Adapun Dewan Hadat yang merupakan Dewan Pembesar Kerajaan (*Raad van Rijkgronden*) terdiri dari mangkubumi (*rijksbestierder*) Dea Ranga, Dea Kallbela dan Dea Dipati. Menurun ke bawah secara vertikal terdapat anggota-anggota hadat yang lebih rendah sampai ke tingkat desa/kampung.¹³ Untuk Syara' seperti halnya juga di Bima, untuk seluruh kesultanan hanya terdapat seorang Kali (kadi). Kemudian ke bawah pada setiap tempat di seluruh kesultanan terdapat pejabat-pejabat Syara' yang lebih rendah seperti Imam, Penghulu, Lebe, Kabir, Lurah, Khatib dan Bilal.¹⁴

Berbeda dengan Bima, Sumbawa mempunyai tiga negara-vasal' (vazals-taten) yaitu Taliwang, Serang (Setelok) dan Jerewe. Ketiganya disebut talu kamutar (tiga kamutar).

Sebutan *Datu Kamutar* untuk Sultan Sumbawa menunjukkan bahwa secara nominal ia menguasai negara-negara kamutar itu meskipun dalam kenyataannya kekuasaannya dibatasi oleh adanya negara-negara kamutar itu. Di negara-negara vasal pemerintahan diatur juga seperti di Sumbawa, akan tetapi dalam ukuran yang lebih kecil. Jika di Sumbawa ada Sultan, maka di negara-negara vasal itu ada *Datu*, misalnya *Datu Taliwang*, *Datu Serang* (Setelok), *Datu Jarewe*. Jika di Sumbawa ada mangkubumi yang disebut *Dea Rangga*, maka di Taliwang disebut *Raja Desa* atau *Nenti Desa* (Zollinger),

atau Enti Desa (Ligtvoet), atau Anti Desa (Swart), sedangkan di Serang (Setelok) dan Jarewe disebut Ranria.¹⁵

Mengenal masyarakat Sumbawa pada dasarnya dapat dibagi atas tiga pelapisan yaitu bangsawan, rakyat dan budak. Meskipun rakyat sendiri dapat dibagi-bagi lagi atas dasar pembagian kerja 16, namun umumnya masyarakat Sumbawa adalah petani yang terikat pada sawah/tanahnya. Para bangsawan pun adalah bangsawan-petani yang memiliki sawah/tanah.

Struktur politik dan sosial seperti inilah di Bima dan Sumbawa ketika terjadi Perang Ngali dan Perang Sapugara. Kedua kesultanan ini sama-sama merupakan unit-unit politik agraris dengan rakyat yang kuat memeluk Islam.

3. Perang Kgall

Sebenarnya sejak tahun-tahun 1906 dan 1907 hubungan antara Sumbawa, Bima, Dompu dan Sanggar dengan Belanda telah mulai memburuk.¹⁷ Sebelumnya ke-empat kesultanan itu pada tahun 1905 telah mengadakan perjanjian-perjanjian politik dengan Belanda untuk memperbarui perjanjian-perjanjian pada abad-abad sebelumnya. Ternyata perjanjian-perjanjian itu menguntungkan pihak Belanda saja. Jika yang menandai tangani perjanjian-perjanjian itu Sultan-Sultan dengan Dewan Hadatnya, maka yang memikul kewajiban berat berdasarkan perjanjian itu ialah dari masing-masing kesultanan itu juga.

Hal terutama dirasakan oleh rakyat kesultanan Bima dan Sumbawa yang penduduknya lebih besar. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tahun 1905 itu maka Belanda mendapat hak untuk memungut berbagai macam cukai, dari cukai jalan, pelayaran sampai kepada cukai import dan export yang melalui pelabuhan-pelabuhan dari kesultanan-kesultanan itu.¹⁸ Selanjutnya yang menjadi beban berat lagi, pada akhir Desember 1906 dikeluarkan peraturan untuk mengadakan apa yang disebut sima-katal-lassang (Makasar) atau sima assapparang atuoang (Bugis) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1907. Sima katal-lassang atau sima assapparang atuoang adalah pajak kehidupan yang semula berlaku hanya di Sulawesi saja, akan tetapi kemudian dikenakan di seluruh wilayah Celebes en Onderhoorigheden, artinya termasuk juga Bima, Sumbawa, Dompu dan Sanggar.¹⁹ Berdasarkan pajak ini maka akan dipungut 1/20 dari hasil panen padi : setiap rumah harus membayar 2,50 dan setiap keluarga membayar satu pikul beras.²⁰ Sehubungan dengan ini maka telah ditetapkan target bahwa untuk tahun 1907 harus dapat terkumpul uang Sumbawa sejumlah f 30.000,-; Bima (termasuk juga Manggarai) sejumlah f 5.000,- dan f 150,-. Untuk keperluan pajak baru ini terlebih dahulu diadakan registrasi penduduk pulau Sumbawa.²¹

Sebenarnya Sultan Ibrahim sendiri terus-terang telah menyatakan keberatannya dengan pajak baru itu. Menurut Sultan Ibrahim rakyatnya miskin dan mereka sudah dikenakan pula berbagai macam pajak lain yang sudah cukup berat-berat. Akan tetapi tekanan Belanda terhadap Sultan Ibrahim cukup berat sehingga ia berada di pihak yang mengalah.

Rakyat Bima mulai resah. Sejak Mei 1907 di beberapa kampung di Bima timbul perasaan tidak puas, terutama di Raba dan Nglai (daerah Belo).²³ Perasaan serupa kemudian menjalar juga ke Rasanggaro, Dena (daerah Bolo) dan juga Kala (Danggo). Di Kampung Raba, ketika akan diadakan registrasi

penduduk paman Sultan sendiri yaitu Raja Amin menghalangi pelaksanaannya. Lalu bulan Agustus 1907 giliran kampung Ngali, sebuah kampung di sebelah tenggara Teluk Bima. Di sini juga rakyat tegas-tegas menolak untuk mengadakan registrasi. 24 Sudah menjadi kekhawatiran umum di Bima dan juga di Sumbawa ketika itu bahwa maksud registrasi penduduk itu sebenarnya untuk mencatat nama laki-laki yang akan dijadikan kuli atau dijadikan budak yang akan dikirim ke luar pulau. 25 Mungkin ini berita angin yang dibesar-besarkan untuk membangkitkan perlawanan, akan tetapi masalah registrasi telah menjadi salah satu *casus belli*.

Pada bulan Oktober 1907, civiel gezaghebber Sumbawa yang baru, A.A. Banse, memberitahukan dalam laporan bulanannya mengatakan bahwa "de politieke toestand in het landschap Bima minder gunstig genoemd moet worden".²⁶ Gubernur Swart menerima berita itu baru bulan Nopember 1907. Karena ternyata keadaan tidak bertambah baik, maka Swart mengirim overste van der Zwaan untuk menyelidiki keadaan di Bima. Ketika van der Zwaan tiba keadaan di Bima semakin bertambah tegang. Van der Zwaan memanggil gelarang Ngali²⁷ untuk meminta laporan dan pertanggungjawaban atas keadaan pada waktu itu. Akan tetapi gelarang dan rakyat Ngali tetap keras menolak diadakannya registrasi apalagi untuk membayar belasting. Malah pemuka-pemuka agama di Ngali mengajak rakyat Ngali untuk melawan sambil mendirikan pertahanan yang kuat di Ngali.²⁸

Sultan Ibrahim mencoba meyakinkan van der Zwaan bahwa keadaan di Ngali akan dapat diatasi. Oleh sebab itu van der Zwaan tanggal 10 Desember 1907 berangkat ke Sumbawa sehubungan dengan terjadinya situasi serupa dengan di Bima. Tanggal 9 Januari 1908 ia kembali lagi ke Bima. Sultan Ibrahim melaporkan bahwa ia telah mengirim utusan ke Ngali akan tetapi utusan itu diusir dan dikejar oleh orang-orang Ngali. Dari sudut Sultan tindakan itu berarti pembangkangan terhadap Sultan mereka sendiri yang sah dan ini dapat dianggap sebagai awal dari suatu pemberontakan. Selanjutnya ternyata juga bahwa orang-orang Donggo (pegunungan) menolak diadakannya registrasi.²⁹

Dalam si tuasi semacam itu van der Zwaan kembali ke Makasar untuk melaporkan kepada Gubernur. Sebuah kapal yang bernama "Siboga" dikirim ke Bima. Kapal ini tanggal 11 Februari kembali lagi ke Makasar membawa surat dari Banse yang mengabarkan bahwa Raja Amin dan Jeneli Monta, saudara dari Raja Amin, berada di belakang gerakan rakyat Ngali.³⁰ Jadi mereka adalah kerabat dekat Sultan sendiri yang membangkang. Rupanya antara Sultan dengan beberapa anggota Hadatnya terdapat perbedaan paham mengenai cara mengatasi situasi, terutama dalam menghadapi Belanda sendiri. Sebenarnya Sultan Ibrahim adalah seorang yang baik sesuai dengan gelaranya "ma taho parange", artinya yang baik hati. Hal ini kelak diakui juga oleh Swart meskipun dengan maksud lain. "De Sultan van Bima is een zeer goedhartig man, zwak voor zyne naaste gamilieden".³¹ Kebaikan hati Sultan Ibrahim menjadikan ia seorang tokoh sejarah yang serba salah. Belanda mempersalahkannya ia lemah dalam menghadapi keluarga dekatnya apalagi dalam menghadapi rakyatnya sendiri. Sebaliknya rakyat menyalahkan ia lemah dalam menghadapi tekanan Belanda.

Sementara itu terdapat beberapa tokoh yang ikut mengatur pertahanan di Ngali yaitu Haji Abdul Karim, seorang yang berasal dari pulau Kei dan

dua orang Aceh. Kedua orang Aceh ini datang sebagai orang buangan dan menjadi pekerja paksa di Bima.³² Mungkin mereka datang semasa atau se-sudah berakhirnya perang di Aceh 1904. Rupanya mereka turut menggerakkan rakyat Ngali dan karena pengalaman perang di Aceh mereka diangkat sebagai pemimpin perang (*krygsaanvoerders*).³³

Menghadapi situasi di atas akhirnya gubernur Swart memutuskan datang sendiri ke pulau Sumbawa untuk memerangi rakyat Bima dan Sumbawa yang membangkang. Dengan alasan untuk mengembalikan "order en rust" demi "de veiligheid van persoon en goed" maka perlu segera diadakan tindakan militer.³⁴ Demikianlah pada tanggal 16 Februari 1908 dengan menumpang kapal KPM "Both" Swart berangkat ke Bima bersama tiga brigade marsose. Keesokan harinya jam 7 pagi pasukan tiba dan mendarat di Bima lalu diasramakan sementara di sebuah gedung sekolah (kampung Benteng sekarang). Hari berikutnya tiba lagi dua brigade marsose yang menumpang kapal "Dog" dari Kendari. Kedua brigade ini ditempatkan dalam benteng tua.³⁵

Seluruh pasukan Belanda yang terdiri dari lima brigade marsose ditempatkan di bawah komando letnan satu J.H.C. Vastenou dan pembantu letnan M. Schouten. Kemudian ditambahkan marinir dengan kapal "Siboga" yang dipimpin oleh letnan laut kelas satu Pieren. Sementara itu sejak tiba di Bima selama dua hari gubernur Swart berunding dengan Sultan Ibrahim. Dari informasi-informasi yang dikumpulkan Swart memutuskan untuk menyerbu Ngali tanggal 19 Februari 1908.³⁶

Ngali ketika itu masih merupakan sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang Gelarang. Kampung ini termasuk daerah Belo. Sejak hubungan ibukota tegang, Ngali telah diperkuat benteng pagar. Di sekelilingnya terhampar sawah yang masih berair dengan galangan-galangan setinggi 1 m. Dalam kampung, diantara rumah-rumah dibuat gang-gang sempit berpagar 1 1/2 m. Kampung itu dapat dimasuki dari empat arah : utara, timur, selatan dan barat. Di bagian barat kampung terdapat sebuah masjid yang menjadi pusat pertemuan dan kegiatan gerakan. Pemimpin-pemimpinnya beberapa bangsawan, tokoh-tokoh agama seperti Haji Abdul Karim, Haji Se.³⁷ Kedua orang ini menyerukan perang sabil³⁸ terhadap "dou kaifi" (orang kafir) Belanda. Rakyat Ngali mempersenjatai diri dengan berbagai macam senjata, dari senjata tajam seperti keris dan tombak sampai ke senjata api (senapan berbagai jenis). Rakyat Bima seperti juga rakyat di pulau Sumbawa pada umumnya memperoleh senjata api dari Singapura sebagai hasil dagang tukar dengan kuda dan kerbau.³⁹ Mereka yang ikut dalam gerakan perlawanan itu memakai pakaian serba putih, bahkan benderanya pun menggunakan bendera putih.⁴⁰ Ketika itu rakyat Ngali sudah siap menghadapi datangnya serangan setiap saat.

Pasukan Belanda tiba jam 8 pagi di Nata setelah berjalan sejak jam 1 malam. Dari Nata pasukan itu meneruskan perjalanan ke Ngali dan tiba jam 11.15.

Mereka bermaksud untuk menyerbu dari arah selatan dan utara kampung. Dalam pasukan sebelah selatan terdapat Swart, Vastenou dan Banse, sedangkan dari sebelah utara terdapat brigade Schouten.

3. Perang Ngali.

Pertempuran mulai terjadi kira-kira jam 12. di sebelah selatan kampung, ketika para pejuang Ngali maju menyongsong musuh dengan melepaskan tembakan-tembakan. Pasukan Belanda yang profesional dan bersenjata lengkap bukan tandingan pejuang-pejuang Ngali yang mengandalkan semangat dan keberanian semata-mata. Setelah melalui pertempuran sengit akhirnya pada jam 15.45 kampung Ngali jatuh ketangan musuh. Di antara mayat pemimpin-pemimpin Ngali terdapat Haji Se, Haji Abdul Karim serta dua orang Aceh, sedangkan di pihak Belanda komandannya sendiri Vastenou tewas ditusuk-tusuk tombak. Mayat-mayat marsose dikuburkan di Ngali kecuali mayat Vastenou yang segera dikirim ke Makasar untuk dikuburkan di sana.⁴¹

Setelah Ngali jatuh tanggal 19 Februari itu, pasukan Belanda kembali ke Bima. Kampung Ngali kosong, karena orang-orang selain ada yang ditawan, ada pula yang mengungsi ke tempat-tempat lain. Di ibukota Bima, Belanda mengadakan rahasia senjata api dan senjata tajam.

Kemudian terbetik berita bahwa di kampung-kampung sebelah barat Teluk Bima seperti Daru, Timu, Rasanggaro, Sila dan Dena, rakyatnya juga mengangkat senjata dengan bantuan orang-orang Donggo. Pemimpin-pemimpinnya antara lain Daeng Manasa dan seorang bernama Haji Mansyur dari Dompu.⁴² Pada tanggal 25 Februari, Swart mengirim lima brigade marsose dan marinir dengan kapal "Siboga" ke sana. Hari itu juga Rasanggaro jatuh dan keesokan harinya Dena menyusul. Semuanya melalui pertempuran Dengan jatuhnya Rasanggaro dan Dena maka kampung-kampung lain terpaksa menyerbu. Demikianlah pada akhirnya gubernur Swart dapat memberitakan kepada pemerintah Hindia Belanda bahwa "rust en orde in Bima waren hersteld".⁴³ Kini giliran Sumbawa.

4. Perang Sapugara

Wilayah kesultanan Sumbawa, selain daerah yang berada langsung di bawah kekuasaan Sultan, terdapat juga lagi tiga negara vasal yaitu Serang (Setalok), Taliwang dan Jarewe. Hubungan antara negara-negara vasal dengan Sumbawa cukup unik. Ketika itu secara nominal negara vasal Serang (Setalok) milik putera mahkota, Taliwang milik saudara dari Sultan dan Jarewe yang merangkap menjadi Sultan Sumbawa. Ketiganya **absentee** karena mereka semua berdiam di ibukota Sumbawa Besar. Yang memegang kekuasaan nyata, seperti di Taliwang misalnya, ialah mengkubumi yang ber-gelar **Anti Desa**. Ia yang mengetahui persis keadaan rakyat setempat oleh karena ia berdiam dan hidup di tengah-tengah mereka. Adanya semacam negara dalam negara ini membuat hubungan antara negara vasal dengan negara induk Sumbawa. Jika ada ketegangan maka Anti Desa yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dapat menolak begitu saja kekuasaan atau perintah dari Datunya atau Sultan Sumbawa sendiri.

Pada waktu itu Datu Taliwang yang kebetulan adalah saudara kandung dari Sultan Muhammad Jalaluddin menjadi semacam tuan tanah (*landsheer*) atas Taliwang. Ia tidak pernah berdiam di Taliwang melainkan di ibukota. Kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada Anti Desa La Unru Sinrang.

Hubungan antara Sultan Sumbawa dan Datu Taliwang di satu pihak dengan Anti Desa di lain pihak adalah semacam hubungan feodal "lord" dan "Vassal".⁴⁴ La Unru Sinrang adalah seorang Anti Desa yang masih muda. Usianya ketika itu 28 tahun. Ia mempunyai kharisma yang kuat sehingga pengaruhnya terhadap rakyat Taliwang besar sekali.

Menjelang terjadinya perang, di Taliwang di tempatkan seorang mantri-polisi yang mengurus pelaksanaan monopoli cendu (*opium regie*) oleh Belanda. Petugas inlander ini yang melaporkan pada Juni 1907, bahwa Anti Desa La Unru Sinrang menolak untuk mengadakan registrasi rakyatnya di Taliwang.

Berdasarkan laporan ini, civiel gezaghebber waktu itu, Muller membahas masalah ini dengan Sultan Muhammad Jalaluddin dan saudaranya Datu Taliwang. Muller mendesak agar kedua orang ini dapat menggunakan kewibawaannya untuk mempengaruhi La Unru. Akan tetapi mayoritas rakyat Taliwang memihak La Unru dan setiap campur tangan Datu Taliwang ditolak.⁴⁵

Pada bulan Oktober 1907 Banse menggantikan Muller sebagai gezaghebber. Banse mengadakan pertemuan dengan Sultan Sumbawa dan Dewan Hadatnya mengenai masalah Taliwang. Sehabis pertemuan itu Sultan memerintahkan Datu Taliwang berangkat ke Taliwang untuk mengadakan registrasi. Sultan Sumbawa sendiri memang tidak berdaya, baik dalam menghadapi tekanan Belanda maupun menghadapi bawahannya. Swart juga kemudian menilai "'de Sultan van Soembawa is een zwak, willoos individu'".⁴⁶

Pada bulan Nopember 1907 Datu Taliwang berangkat ke Taliwang untuk melaksanakan perintah Sultan. Di Taliwang tidak ada yang dapat dilakukannya karena rakyat menolaknya. Ia terpaksa kembali ke Sumbawa Besar. Hal ini ternyata ketika overste van der Zwaan berada di ibukota Taliwang pada pertengahan pertama bulan Desember 1907, Datu Taliwang tidak ada di situ.⁴⁷

Sesudah Datu Taliwang gagal, maka Banse memutuskan untuk datang sendiri menemui La Unru di tempat kediamannya di kampung Sapugara. Kampung ini letaknya di sebelah timur laut ibukota Taliwang yang juga bernama Taliwang. Jarak dari Taliwang kira-kira 3 1/2 jam perjalanan kaki.

Dengan satu detasemen marinir yang diangkut kapal "Slboga", Banse berangkat ke Sapugara. Di sepanjang perjalannya ia melihat kelompok-kelompok orang yang bersenjata. Rombongan Banse berhenti di kampung Bere di sebelah barat Sapugara. Dari kampung Bere, Banse mengirim utusan ke Sapugara dan mengundang Anti Desa datang menemuinya. La Unru yang menerima utusan itu menolak undangan Banse.

Melalui utusan itu La Unru mengatakan ia sakit. Banse memutuskan untuk datang sendiri menemui La Unru akan tetapi dilarang pengawal-pengawalnya. Satu utusan dikirim lagi tetapi ditolak La Unru dengan alasan yang sama

Setelah itu masih ada lagi usaha seorang pembesar Sumbawa supaya La Unru menurut tetapi tetap tidak berhasil. La Unru tetap menolak registrasi rakyatnya. Ketika Banse datang lagi ke Sumbawa tanggal 1 Februari 1908, ia mendesak Sultan memanggil La Unru dan menuntut supaya La Unru meminta maaf secara tertulis. Tentu saja La Unru menolak menghadap Sultan apalagi harus meminta ampun secara tertulis. Karena itu Banse datang lagi ke Taliwang. Di sini Banse kembali harus menerima kenyataan bahwa mus-

lah la Unru mau menyerah. La Unru bahkan sibuk memperkuat Sapugara sebagai benteng pertahanannya dengan memasang lima lila.

Ia mempersenjatai pengikut-pengikutnya dengan senjata api dan senjata tajam. Kampung-kampung di sekitar Sapugara juga diperkuat. Jalan-jalan menuju ke Sapugara dibuat penghalang dari kayu-kayu yang ditebang. Pos-pos penjagaan ditempatkannya di mana-mana yang dianggapnya penting. La Unru menyadari bahwa suatu tindakan kekerasan pasti akan dilakukan terhadapnya. Untuk itu ia harus menyiapkan diri. Suatu tindakan dari pihak lawan untuk menghentikan kegiatan-kegiatannya itu lalah dengan memecat La Unru sebagai Anti Desa dan menggantikannya dengan Anti Desa yang baru. Tindakan ini pun ternyata tidak berhasil karena Anti Desa yang baru tidak mempunyai pengikut.⁴⁹ Belanda harus menunggu hasil perang di Blima baru tindakan militer yang serupa dapat dilakukan terhadap gerakan La Unru.

Setelah urusan di Blima dianggap selesai, gubernur Swart dengan kapal api "Reaal" pada tanggal 17 Maret 1908 berangkat ke Sumbawa. Keesokan harinya pagi jam 6 tiba di Labuan Balat, pelabuhan Taliwang. Di situ telah berlabuh kapal "Siboga".

Pasukan Belanda terdiri dari lima brigade marsose, satu grup Infantri, marinir dan sejumlah serdadu geni yang membawa bahan peledak. Sebuah kanon 3,7 Sn yang digunakan dalam pertempuran di Dena juga dibawa. Dari Labuhan Balat pasukan Belanda bergerak ke Taliwang yang jaraknya 2 jam perjalanan.

Di Taliwang pasukan Belanda mendirikan bivak di tepi sungai Taliwang. Jam 1 malam diam-diam pasukan Belanda bergerak menuju Sapugara Medan yang mereka lalui sulit. Mereka menyusur celah sungai dan menyebangi sungai Taliwang yang deras. Kadang-kadang mereka harus melalui tanah berbukit dan sawah-sawah yang masih basah. Pagi hari tanggal 19 Maret sebelum sampai ke Sapugara terjadi pertempuran di Ponjok dan Bere yang dipertahankan oleh para pejuang. Setelah kedua kampung ini jatuh musuh terus maju ke Sapugara. La Unru mempertahankan kampungnya ini bersama kira-kira 600 orang pejuang yang bersenjata. Ketika musuh maju dari arah barat, mereka melepaskan tembakan senapang dan lila. Musuh membala dengan tembakan-tembakan senapang dan kanon yang ditempatkan di atas sebuah tempat yang ketinggian di sebelah barat daya kampung. Sejumlah pejuang yang maju menyongsong musuh dengan tumbak dihalau kembali ke dalam kampung dengan tembakan-tembakan dari pihak musuh. Setelah pertempuran yang berlangsung hampir berat sebelah itu, akhirnya kampung Sapugara jatuh ke tangan musuh. Korban yang tewas atau luka-luka berjatuhan di kedua belah pihak, tetapi lebih besar di pihak pejuang.⁵⁰ Di antara pemimpin pejuang yang tewas terdapat Dea Buseng, seorang tangan kanan La Unru. Ketika Swarta dan pembantu-pembantunya masuki rumah Anti Desa yang berada di tengah-tengah kebun kelapa, rumah itu telah kosong.

Sesudah Sapugara jatuh, pasukan Belanda kembali ke Taliwang pada hari itu juga. Mereka yang luka-luka dinikmati ke kapal "Siboga" yang segera berangkat ke Makasar. Sementara itu La Unru dan sebagian dari pengikut-pengikutnya sempat meloloskan diri dari Sapugara. Mereka berlindung sementara di kampung Motang. Selanjutnya adalah kisah pengungsi an La Unru, keluarga dan pengikut-pengikutnya dari satu tempat ke tempat

lain untuk menghindarkan diri dari pengejarian tentara Belanda.

Melalui pengejarian yang intensif, pada tanggal 3 April 1908 isteri dan tiga orang anak La Unru tertangkap di sebuah tempat persembunyian di tepi anak sungai Brang Rhea. Enam hari kemudian tanggal 9 April La Unru akhirnya tertangkap di dekat kampung Bangkat Montit. Hari itu juga ia dibawa ke Taliwang bersama senapan Winshesternya.⁵¹ Karena di Sumbawa ia masih dianggap berbahaya ia dibawa ke Makasar untuk diadili. Akhirnya berdasarkan surat keputusan Gubernur Jendral J.B. van Heutsz tertanggal 14 September 1908, "inlander" La Unru Sinrang, usia 28 tahun, Anti Desa dari vasal Taliwang diasingkan ke Cirebon.⁵²

5. PENUTUP

Baik Perang Ngali maupun Perang Sapugara hanya berusia singkat meskipun prolognya cukup lama. Di Bima dan Sumbawa Sultan-Sultan tidak ikut serta memimpin perlawanannya terhadap Belanda. Para pemimpin perlawanannya berasal dari golongan aristokrat dan elite pedesaan seperti pemimpin-pemimpin agama (haji-haji). Mereka memimpin rakyat yang umumnya petani yang menggunakan senjata apa adanya. Adapun posisi Sultan Ibrahim dan Sultan Muhammad Jalaluddin memang amat sulit.

Mereka terjepit diantara Belanda di satu pihak dan masing-masing rakyatnya di lain pihak. Pembangkangan rakyat terhadap Sultan-Sultan mereka yang sah menunjukkan hilangnya wibawa Sultan-Sultan itu. Sultan Sultan tidak lagi menjadi simbol persatuan dan kesatuan rakyat, melainkan dalam kedudukan lemah mereka menjadi alat kolonial Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda yang campur tangan dalam bidang politik dan ekonomi mulai menghancurkan tata masyarakat tradisional yang ada.

Perang Ngali dan Perang Sapugara merupakan perlawanannya lokal. Ditinjau sebagai gerakan-gerakan sosial, maka gerakan-gerakan ini tidak disusun dalam suatu wadah yang rapi; tidak mempunyai hubungannya satu sama lain ; tidak mempunyai ideologi yang jelas. Untuk zamannya memang tidak bisa dituntut hal-hal yang semacam ini. Hanya di Bima gerakan perlawanannya dihidupkan oleh semangat sabil, sedangkan di Sumbawa (Taliwang) gerakan itu tergantung pada khrisma seorang pemimpinnya semata-mata.

Belanda yang sibuk mengadakan pasifikasi di luar Jawa dalam rangka Pax Neerlandica, dengan menggunakan tentara profesional telah merangsi rakyat Bima dan Sumbawa yang bersenjata seadanya. Belanda memang berhasil menang, tetapi dengan adanya gerakan-gerakan perlawanannya itu, rakyat Bima dan Sumbawa sebagai bagian dari masyarakat tradisional yang sedang dalam proses berubah telah menunjukkan dinamika yang besar.

Bandung, 20 Oktober 1981.-

Catatan

1. Keterangan lengkap tentang letusan gunung Tambora dan akibat-akibatnya terdapat dalam "Narrative of the effects of the eruption from the Tamboro Mountain, in the Island of Sumbawa, on the 11th and 12 th of April 1815", VBG, Deel 8, 1816, hlm.2-25.
2. Kesulitan-kesulitan Sanggar hapus tahun 1928, Dompu tahun 1934, Bima dan Sumbawa tahun 1950.
3. Muhammadin Umar menulis, *Perang Ngali (1908-1909) sebagai manifestasi rakyat Bima untuk menentang penindasan Belanda*, sebuah tesis untuk Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah, FKIS—IKIP Malang, 1977. Tesis ditulis berdasarkan hasil wawancara tahun 1976.

Perang Ngali atau lebih dikenal dengan Lewa Ngali menurut orang Bima memang masih hidup dalam ingatan rakyat yang dituturkan dari mulut ke mulut selama puluhan tahun tanpa seorang pun memikirkan untuk merekamnya dalam karya tulis. Ketika saya menjadi siswa SMP di Bima tahun 1950 saya sudah mendengar tentang Lewa Ngali ini dari teman-teman Ngali sendiri tanpa ada niat untuk menulisnya. Dari segi ini tesis Muhammadin Umar patut sekali dihargai sebagai suatu usaha untuk menulis sejarah sebagaimana yang diingat (*remembered history*). Namun tesis ini mempunyai kelemahan, terutama ketergantungan penulis semata-mata hanya pada hasil wawancara saja. Distansi waktu cukup jauh--68 tahun (1908-1976) -- sehingga orang-orang yang diwawancara adalah dalam perang itu melainkan orang-orang dari generasi muda (atau ketiga ?). Pengetahuan mereka hanya berdasarkan penuturan dari orang-orang sebelumnya saja. Akibatnya hasil wawancara sudah tidak akurat lagi, terutama mengenai tanggal-tanggal peristiwa dan nama-nama orang Belanda. Adapun nama-nama tokoh Ngali atau daerah lainnya di Bima memang benar karena mereka masih merupakan idola yang terus menjadi buat tutur yang dibanggakan. Sehubungan dengan di atas terhadap tesis M. Umar perlu sekedar koreksi.

Belanda sendiri membuat laporan tertulis khusus mengenai perang ini segera sesudah peristiwa terjadi dengan menyebut jam, tanggal, nama-nama orang Belanda serta pemimpin Ngali sendiri (termasuk juga Sapugara). Tulisan ini merupakan suatu studi yang menggunakan bahan wawancara dan sumber-sumber Belanda yang saya dapat di *Algemeen Riksarchief (ARA)*, Den Haag.

Bandingkan pula, M.Din H. Umar, "Perlawan Bersenjata I", *Selayang Pandang Sejarah Perjuangan Rakyat Bima (1908-1950)*, disusun oleh Panitia Hari Pahlawan ke-XXXIII, Daerah Tk. II Bima Th. 1978, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Bima, hlm. 3 - 24.

"Uittreksel uit het Verslag van den Civiel en Militairen Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden betreffende de Excursie naar het eiland Sumbawa, 16 Februari - 9 Mei-1908", *Indisch Militair Tijdschrift*, Extra Bijlage No.28, 1908, hlm. 1-39.

Cf.M.H.DU Croo, *Generaal Swart, Pacifier van Atjeh*, N.V. Leiter-Nypels, Maastricht, (1943/ hlm. 52-75

5. Mengenai gerakan sosial periksa, Sartono Kartodihardjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888*, Mertinur Nijhoff, 's-Gravenhage, 1966, hlm. 1-28
6. Istilah J.M. Gullick, *Indigenous Political Systema of Western Malaya*, The Athlone Press, New York, 1965.
- H. Zollinger, "Verslag van eenercis naar Bima en Soembawa en ennege plaatseen op Celebes, Saleier en Floris, gedurende den maanden Mei tot Desember 1847", *VBG*, 1850, hlm. 130 - 135.
8. D.F. Van Braam Morris, "Nota van toelichting behoorende hij het contract gesloten met het landschap Bima op den 20 sten Oktober 1886, aan de regeering Ingediend door den Gouverneur van Celebes en Onder hoordigheden", *Tijd*, Deel 34, 1890.
9. Bima "asli" lalah daerah di pulau Sumbawa saja. Ketika itu pada kesultanan Bima masih ditambahkan daerah Manggarai, di pulau Flores bagian barat.
10. Braan Morris, *op.cit*, hlm. 176 - 178 ; 199.
11. *Ibid*, hlm. 200 - 201.
12. A. Ligvoet, "Aanteekeningen betreffende den economischen toestand en ethnografie van het rijk van Soembawa", *Tijd*, 25, 1876.
13. *Ibid*, hlm. 571.
14. *Ibid*, hlm. 571
15. *Ibid*, hlm. 565 - 567.
16. *Ibid*.
17. *Kolonial Verslag*, 1908, hlm. 61 - 62.
18. *Overeenkomsten met de Zelfbesturen in de Buitengewesten*, Seri A.No. 3 Landsdrukkerij, Weltevreden, 1929, hlm. 401 - 450 ; 489 - 528.
19. Verb, 9 Juni 1908 No. 47.
20. *Kolonial Verslag*, 1909, hlm 69.
21. Verb. 9 Jun. 1908 No. 47.
22. *Ibid*.
23. *Ibid*.
24. Verb. 11 Jun. 1909 No. 44.
25. *Koloniaal Verslag*, 1909, hlm. 68
26. Verb. 11 Jun. 1909 No. 44.
27. Besar kemungkinan nama gelarang Ngali ini Selasa Ompu Kapa'a.
Lihat Mohammaddin Umar, *op.cit*.
28. Verb. 11 Jun. 1909 No. 44.
29. *Ibid*.
30. *Ibid*.
31. Mailr. Nr. 1191/08. *Memorie van overgave van het hestuur over het Gouvernement Celebes en Onder hoordigheden opgemaakt door den aftredenden Civiele en Militairen Gouverneur van dit gewest H.N.A. Swart*, hlm. 26.
32. Verb. 11 Jun. 1909 No. 44.
33. *Ibid*.
34. Mailr. Nr. 1191/08, hlm. 18.
35. *Indisch Militair Tijdschrift* 91mt0, hlm. 1 - 2.
36. *Ibid*, hlm. 3.
37. Pemimpin-pemimpin lain Haji Mohammad Said Abu Tolu, Haji Yasin Abu Iye. Lihat Mohammaddin Umar, *op.cit*, hlm. 18.
38. IMT, hlm. 8; Verb. 11 Jun. 1909 No. 44; *Kolonial Verbslag*, 1908, hlm. 61.

39. Militaire Memorie over de Afdeeling Soembawaa, (tanpa tahun), him. 2.
40. Bagi Belanda bendera putih berarti tanda menyerah, tetapi bagi rakyat Ngali warna putih sebagai lambang kesucian. Lihat Mohammaddin Umar op.cit., him. 43 Dalam perang Ngali itu sering terjadi "kesalahan pahaman". Pejuang pejuang yang mengibarkan bendera putih disangka oleh Belanda sebagai tanda menyerah sehingga mereka menghentikan tembakan-tembakan, tetapi dibagian lain dari kampung Ngali pejuang-pejuang masih terus melepaskan tembakan atau menyerang dengan tombak. Sehubungan dengan ini Belanda dengan kesal mencatat, "van de witte vlag werd door den vijand herhaaldelijk misburlik gemakt". Periksa Verb. 11 Jun. 1909. No. 44.
41. IMT, him. 7 Cf. Koloniaal Verbslag, 1908, him. 61.
42. Ibid, him. 9. Pemimpin-pemimpin lain, Haji Abduraahim Abu Sara, Haji Usman Abu Beda, Haji Abdul Aziz. Lihat Mohammadin Umar, op.cit. him. 22.
43. IMT, him. 16.
44. Periksa Marc Bloch, Feudal Society, Vol.I, Routledge & Kegan Paul, London, 1978, him. 219-230.
45. Verb. 11 Jun. 1909 No. 44.
46. Mailr. Nr. 1191/09, him. 26.
47. Verb. 11 Jun. 1909, No. 44.
48. Ibid.
49. Ibid.
50. IMT, him. 24.
51. Ibid., him. 24-33.
52. Verb. 11 Jun. 1909 No. 44.

PENGKRISTENAN TANAH BATAK

Pertemuan dua kepentingan (usaha mempertahankan Habatahon dan Kolonialisme Belanda).

Oleh : Dra. Tiurna L. Tobing

I. Pendahuluan.

Berita-berita tentang orang Batak, sebelum daerahnya dimasuki oleh orang-orang Eropah, tidak banyak dapat dipelajari dari Pustaka-pustaka Batak. Karena bukanlah menjadi kebiasaan orang Batak untuk menulis tentang dirinya sendiri. Buku-buku dengan kepercayaannya, peraturan-peraturan adat istiadat Batak, juga tentang pengobatan dan perdukunan.

Jika ada Pustaka yang memuat tentang seseorang atau suatu peristiwa (1) maka tidak akan ditemukan Tarikh yang dapat memberi petunjuk yang jelas, sehingga harus diperbandingkan dengan silsilah keturunan (dalam Pustaka tarombo sebuah keluarga) (2) atau diperbandingkan dengan laporan-laporan dari orang-orang luar yang pernah mengadakan hubungan dengan orang-orang Batak.

Berita-berita tentang orang Batak dapat diketahui dari laporan-laporan perjalanan baik oleh orang Cina dan Arab atau dari tulisan-tulisan orang Eropah yang pernah singgah baik di pantai Barat maupun pantai Timur Sumatra. (3). Sebelum abad ke-13 pengaruh kebudayaan Hindu sudah masuk ke daerah Batak seperti terlihat dari peninggalan-peninggalan yang ditemukan di Tanah Batak. Tetapi pengaruh itu mulai terdesak oleh kebudayaan Batak asli setelah abad ke-13 (4) dan sejak itu kebudayaan Hindu hanya merupakan bayang-bayang yang hanya merupakan kata-kata pengindah do'a dan kata-kata keramat lebih menonjol dari pada nilainya sebagai sumber kepercayaan. (5).

Dalam Dagh - Register Casteel Batavia tahun 1697 juga termuat laporan tentang mendaratnya sebuah perahu di Batavia yang membawa 2 orang Batak, meskipun tidak dijelaskan dari mana mereka berasal dan apa alasananya datang ke Batavia (6). Juga laporan menjelang masuknya orang Barat ke daerah pedalaman Tanah Batak memperlihatkan telah adanya kontak antara orang Batak dengan orang-orang luar.

Laporan itu menyuggerkan tentang hubungan-hubungan perdagangan, politik dan kontak kebudayaan dan juga laporan tentang kehidupan per-ekonomian dan sosial mereka dan juga tentang Agama, keberanian, kegemanan berperang. Contoh : Kerajaan Nagur yang dengan berani menyerang Aceh yang berusaha menguasai daerahnya (7).

II. Masyarakat Batak.

1). Orang Batak sejak jaman dahulu berdiam dalam hutan-hutan, yang kemudian bergabung dalam kelompok huta. Pada umumnya huta-huta Batak dikelilingi oleh Parik yang merupakan pertempuran.

Parik itu berlapis dua yaitu Parik bulu Suraton yang terletak dibagian luar huta dan Parik bulu Duri yang terletak dalam pertempuran. (8) Ada juga pertempuran yang terbuat dari batu-batu gunung yang disusun secara bertingkat-tingkat, contohnya : Huta Lumban Raja di Bakara yang merupakan pusat Pemerintahan Raja Sisingamaradja. Pertahanan yang kuat ini

disamping merupakan usaha untuk mempertahankan diri dari serangan huta-huta lain, karena seringnya terjadi perperangan antara huta, juga merupakan usaha atau simbol untuk memisahkan diri dari pengaruh luar yang di-khawatirkan akan merubah baik kepercayaan maupun kehidupan sosial mereka. (9)

Huta biasanya dikuasai atau dimiliki oleh sekelompok orang yang semarga, yang kadang-kadang dilengkapi dengan marga-marga lain yang merupakan marga Paripe yang merupakan marga boru. Pemerintahan Huta merupakan pemerintahan otonom, yang merupakan horajaon/kerajaan yang harus sanggup mengurus diri sendiri dan sanggup mempertahankan dirinya dari serangan luar. (10)

Pemimpin huta tersebut disebut **Raja Huta**, merupakan seorang pendiri atau keturunan pendiri huta, yang menjalankan pemerintahannya secara turun menurun. (11) Sifat pemerintahan Raja Huta kedalam memerintah rakyatnya dengan sistem demokratis, yaitu secara musyawarah, dibantul oleh wakil-wakilnya, sedang keluar ia merupakan wakil hutanya dalam perserikatan desa/Pertanian/Sapartutupan. (12) dan menjadi wakil desanya dalam suatu Karya Adat (Horja) yang berlangsung dalam suatu teritori yang lebih luas diantara orang-orang yang seketurunan (semarga). Biasanya horja berlangsung diantara sekelompok huta dimana salah satu marga Raja berperan karena merupakan pemilik daerah (Manjunjung Barlingin) yang memiliki Golat atau hak atas tanah tersebut. Horja juga merupakan suatu kompleks huta, yang salah satu dari huta itu merupakan **huta bagasan**(pematang), yang merupakan tempat tinggal **Raja Bolon** (besar) yang merupakan turunan langsung dan turunan tertua dari Raja pendiri horja tersebut. Contoh yang masih terlihat jelas di Simalungun yaitu Huta Raja Pematang Slantar atau pada Huta Raja Sisingamaradjad di Bakara yang bernama Huta Lumban Raja.

Ada lagi sebuah perikatan yang bernama **Blus** atau **Bus** yang merupakan persekutuan keagamaan yang mengurus upacara-upacara persembahan dan pemujaan baik kepada nenek moyang atau pada Tuhan/Dewa-Dewa.

Persekutuan ini dikepalai oleh **Raja Parbarlingin** yang khusus mengatur segi kerokhanian pekerjaan **Blus** sedang **Raja Doll** mengurus hal hal umum yang berhubungan dengan masalah keduniawan anggota **Blus**. (13)

Sehingga Pemerintah Batak dimulai dari Huta yang dipimpin oleh Raja Huta, kemudian sekelompok huta membentuk kelompok huta yang disebut Horja dipimpin oleh Raja Junjungan, beberapa Horja bergabung dalam Blus dipimpin oleh Raja Parbarlingin yang terutama memimpin dalam persoalan kerokhanian. (14)

2). Sistem adat **Dalihan na Tolu** berperan sangat penting dalam kehidupan sosial orang Batak, dan umumnya dihubungkan dengan kepercayaannya. Dalihan'na Tolu mencerminkan hubungan kekerabat, yang mengatur tugas kewajiban antara **hula-hula**, **boru** dan **dongan Sabutuha**. Dalihan na Tolu dimaksudkan untuk mengatur hubungan sosial antara sesama kelompok masya rakyat yang tersebut diatas secara teratur dan terperinci. Juga merupakan alat pengukur untuk mengawasi moral masyarakat Batak pada umumnya. (15). Karena itu dalam setiap kegiatan masyarakat Batak peranan Dalihan na Tolu terlihat dengan jelas.

Pelaksanaan adat Dalihan na Tolu dihubungkan dengan kepercayaan orang Batak terhadap **Debata na Tolu** (Tuhan yang tiga), yaitu **hula-hula**

yang mewakili benua atas, boru mewakili benua tengah dan Dongan Sabutu ha mewakili benua bawah yaitu berdasarkan alam pemikiran orang Batak terhadap dunia kehidupannya. **Debata Mulajadi na Bolon** (Tuhan Yang Maha Kuasa awal dari segalanya) menciptakan Debata na Tolu dilengkapi Debata Asl-Asi sebagai Dewa-Dewa Batak dan juga menciptakan sistem Dalihan na Tolu yang harus dilengkapi oleh hadirnya Raja, sehingga dalam suatu **Horja** umpamanya peranan keempat unsur ini selalu akan ditemukan. (16).

Jika Dalihan na Tolu merupakan sistem adat, maka **marga** merupakan pameran adat. Marga berfungsi mengatur ketentraman seluruh kehidupan masyarakat dalam hubungan antar manusia, atau antar kelompok dalam menjalankan pergaulan.

Adat hubungan darah (**Persetubuhan**), adat persaudaraan (**Partondongan**), dan yang terutama adat peraturan/hukum yang mengatur hak milik seorang.

Setiap marga memiliki daerahnya tersendiri yang disebut dengan istilah **Manjunjung baringin na be**, yang berarti masing-masing memiliki kedaulatan atas daerah miliknya (**Golat na**) (17).

Sampai sekarang kedudukan marga masih dinjunjung tinggi, karena ada nya marga dapat dicegah atau dikurangi terjadinya Incest/Indogami/ Sumbang, yang sangat dihindari orang Batak yang berdasarkan pengalaman secara Mythologi pernah terjadi (18), juga untuk dapat mempertahankan kesatuan keturunan secara teratur. Memang terjadi pengelompokan marga-marga dalam masyarakat Batak, tetapi dengan adanya susunan permargaan yang teratur, mudah sekali untuk menarik garis keatas yang dapat mempertemukan marga-marga tersebut pada satu titik pusat yaitu sebagai keturunan **SI Raja Batak**. (19)

3. Sisingamangaradja

Diatas telah disebutkan bahwa **Sisingamangaradja** merupakan salah seorang Raja Parbaringin yang mempunyai kelebihan kharisma (20) yang menyebabkan ia memiliki pengaruh yang luas jauh keluar dari daerah Blusnya. Ia bahkan punya pengaruh sampai ke Tanah Karo dan Simalungun. Jika melihat keturunannya maka dinasti ini merupakan turunan dari **Tuan Sori Mangaraja** yang menurut beberapa pendapat merupakan Raja Batak yang pernah berkuasa di kerajaan Haru Tua, yang kemudian mengundurkan dirinya ke Pusuk Bukit untuk mulai mendirikan sebuah kerajaan yang baru di Sianjurmula mula dan pada turunannya yang ke-7 lahir Raja **Sisingamangaradja** yang pertama, yaitu ± tahun 1515. (21)

Raja **Sisingamangaradja** adalah raja **Parbaringin**, yang blasanya dalam kehidupan masyarakat Batak merupakan raja yang berperan dalam urusan urusan keagamaan, seharusnya ia merupakan raja Imam yang mengatur segala kehidupan yang berhubungan dengan kerokhanian rakyatnya. Umumnya pengaruh raja Parbaringin ini terbatas pada Blus tertentu yang luasnya kira-kira meliputi 7 Horja, (22) dan blasanya dalam satu Blus terdapat beberapa orang raja Parbaringin, mengingat dalam kehidupan masyarakat Batak Kuno, hampir seluruh kegiatannya berkisar sekitar masalah kerokhanian dan adat.

Ternyata pengaruh raja **Sisingamangaradja** meluas melampaui daerah Blushya, bahkan hampir meliputi seluruh Tanah Batak, sehingga akhirnya

raja-raja Parbaringin merupakan perantara atau wakil Sisingamangaradja terhadap rakyat Batak.

Segala perintah yang berhubungan dengan penghormatan kepada **Mulajadi na Bolon** dan para dewa lainnya, atau untuk melakukan upacara persembahan lainnya cukup dikirimkan oleh Sisingamangaradja kepada raja Parbaringin di Bius masing-masing dan hanya dengan kata "**Tona ni rajanta**" (Pesan Raja Kita Sisingamangaradja), penduduk akan segera mentaati segala perintah. Kesaktiannya sangat disegani dan dihormati oleh rakyat Batak, hanya dengan mengirimkan seorang utusan yang membawa salah satu barang regalianya, ia dapat mendamaikan sebuah pertikaihan bahkan dapat menghentikan pertempuran antara marga atau **Blus**.

Umumnya orang Batak berwatak teguh dalam mempertahankan prinsipnya. Terutama dalam soal kepercayaannya dan juga dalam mempertahankan hak-hak dan kewajibannya. Hal ini agaknya dipengaruhi oleh sistem adat **Dalihan na Tolu** yang sejak berabad-abad mengatur dengan tegas kedudukan, hak dan kewajiban tiap-tiap orang, sehingga seseorang harus tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. (23) Tetapi keteguhan itu bukan berarti tidak dapat berubah, karena jika dirasa kan adanya kebutuhan untuk mengalah dan mengalah itu akan membawa keuntungan, maka mereka bersedia untuk mengadakan perubahan. (24) Sifat ini rupanya yang memberi kemungkinan orang Batak mau menerima Agama Kristen.

Agama Kristen mulai diusahakan masuk ke Tanah Batak sekitar tahun 1824. Beberapa tahun setelah kaum Padri dari Bonjol yang dipimpin oleh Si Pongki na Ngolngolan datang menyerbu dari arah selatan dan berusaha memaksa mereka untuk masuk Agama Islam.

Serbuan ini cukup mengejukan orang-orang Batak, karena boleh dikatakan bahwa hampir seluruh daerah yang dilalui pasukan Bonjol ini rata dengan tanah. Kelaparan dan penyakit berjangkit dimana-mana.

Kematian Raja Sisingamangaradja ke X yang dibunuh oleh Si Pongki na Ngolngolan, meskipun tidak langsung kelihatan, tetapi ternyata menurunkan pamor Raja Raja Parbaringin. Selama ini kepercayaan penuh diserahkan pada Raja Raja Parbaringin dan Sisingamangaradja. Tetapi dalam serbuan Bonjol ini mereka yang memang tidak siap, tidak dapat berbuat apa-apa.

Karena itu merupakan suatu tugas yang berat bagi Raja Sisingamangaradja ke -XI untuk disamping membangun kembali pusat kerajaannya, juga mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinannya.

Kemudian kaum missionaris datang memasuki kehidupan orang Batak, disamping berusaha mengkristenkan orang-orang Batak mereka juga membawa pengobatan kesehatan dan ketrampilan lainnya kepada penduduk. Demikian juga dengan pengetahuan membaca dan menulis huruf latin dan pengetahuan dasar lainnya, yang belakangan ternyata berguna dalam menghadapi pekerjaan dengan orang-orang Belanda setelah Pemerintahan Hindia Belanda dengan perlahan-lahan memasukkan daerah-daerah Batak yang merdeka kebawah pengawasannya. (26)

Kepandaian yang diperoleh dari usaha kaum missionaris tersebut dimanfaatkan oleh semua pihak. Penduduk yang telah mendapat pendidikan memanfaatkan untuk mendapat pekerjaan bahkan kedudukan dalam sistem pemerintahan yang baru, Pemerintah Belanda memanfaatkan untuk men-

dapat pengaruh dari penduduk dengan mengangkat pemimpin-pemimpin baru diantara penduduk, sedangkan kaum missionaris memanfaatkan untuk dapat lebih banyak lagi menarik orang-orang Batak menjadi Kristen.

III. Agama Kristen berhadapan dengan Agama Batak.

1). Keteguhan pendirian orang Batak terbukti dengan penyaringan terhadap pengaruh-pengaruh luar terhadap kebudayaan asli Batak, dimana mereka telah mengembangkan sistem-sistem tertentu dalam kehidupan sosial, hukum dan keagamaannya.

Pengaruh asing itu diserap dalam kehidupan orang Batak tanpa dapat menghilangkan kepribadian tradisionalnya. Baik kebudayaan Hindu, Budha bahkan agama Islam yang dengan rajin berusaha mendesak kebudayaan Batak, baik dari utara atau selatan, tidak ada yang mampu untuk menaklukkan masyarakat Batak.

Usaha mengkristenkan orang Batak dimulai pada tahun 1824, dengan dikirimnya Richard Burton dan N. Ward oleh Baptist Mission Society di Inggris untuk mencoba mengkristenkan orang-orang Batak di pedalaman.

Setelah Traktat London 1824, maka orang-orang Inggris tersebut terpaksa meninggalkan daerah Batak untuk bekerja di tempat lain.

Sepuluh tahun kemudian dua orang pendeta Henrylyman dan Samuel Munson dikirim oleh Zending Amerika untuk bekerja di Tanah Batak. Pengiriman ini mengalami kegagalan karena kedua orang ini terbunuh di kampung Lobupuning. Zending Amerika masih mencoba mengirim orang lain tetapi juga ia mengalami kegagalan terutama karena halangan dari pihak Pemerintah Belanda yang pada waktu itu sudah menduduki Sibolga. (26)

Untuk menanam pengaruhnya di Tanah Batak, Pemerintah Belanda berusaha mengirimkan orang-orangnya untuk mengkristenkan orang Batak. Mereka mulai dari arah selatan (daerah Mandailing) terutama karena daerah ini telah lebih lama dikenal. Tetapi usaha pengkristenan ini tidak banyak hasilnya, karena pengaruh Islam yang sudah lebih awal mempengaruhi daerah ini terutama setelah penyerbuan orang-orang Bonjol. Selama bertahun-tahun usaha memasuki pedalaman Tanah Batak dilakukan oleh orang Belanda, baik melalui usaha administratif maupun secara keagamaan, tidak cukup memuaskan hasilnya.

Pembuatan aturan-aturan dan pembagian daerah (27) telah dilaksana kan orang lain.

Usaha pengenalan terhadap penduduk, telah juga dilaksanakan dengan masuknya Junghuhn dan Van Der Tuuk kedaerah pedalaman. Mereka terutama mengadakan penelitian terhadap suku bangsa Batak, sedangkan usaha penginjilan masih belum dapat terlaksana.

Baru pada tahun 1864, Zending Jerman R.M.G. (Rheinischen Mission Gesellschaft) yang baru saja mengalami kesulitan akibat perang Banjar di Kalimantan tahun 1859, mengirimkan Pendeta Nommensen untuk mulai bekerja di Tanah Batak. Keberhasilan Nommensen dalam mengadakan pendekatan kepada orang Batak telah memulai babakan baru kehidupan kerokhanian dan kebudayaan orang Batak. Pengkristenan Tanah Batak dimulai dari daerah Silindung.

2). Masyarakat Batak yang kuat dan berkepribadian itu menganggap adat dan agama atau kehidupan kerokhanian sebagai suatu kesatuan yang di-

junjung tinggi, dimana hukum keluarga dan keturunan menguasai segalanya dan pemujaan pada arwah nenek moyang merupakan pusat perhatiannya. (28) Agama Batak sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi dengan adanya seorang pencipta (Mulajadi Na Bolon) yang kemudian membentuk wakil-wakilnya dalam bentuk Debata Na Tolu, (29) yang merupakan hasil pengaruh dari Agama Hindu terutama pemerina nama kepada dewa-dewa Bata Guru, Soripada dan Mangalabulan.

Ketiga dewa ini mewakili kelompok masyarakat Dalihan na Tolu, sehingga dapat dikatakan bahwa orang-orang Batak menganggap bahwa mereka adalah manifestasi Debata tertinggi dan adat, yang mengatur setiap orang dan masyarakatnya untuk menjaga keseimbangan dunia kehidupannya (30) Sehingga kepercayaan pada Debata Mulajadi Na Bolon timbul karena adanya keyakinan bahwa mereka membutuhkan suatu aturan tata tertib dunia. Setiap pelanggaran akan tata tertib itu akan menimbulkan suatu hukuman baik langsung atau tidak langsung, kepada seseorang atau pada lingkungan masyarakat tertentu.

Bagaimana orang Batak menerima Triniti (Ke Tiga Yang Esa) sebagai pengganti Debata Na Tolu. Perbedaan tugas (fungsi) Debata Na Tolu tidak pernah jelas dalam agama Batak, kecuali mereka melambangkan fungsi dan tugas salah satu kelompok dari sistem Dalihan Na Tolu. Hubungan Debata Na Tolu ini dengan manusia, karena Mulajadi na Bolon kemudian lebih merupakan Sang Pencipta yang melihat dari atas tanpa perlu berbuat banyak. Karena seperti dikatakan diatas orang Batak menganggap dirinya sendiri sebagai manifestasi Debata tertinggi dan adat, jadi apapun yang terjadi atas diri atau masyarakatnya, secara keseluruhannya merupakan hasil dari tindakan mereka sendiri. Pemikiran mereka yang secara total meleburkan segala sesuatu baik kebaikan atau keburukan, ketunggalan atau kejamahan, kehidupan dan kematian dan lain-lain dalam kesatuan atau kesamaan yang tidak dipertentangkan. (31)

Kepercayaan ini berlawanan dengan ke-Kristenan yang mengajarkan bahwa Allah merupakan tempat pengharapan umat manusia dan Triniti masing-masing merupakan Allah sendiri yang Esa yang membagi fungsinya untuk memudahkan mengadakan hubungan dengan manusia. (32)

Tetapi pada awal pekerjaannya para missionaris tidak memaksakan untuk merubah pemikiran mereka, yang ditutamakan adalah supaya mereka mau lebih dahulu menerima adanya persamaan kepercayaan terhadap Allah dan Triniti dan kepercayaan terhadap Debata Mulajadi na Bolon dan Debata na Tolu.

Dengan mengadakan pendekatan secara demikian para missionaris mengharapkan bahwa secara bertahap mereka dapat mempengaruhi cara berpikir orang Batak. Terutama karena adanya pendidikan yang diberikan kepada beberapa orang Batak yang diharapkan akan menjadi kader dalam menghadapi orang-orang Batak yang masih utuh berpegang kepada kepercayaannya.

Dengan demikian pada awalnya hampir sulit untuk mengatakan apakah agama Batak yang menyelundup dalam agama Kristen atau sebaliknya.

3). Nommensen. Nama ini tidak boleh dilepaskan dari hidup ke Kristen-an orang Batak. Karena boleh dikatakan bahwa Pendeta Nommensen merupakan pembuka jalan kearah itu. Dan ia berhasil dalam tugas yang dibebankan kepadanya.

Hanya dalam waktu 6 tahun setelah memasuki pedalaman Tanah Batak, ia telah sanggup menerima kedatangan Gubernur Arriens sebagai, Gubernur Sumatra's West Kust datang ke Tarutung untuk melihat kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dan juga untuk mencari kemungkinan untuk memulai memasuki daerah tersebut. Nommensen mengadakan pendekatan dengan memperlihatkan lebih dahulu sifat-sifat orang Batak. Ia menggunakan segala macam cara dari mulai tindakan lemah lembut dan memberikan pertolongan dalam obat-obatan, sampai kepada ancaman dan paksaan terhadap pemuka-pemuka daerah Silindung termasuk keempat orang wakil raja Sisingamangaradja, (33) Untuk daerah Silindung untuk menyetujui kehadirannya dan segala tindakannya di daerah tersebut.

Di Tarutunglah ia memulai mendirikan tempat dimana ia mulai membentuk bentuk orang-orang Batak Kristen dan memperkenalkan pengetahuan-pengetahuan Barat. Boleh dikatakan bahwa hasil yang dicapainya cukup memadai sehingga ia segera memerlukan seorang pendeta lain yang dapat membantu pekerjaannya yang kian menumpuk.

Kemudian ia dibantu oleh Pendeta Johansen. Bersama-sama mereka mendirikan "Sekolah berjalan", yang kemudian menghasilkan guru-guru Injil orang Batak asli yang dapat ditugaskan untuk mempengaruhi orang-orang Batak lainnya. (34) Cara ini kelihatannya lebih berhasil untuk mengkristenkan orang-orang Batak, tetapi juga menimbulkan perpecahan dalam alam pikiran orang Batak yang telah menjadi Kristen itu. Terutama jika timbul persoalan dalam adat, maka di Batak yang telah Kristen itu harus memilih mengikuti ajaran Kristen yang melarang melakukan penyembahan arwah nenek moyang dan berhala atau ikut memenuhi acara agama lamanya supaya tidak dikucilkan dari masyarakat dan terutama keluarganya yang masih belum jadi Kristen.

Karena upacara keagamaan dan adat selalu menarik maka sering ada orang Kristen yang kembali mengikuti upacara penyembahan arwah nenek moyangnya. (35)

Dalam perjalanan zaman, Agama Kristen mulai sedikit demi sedikit dapat menyisihkan agama Batak asli, tetapi karena kaum Missionaris tidak menebas habis seluruh adat dan kebudayaan Batak, maka sampai sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan orang Batak, hubabatahan itu yaitu sikap hidup untuk masih menjalankan tradisi lama, baik dalam hidup bersosial masyarakat dan dalam hidup kekristenan, tetapi masih dipertahankan. Hal ini terlihat dari Upacara Peringatan Hari Gugurnya Raja Sisingamangaradja XII pada tahun ini yang diorganisir oleh Gereja HKBP yang merupakan Gereja Batak yang terbesar dan pada masa awalnya merupakan musuh Sisingamangaradja.

IV. Usaha menaklukkan Tanah Batak

1). Usaha untuk merebut pengaruh atas Tanah Batak oleh orang-orang asing, sudah dimulai berabad-abad yang lalu. Sejak semula Kerajaan Aru Tua telah menjadi daerah perebutan antara penguasa Aceh dan Malaka. Demikian juga pada zaman Mojopahit pernah datang kepatal Timur pasukan Pamalayu, walaupun pengaruhnya tidak meninggalkan banyak bekas-bekas peninggalan.

Tetapi ada persangkaan bahwa orang-orang Pamalayu itu melebur diri dalam kelompok orang-orang Batak Simalungun. (36)

Kemudian orang-orang Bonjol yang bermaksud mengislamkan Tanah Batak menyerbu daerah itu sekitar tahun 1820. Memang benar mereka dapat menghancurkan daerah-daerah yang dilewatinya, tetapi mereka tidak dapat mengadakan perubahan dalam sikap hidup orang Batak. Bahkan akibat serbuan itu diantara masyarakat Batak dibentuk ikatan persatuan yang lebih erat untuk mempertahankan dirinya dari serangan-serangan luar, dalam bentuk "Perdatahian".

Selama ini usaha orang-orang Barat baik dipantai Barat dan Timur, hanya berhubungan dengan kepentingan perdagangan saja.

Orang Inggris kemudian mencoba membuat pusat perdagangan dan per singgahannya di Natal dan kemudian Tapian na Uli dekat Sibolga, (37) tetapi usaha mereka masih tetap untuk kepentingan perdagangan. Usaha lain adalah pemberian izin kepada missionaris Inggris untuk memasuki daerah pedalaman dengan maksud mengkristenkan orang Batak. Inipun tidak membawa banyak hasil.

Pemerintah Belanda setelah menerima Sumatra dari tangan Inggris, mulai mencoba memasuki daerah pedalaman Tanah Batak dengan mendirikan distrik Batta pada tahun 1883 yang merupakan bagian dari Sumatra West Kust, daerah ini meliputi pantai Barat Tanah Batak sampai ke Singke dan pada tahun 1887 mereka menduduki Angkola dan Sibolga.

Kedatangan missionaris dari Jerman pada mulanya mereka halang-halangi, walaupun tidak secara terang-terangan. Tetapi kemudian missionar is itu dipergunakan oleh Pemerintah Belanda, terutama karena melihat hasil yang dapat dicapainya.

Tujuan dua kepentingan bertemu ditanah Batak, yang merubah kehidupan orang-orang Batak. Tujuan yang bersifat Surgawi dari pihak missionaris, yang bertujuan menyelamatkan jiwa orang-orang Batak yang masih menyembah berhala dan roh orang mati untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, dan kepentingan duniaawi, dimana pemerintah Belanda ingin menjadikan Tanah Batak sebagai daerah yang berada dibawah kekuasaannya. Mereka berhasil karena tahap pertama telah lebih dahulu dimenangkan oleh kaum missionaris.

2). Sebelum kaum missionaris Jerman datang ke Tanah Batak, beberapa orang penginjil Belanda dari Ermelo yaitu Pendeta Van Dalen, Koster, Van Asselt dan Dammerboer datang dan mendapat izin untuk bekerja di daerah selatan yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Tetapi usaha mereka tidak berkembang karena kekurangan biaya, sehingga akhirnya mereka terpaksa meninggalkan organisasinya dan masuk ke organisasi penginjilan di Sumatra dan di Jawa. Walaupun mereka mengalami kegagalan dalam pekerjaannya, mereka memberi bantuan yang besar terhadap pekerjaan Nommensen, yang diberi tugas untuk mengkristenkan orang-orang Batak di Prausorat. Tetapi Nommensen lebih tertarik pada daerah Silindung yang masih merupakan daerah Batak yang merdeka. Walaupun mendapat banyak tantangan baik dari kawan-kawannya maupun dari Pemerintah Belanda. Nommensen pergi juga ke Silindung dan hasil yang dicapainya cukup memadai, karena pada tahun 1868 jumlah orang Kristen di Silindung sudah mencapai 600 (enam ratus) orang dan seorang diantaranya merupakan

salah seorang Batak yang terkemuka yaitu Raja Pontas Lumban Tobing.

Tetapi permusuhan antara orang Batak tetap terjadi sehingga orang-orang Batak Kristen harus melayaninya. Kejadian ini menimbulkan satu kesalahan kaum missionaris. Kesalahan yang dibuat oleh missionaris Johansen dan Nommensen adalah menanyakan kepada residen di Sibolga apakah daerah Silindung boleh mengharapkan perlindungan di Pemerintah Belanda. Untunglah pada saat itu residen Sibolga tidak menaruh perhatian terhadap pekerjaan missionaris ini, sehingga kesalahan ini tidak berlarut-larut. (38) Karena sebenarnya daerah Silindung merupakan daerah dibawah pengaruh Raja Sisingamangaradja yang telah mengangkat **Raja na Opat** sebagai wakilnya.

Pada bulan Desember 1868, Gubernur Sumatra's West Kust, Arriens dapat dengan tenang datang ke Silindung bahkan diterima dengan baik oleh orang-orang Batak, terutama yang sudah Kristen.

Walaupun sikap dari orang Batak yang belum Kristen masih tetap memperlihatkan sikap bermusuhan.

Arriens menyatakan gencatan senjata selama 6 bulan menunggu kedatangannya kembali, dan selama keamanan di Silindung agak terjamin orang-orang Batak Kristen berusaha menarik saudara-saudara yang lain untuk mengikuti kepercayaannya.

Kedatangan Gubernur Arriens menimbulkan kegelisahan diderah Toba, ditambah lagi dengan usaha missionaris untuk memasuki daerah Toba. Nommensen berusaha mendekati raja Sisingamangaradja tetapi pendekatan ini tidak berhasil karena ia mendekati raja-raja yang lain, dengan mengadakan percakapan yang langsung ia dapat menanamkan simpati raja-raja tersebut. (39) Kemudian ia memindahkan pekerjaannya ke Bahal Batu di daerah Toba.

Pemasukan daerah Silindung langsung dibawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda dan ditempatkannya seorang kontroler di Tarutung menimbulkan kemarahan orang-orang Batak dan pengikut Sisingamangaradja sehingga menimbulkan kembali keributan di daerah Toba pada tahun 1883.(40)

Perlawanan Sisingamangaradja ke XII yang dimulai tahun 1877 membuka kesempatan bagi Pemerintah Belanda untuk ikut campur tangan dengan alasan demi keselamatan para missionaris. (41)

Setelah demi setelah daerah Batak dimasukkan kedaerah kekuasaan Belanda, sementara perang Sisingamangaradja tetap berlangsung hingga tewasnya Raja tersebut pada tanggal 17 Juni 1907.

Dengan berakhirnya perang 30 tahun perang Sisingamangaradja, terlah bahwa masa silam orang Batak telah berakhir, dan mulai masa baru yang harus dirintis. Meskipun proses integrasi itu penuh dengan selangan perlawanan dan protes. (42)

3). Adanya kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan yang memungkinkan untuk mendapatkan kekuasaan merupakan faktor utama yang menarik bagi orang Batak untuk menerima kekristenan.

Karena dengan adanya kekuasaan yang dapat dihubungi dengan kata "hasangapon" (kemuliaan atau prestige) dalam kehidupan orang Batak, maka mereka dapat merasakan timbulnya harga diri yang tinggi. (43)

Karena dengan adanya kekuasaan, maka **Sahala Tondinya** akan naik dan

dengan sendirinya **tondi** nenek moyangnya akan mendapat penghargaan sebagai **tondi na mertua** karena mempunyai turunan yang hebat. Disamping itu pengertian tentang pendidikan bagi orang Batak dihubungkan dengan kata **hamajuan/kemajuan**, merupakan suatu dorongan bagi orang Batak. Karena Agama Kristen mengajarkan persamaan semua orang "dihadapan Allah", memberi suatu kepercayaan pada orang Batak bahwa mereka sama berharga nya, sama mampunya dengan orang lain, termasuk orang Eropah.

Hal itu menimbulkan tumbuhnya rasa harga diri, dan setiap perubahan mudah diterima sebagai suatu usaha kemajuan. Walaupun akhirnya sering ditemukan keadaan Gereja tidak selalu dapat menjawab kemajuan yang berlangsung diluar Gereja.

V. Kesimpulan.

1. Pengkristenan orang Batak yang diusahakan untuk merubah kepercayaan kepada Allah, sampai sekarang masih diperlihatkan adanya lubang-lubang akibat masih kuatnya tradisi agama dan adat orang Batak, dan tidak tegasnya kaum missionaris dalam menghapuskan kepercayaan dan adat asli.
2. Pengkristenan Tanah Batak, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Hindia Belanda, setelah menerima jalan masuk kearah penguasa terhadap orang Batak lewat kesempatan yang dibuka oleh kaum missionaris.
3. Pengkristenan Orang Batak, menambah kesadaran pada orang Batak bahwa mereka sama nilai dan haknya dengan orang lain. Hal ini sering menimbulkan kerugian karena penghargaan terhadap struktur pemerintahan yang lama berkurang, dan tiap orang merasa punya hak untuk duduk pada tempat pimpinan walaupun kemungkinan tidak banyak orang menyentujunya.

Catatan :

1. Contoh : Pustaka keluarga Sisingamangaradja, yang menurut keluarga Si singamangaradja ditulis pada masa Sisingamangaradja ke XI, setelah serangan Bonjol, terdiri dari 24 jilid, memuat hampir semua peristiwa penting dari sejarah Batak dimulai dengan riwayat Tapi Donda auasan sampai serbuan Bonjol dan Sisingamangaradja X.
2. Salah satu contoh adalah "Tarombo Borbor-Morsada" yang ditulis oleh Mangaradja Salomo (dalam bahasa Batak).
3. T. Luckman Sinar SH, Sk. Waspada, Medan, tgl. 8 s/d 10 April 1977.
4. Terdapatnya relief-relief dan benda-benda purba pada runtuhannya candi di Sitopaja (gunung tua), yang menonjolkan pengaruh kebudayaan Batak dan makin hilangnya pemujaan pada Candi Hindu di Padang Lawas setelah abad ke-12.
5. N. Siahaan "Sejarah Kebudayaan Batak" tahl 59 - 60.
6. Dagh Register Casteel Van Batavia, tahun 1697.
Sebelumnya orang Portugis antara tahun 1537 - 1551 berusaha bersekutu dengan orang Batak untuk menyerang Aceh. Sedangkan orang Belanda telah memperoleh persetujuan dagangnya dengan beberapa raja Batak pada tahun 1694. Walaupun hanya dapat tinggal dipantai saja, Paul B. Pe dersen, Darah Batak dan hal 16.
7. T. Luckman Sinar SH, " Sari Sejarah Serdang ", jilid I hal 24, W.J. Marsden "The History of Sumatra" hal. 378.....
A. Pinto di Franca "Portuguese Influence in Indonesia" hal 12. Lihat juga John Andersen, "Mission to the East Coast of Sumatra in 1823" hal 324 - 325.
8. Lihat denah Huta Batak dalam buku Ypes " Bydragen tot de Kennis Van ", 1932.
9. Menurut Batara Sangti dalam bukunya "Sejarah Batak" 1978, setelah kerajaan Haru Tua yang berpusat di muara sungai Wampu (langkat) diserang orang Aceh yang bermaksud mengislamkan daerah itu, orang-orang Batak segera mengundurkan diri lebih kepedalaman sehingga akhirnya sampai di Gunung Pusuk Bukit di tepi Danau Toba dan mendirikan Sianjur mula mula sebagai tempat asal mengembangkan orang-orang Batak dalam berbagai marga marga boru, dan menurunkan kerajaan Batak yang baru dalam tangan dinasti Sisingamangaradja.
10. Salomon Mangaraja Pasaribu, " Memilih dan Mengangkat Radja di Tanah Batak menurut adat Asli ", 1938 hal 8; Walaupun ada persangkaan bahwa pada mulanya memakai adat maternal. Lihat Mangaraja Salomon Pasaribu hal 8 dan W. Hutagalung hal 72 - 73.
11. Inti masyarakat Batak berdasarkan garis Patriniaal, Ypes hal. 3 Walau pun dalam Mythologi Batak pada mulanya dikatakan bahwa adat maternal yang berlaku yang kemudian dicoba mengadakan perubahan ke adat paternal, lihat Mangaradja Salomon Pasaribu, Tarombo Borbor Morsada hal 8 dan W. Hutagalung " Adat Pardongan Saripean Ni..... ", hal 71 - 73.
12. Perserikatan desa berupa Horja untuk upacara adat
Perserikatan desa berupa Bius untuk upacara keagamaan

Persatahian dan Sapartutupan merupakan perserikatan desa dalam keadaan perang.

13. Paul B. Pedersen, "Darah Batak" hal 41.
14. Sebenarnya Raja Sisingamangaradja juga merupakan Raja Parbaringin, hanya karena kharismanya yang lebih besar maka kekuasaannya daerah-daerah lain yang jauh diluar perbiusannya. Sehingga walaupun tidak ada usaha untuk kenaikan dirinya, dengan sendirinya raja-raja Parbaringin yang lain mengakui kelebihannya.

Setelah melalui upacara pengangkatan Raja Sisingamangaradja dengan upacara penarikan Piso gajah Dumpak dan penyembelihan Kuda-Silantom.

15. Hal ini terlihat dalam sikap hidup orang Batak sehari-harinya, sebagai contoh seorang menantu pria tidak boleh berhandai-handai dengan bebas dengan mertua wanitanya, atau sebaliknya menantu wanita tidak boleh terlalu bebas dengan mertua pria. Demikian juga hubungan antara saudara ipar ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mencegah terjadinya penyelewengan penyelewengan.

Hal ini terbukti diakui, terlihat dalam perkara Tuhan Djintar Raja Tanah Djawa, Simalungun, Tzg. ag. 36001 / 19.

16. W. Hutagalung, "Tarombo.....", 1926 hal. 12; Ypes, "Bydragen tot de Kennis Van.....", hal. 11, 74.

17. Washington Hutagalung, " Tarombo Marga ni Suku Batak ", hal. 31.

18. Incest yang terjadi antara salah seorang mojang orang Batak Tuan Saribu raja dengan saudara kandungnya Siboru Pareme dan antara Siboru Pare me dengan putranya Siraja Lontung. Walaupun peristiwa itu terjadi m-nurut mythologi, tetapi berakibat panjang hingga saat ini yaitu terjadinya 2 blok dalam marga yang seketurunan yaitu antara keturunan Borbor Mor sada dengan keturunan Siraja Lontung. Lihat Batara Sangti " Sejarah Batak " 1979, hal. 15.

19. Wasinton Hutagalung, " Tarombo Marga di Halak Batak " hal. 34.

20. Orang Batak lebih menyukai menyebut Sisingamangaradja memiliki ke-saktian yang hebat, juga ia merupakan raja yang alim dan bijaksana di atas orang lain (disembah sebagai orang yang " pituhali malim pitu hali solam ").

21. Adriel L. Tobing, " Sejarah Sisingamangaradja ", 1959, hal. 10. Batara Sangti " Sejarah Batak ", 1979, hal. 22, tentang kerajaan Haru dan Sori mangaraja, bandingkan dengan T. Luckman Sinar dan Moh. Said:

22. Batara Sangti, O.C. hal. 293 - 294, Marsden dalam "History of Sumatra" menyebut adanya Datu Besar, hal. 376.

23. Butknya dalam hal pembagian jambar (jambar = pembagian bagian anggota badan hewan persembahan menurut hak tiap-tiap orang dalam adat) harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan disini fungsi Si Raja Adat sangat berguna, karena hanya karena sepotong daging dapat menimbulkan permusuhan bukan karena nilai dagingnya tetapi karena nilai haknya.

24. Ada dua contoh yang dapat diberikan mengenai hal ini :

1. Adanya adat " Mangan indahan na las " untuk merundingkan sebuah perselisihan, dan jika adat ini sudah dijalankan maka segala sesuatu sudah menjadi beres, walaupun sebelumnya telah memakan korban jiwa.

2. Adat " Manompas bongbong ", kesediaan untuk menerima seorang yang telah melakukan Sumbang (incert), dengan cara membentuk marga baru. Artinya pelaku Sumbang harus keluar dari marga nya dan membentuk marga baru cabang marga asalnya, tetapi dengan pembayaran adat yang sangat berat/mahal.
25. Mula-mula dengan mendirikan "Batta distrik" pada tahun 1833, dibawah Pemerintah Militer, pada tahun 1837 diganti dengan Pemerintah Sipil, menjadi karesidenan Air Bangis yang berada di bawah Gouverneur Van Sumatra's Westkust beribukota di Sibolga.
26. Kegagalan terutama karena pada saat itu sedang berjangkit penyakit malaria, sebagai akibat penyerbuan pasukan Bonjol yang membumi hanguskan daerah Batak yang berakibat kemiskinan dan penyakit.
27. Lihat catatan 25 ; Van der Tuuk pernah memberi nasihat untuk tidak memulai pengkristenan dari selatan, karena pengaruh Islam sudah kuat di sana. Pedersen, hal. 22.
28. Karena orang Batak percaya adanya Tondi = zat berjiwa yang bergabung dengan Debata Mulajadi na Bolon, karena itu merawat Tondi sama saja dengan merawat Debata, Pedersen, hal. 23 - 25, J.C. Vergouwen, " The Social Organization" hal. 81.
29. Lihat catatan 16, Marsden, hal. 385.
30. Paul B. Pedersen, " Darah Batak "" hal. 19 - 20, Lumban Tobing "The High God Belief of" hal. 21, lihat Batara Sangti " Sejarah Batak " hal. 280 - 283.
31. Lumban Tobing op.cit, hal 132 - 133.
32. Sepuluh Hukum Agam Kristen.
33. Keempat raja tersebut adalah Raja na Opat yang berfungsi sebagai Raja Parbarin untuk daerah Silindung. Gelar mereka adalah Raja Bagot Sinta, Raja Baginda Mulana, Raja Illa Muda dan Raja Rangkeutua, be Jet Nommensen hal. 58.
34. Dalam awal pekerjaannya cara Nommensen Cs. mengkristenkan orang Batak dengan melalui penginjilan pribadi, dan tiap-tiap pribadi disiapkan untuk mengkristenkan orang lain dengan melalui "Sekolah berjalan" itu. J.T. Nommensen, opcit, hal. 121 - 123.
35. J.T. Nommensen, opcit, hal. 75 - 76, 106 - 107.
36. Batara Sangti, opcit, hal 146.
37. Marsden, opcit, hal. 373.
38. Karena daerah Silindung merupakan daerah kekuasaan Si Raja na Opat yaitu wakil-wakil Sisingamangaradja sebagai pejabat Raja Parbarin. Sehingga jika Belanda datang ikut campur, dapat menghapuskan kepercayaan orang-orang Batak yang sudah menerima Nommensen Cs.
39. Tetapi kekuasaan dan pengaruh Sisingamangaradja terlalu besar sehingga raja-raja itu tidak berani terlalu banyak membantunya. Raja Huskan dari Pulau Bandang adalah salah seorang diantaranya raja-raja itu.
40. S.K. Gubernur Sumatra's West Kust di Padang 16 Januari 1981, no. 2.
41. Nommensen yang khawatir melihat campur tangan Belanda mengajukan perundingan, tetapi gagal karena kecurangan pihak Belanda. Lihat Reini sche Mission Gesselschaf, 1878K, hal. 367 ; Alg. Verslag SWK. 1877.

42. Hal ini terlihat dari banyaknya protes-protes terhadap pengangkatan-pengangkatan pimpinan baru pribumi, perlawanannya dari sekte-sekte yang ingin mengembalikan keadaan sebelum datangnya orang Eropa, ag. Feb 13 - 160, ag. 160/22 geh. fol. 1757 A, dll.
43. Pedersen, opcit.
44. Paul B. Pedersen, hal. 88

-00o-

DAFTAR BACAAN

- I. Arsip :
- Ag.april 1 no. 10581 thn. 1924 - Mengenai keberatan keberatan terhadap pemilihan Kepala Desa.
 - Ag.april 2 no. 13864
 - Ag.april 7 no. 11233
 - Ag.juni 17 no. 22328
 - Ag.juli 7 no. 21052
 - BGS 24/9-07 no. 317 Geh. Mengenai Raja Berempat di Karo.
 - Ag.Feb. 13-160 Mengenai Parmalim di Oeluan Toba.
 - Ag.Feb. 13-160 Mengenai Parmalim di Oeluan Toba.
 - TZG.ag. 36001/19 Proses Verbaal Raja Tanah Djawa.
 - BGS 24/9-07-317 Geh. Mengenai Perbatasan Daerah Serdang, Badagai, di Sum. Timur.
 - Bt. 25/2-1891-6 Mengenai pemberian bintang pada orang orang tang telah berjasa dalam peperangan melawan Sisingamangaradja.
- II. Surat Kabar :
- Sinar Indonesia Baru (Medan) 8/1/77
 - Harian Waspada (Medan) 28/4/73
 - 8 s/d 10 april 77.
- III. Buku-buku :
1. Adil, Haji Buyong : **Sejarah Johor**, K.L. 1971
 2. Anderson, John : **Mission to the East Coast of Sumatra in 1823**, 1971.
 3. do Franca, A. Pinto : **Portuguese Influence in Indonesia**, Jakarta, 1970
 4. Hutagalung, Wasington : **Tarombo Marga ni Suku Batak**, Medan, 1971.
 5. Hutagalung, W.H. : **Pustaka Taringot tu Tarombo Bangso Batak**, 1926
 6. Kohler, H.J. : **Habinsaran**, 1926
 7. Kruyt, A.C. : **Kaluar dari Agama Suku Masuk ke Agama Kristen** (terjemahan dari : Van Heiden tot Christen), Jakarta 1976.
 8. Lumbantobing, Dr.Ph.O : **The Structure of the Toba Batak Belief in the High God**, 1963.
 9. Marsden, W : **The History of Sumatra**, London, 1975.
 10. Nommensen, J.T. : Ompu i Dr. Ingwer Ludwig Nommensen (terjemah an), Jakarta, 1974.
 11. Parlindungan, M.O. Tuanku Rao, 1964.
 12. Pedersen, Paul B. : **Darah Batak dan Jiwa Protestan**, Perkembangan Gereja-gereja Batak di Sumatra Utara (Batak Blood and Protestant Soul), Jakarta, 1975.
 13. Pasaribum, Mangaradja Salomo : **Tarombo Borbor Marsada**, Balige, 1937, ".....": **Memilih dan Mengangkat Raja di Tanah Batak Menurut Adat Asli**, 1938.
 14. Radjab Mohammad, **Perang Padri**, 1954.
 15. Said Mohammad, **Atjeh Sepanjang Abad**, 1961.
 16. Siahaan BA, N : **Sejarah Kebudayaan Batak**, 1954.
 17. Sinar SH, Tengku Luckman, **Sari Sedjarah Serdang**, 1971.
 18. Tobing, Adniel L : **Sejarah Sisingamangaradja**, 1959.
 19. Vergouwen, J.C.: **Sejarah Organization and Customary Law of the Toba Batak of Northern Sumatra**, The Hague, 1964.
 20. Ypes, WKH : **Bijdragen tot de Kennis van Stamverwantschap, en het Groundrecht der Toba en Dalribataks**, 1932.

PENDAHULUAN

Apabila kita mempelajari sumbe-sumber sejarah primer berupa dokumen-dokumen India Belanda di Arsip Nasional R.I. Jakarta, khususnya apa yang dinamakan "Arsip Ambon", maka nampak bahwa ada sejumlah gerakan dan perlawanan terhadap penjajahan yang jarang sekali diungkapkan dalam buku-buku sejarah. Salah satu diantaranya adalah gerakan Raja Jailolo, seorang tokoh yang kini telah menjadi legendaris dan tersimpan dalam cerita cerita rakyat terutama di Tidore. Beberapa buah catatan dari pada misionaris dan pejabat India-Belanda di Maluku Utara mengaitkan gerakan itu dengan kurusuhan, gerakan ratuadil, dan lain-lainnya yang sering menimbulkan kesan yang menakutkan maupun mengagumkan serta tidak jarang membingungkan. Dari catatan-catatan itu kita bisa membedakan lima tokoh yang menggunakan gelar Raja Jailolo, yaitu (1) Raja Jailolo I atau Sangaji Tahani, (2) Raja Jailolo II atau Muhammad Asgar, (3) Raja Jailolo III atau Kalim Mangoffa, (4) Raja Jailolo IV atau Danu Baba Hassan, dan (5) Raja Jailolo yang mengadakan perlawanan pada tahun 1914.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, secara sepintas lalu kita bisa mengatakan bahwa Raja Jailolo I, II, III, dan ke IV adalah seketurunan. Belum bisa dipastikan keadaan Raja Jailolo 1914. Sangaji Tahani memegang gelar itu antara 1793-1810, kemudian menyusul Mohammad Asgar pada tahun 1811 dan kemudian, dengan gelar "Sultan Seram" antara 1826-1832. Kalim Mangoffa memegang gelar itu antara 1812-1825. Kedua tokoh yang disebut terakhir ini adalah putra-putra dari Sangaji Tahani alias Raja Jailolo I, sedangkan Danu Baba Hassan, yang mengadakan perlawanan pada tahun 1876, adalah cucu dari Raja Jailolo I tersebut. Tentang Raja Jailolo tsb. kita samasekali tidak mempunyai keterangan yang jelas kecuali catatan-catatan tersebut diatas.

Dibawah ini akan dibentangkan peranan Raja Jailolo II dan III. Bahannya yang digunakan di dalam makalah ini berasal dari Arsip Nasional R.I. Jakarta, khususnya "Arsip Ambon". Selain itu juga digunakan "Arsip Alemeene Secretarie" (semacam Sekneg). Tetapi patut disayangkan bahwa "Arsip Ternate" yang banyak digunakan oleh E. Katoppo antara lain untuk mengemukakan peranan Raja Jailolo I (Sangaji Tahani dari pulau Makian) tidak dapat digunakan dalam makalah ini karena kurangnya waktu untuk research. 3

Dalam makalah ini gerakan Raja Jailolo akan disoroti dari pelbagai segi. Faktor-faktor sosial budaya yang memungkinkan munculnya gerakan ini sudah barang tentu perlu dikemukakan di samping usaha-usaha pihak India Belanda untuk mengatasi gerakan-gerakan tersebut yang diikuti dengan perlawanan-perlawanan. Dengan demikian di usahakan untuk mengemukakan gerakan ini sesuai sudut penglihatan Raja Jailolo, sekalipun sumber-sumber primer yang digunakan untuk itu berasal dari pihak India-Belanda.

BAJAK – LAUT

Sudah sejak abad ke-18 muncul gejala-gejala dalam sejarah Indonesia yang oleh para sejarawan dinamakan sebagai gejala bajak laut. Hal ini juga berlaku di Maluku. Khususnya orang-orang Tobelo dan Galela dari wilayah kerajaan Ternate di Maluku Utara (pulau Halmahera) merupakan pihak yang paling banyak dituduh dalam hal ini. Apa sebabnya keadaan ini terjadi khususnya di Maluku belum diketahui dengan pasti karena kurangnya penelitian. Nampaknya tidak jarang terjadi bahwa kegiatan bajak laut Tobelo dan Galela ini terjalin juga dengan gerakan-gerakan bajak laut yang berpusat di Mindanao. Selain itu tidak jarang pula terjadi pembauran gerakan dengan apa yang dinamakan orang-orang "Papua" yang mendiami kepulauan Raja Ampat.

Sampai abad ke-19 dokumen-dokumen India Belanda mengenai Maluku Utara dan Maluku Tengah penuh dengan laporan-laporan, surat-surat, dan keterangan-keterangan lainnya dari para pejabat Belanda mengenai Maluku Utara dan Maluku Tengah penuh dengan laporan-laporan, surat-surat, dan keterangan-keterangan lainnya dari para pejabat Belanda mengenai kegiatan bajak-laut. Tidak ada pulau di Maluku Tengah yang jelas dari bahaya ini. Senantiasa kita lihat adanya "raids" yang dilakukan oleh pihak bajak-laut kenegeri-kenegeri (desa) yang terpencil untuk mengambil penduduk atau hartanya. Pihak pemerintah sudah barang tentu tidak tinggal diam dan selalu berusaha untuk mengembalikan "warganya" yang dilarikan itu. Tetapi seberapa banyak usaha itu tidak berhasil belum pernah di lapor kan.

Bahaya bajak-laut sedemikian besarnya sehingga sejak abad ke-18 ekspedisi-ekspedisi hongi ("hongitochten") yang dalam abad ke-17 khusus dikerahkan untuk mencegah penyelundupan dari Makasar, telah dialihkan untuk mengawasi bajak-laut. Dan ketika ekspedisi hongi juga dihapuskan pada tahun 1824, maka sebagai gantinya masih juga dikerahkan perahu-perahu penduduk untuk melayari wilayah sekitarnya dengan maksud mencegah bajak-laut. Setiap tahun, terutama dimusim panen cengkeh, gubernur di India-Belanda di Ambon memerintahkan para Asisten Residennya di Hila dan di Saparua untuk mengerahkan arombay 6 untuk melakukan pengawalan di sekitar karesidenan masing-masing. Perahu-perahu yang biasanya digunakan untuk mengangkut manusia dan barang tersebut, untuk kesempatan itu dipersenjatai oleh Belanda. Para pemuda yang diharuskan mengikuti patroli ini juga dipersenjatai. Selain itu setiap arombay juga dilengkapi dengan sejumlah parajurit.

Sebetulnya apabila dikatakan bahwa ekspedisi-ekspedisi arombay itu khusus ditujukan kepada bajak-laut juga tidak tepat. Sebab di samping kegiatan bajak-laut yang berupa "raids" terhadap desa-desa terpencil atau terhadap perahu-perahu dagang, tidak jarang perahu-perahu bajak-laut juga mengadakan penyelundupan.

Tujuannya sudah barang tentu cengkeh yang sedang dipanen.

Tidaklah mudah untuk membedakan kegiatan perdagangan biasa dengan kegiatan bajak-laut. Dalam keadaan tertentu para bajak-laut bisa bersalin sebagai pedagang biasa. Dari dokumen-dokumen mengenai Raja Jailolo I (Mohammad Asgar) bisa ditarik kesimpulan bahwa tokoh ini juga menjadi kapitalis yang menyediakan modal bagi penduduk daerahnya. Tidak jarang

pula para pejabat kerajaannya serta kepala-kepala suku yang berada dibawah kekuasaannya mengadakan perdagangan 7 Daerah perdagangan mereka terutama adalah kepulauan Raja Ampat, kepulauan Seram-laut dan Gorong, serta negeri-negeri di Seram Timur

Selain itu para pedagang dari pelbagai tempat di Nusantara tidak jarang mendatangi wilayah yang menjadi pusat kegiatan bajak laut dari Tobelo dan Galela itu. Hal ini sudah barang tentang ada sebabnya. Perairan antara Halmahera (termasuk Ternate dan Tidore) dan kepulauan Ambon-Uliase (yang terdiri dari pulau-pulau Ambon, Haruku, Saparua, dan Nusa laut yang menghasilkan cengkeh dalam abad ke-18 dan ke-19) termasuk wilayah yang sedikit banyaknya bebas. Pihak India Belanda tidak mempunyai kemampuan untuk mengawasinya. Malah Seram Timur bagian Utara sampai masa Raja Jailolo II dan III belum pernah dikunjungi pejabat maupun prajurit Belanda. Di wilayah inilah perdagangan merupakan kegiatan utama. Negeri-negeri di Seram Timur bagian Utara banyak yang didiami imigran dari Makasar Umpamanya. Ini diketahui karena bentuk-bentuk perumahan yang dijumpai di tempat-tempat itu.⁸ Selain itu banyak desa-desa yang melakukan pertanian. Beras Umpamanya merupakan suatu hasil ekspor dari Maloan, suatu wilayah di sekitar Saway Sugah tentu sagu merupakan suatu bahan eksport pula. Kegiatan perdagangan ini sudah dilukiskan dengan agak memuaskan oleh Broersma.⁹

Menurut Broersma kegiatan perdagangan di pantai Utara Seraman Timur sampai ke kepulauan Raja Ampat itu bermuarake kepulauan Kei dan Aru yang terkenal karena pembuatan arombay serta hasil laut seperti kerang, teripang, mutiara. Cabang lainnya adalah kepulauan yang terletak di sekitar Sulawesi bagian Selatan dan Timur. Dari kepulauan Banggai, Umpamanya, banyak didatangkan alat-alat dari besi pisau dan parang. Selain itu terdapat pula cabang ke Nusatenggara Barat. Menurut suatu penyelidikan yang dilakukan oleh seorang pedagang atas permintaan Gubernur Maluku pada tahun 1826, para pedagang ini berasal dari "Bali-Buleleng, Sangsetsic/Patamun(?), Badung-Padang, dan Bali-Sasak, Teluk Dalam, Lombok dan Sumbawa, Labuhan Buwana, Bunuhra dan Bokes dan Butun dan Mangaer".¹⁰ Menurut laporan tersebut cukongdi Bali-Buleleng adalah seorang Bugis yang bernama Matuwa, di Badung-Padang seorang yang bernama Bandar, di Teluk Dalam seorang yang bernama Kapitan Parypary, dan di Labuh Buwana seorang yang bernama Kapitan Tumena. Selain itu di Sumenep ((Madura) ada seorang Bugis yang bernama Haji Seh Said Malayuw yang setiap tahunnya berdagang ke Seram Utara. Para pedagang tersebut membawa beras, benang, tembakau, garam, "Obat pasang dan senapang", lela 11 dari tembaga dan madat.

Bahwa perdagangan di Maluku berkisar di sekitar perairan antara Halmahera dan Seram Utara bisa di mengerti. Sudah sejak pertengahan abad ke-17 VOC melarang para pedagang asing (dari nusanatara maupun dari tempat-tempat lainnya di Asia dan Eropa) untuk memasuki wilayah cengkeh di Maluku Tengah (pulau-pulau Ambon, Maluku, Saparua, dan Nusalaut). Di Maluku Utara terdapat larangan yang serupa pula. Pedagang pedagang tertentu yang mulai diijinkan sejak tahun 1824 hanya bisa berusaha di tempat-tempat tertentu saja seperti di kota Ambon. Seluruh kegiatan mereka diawasi secara ketat. Pergi dan datang dicatat dengan teliti dan setiap

nakhoda diharuskan memiliki surat jalan. Kapal-kapal dagang yang dijumpai di luar jalur yang sudah diijinkan selalu di tahan dan dikenakan denda. Dengan demikian wilayah yang bisa dimasuki para pedagang hanyalah tempat-tempat yang belum di jamaah oleh pemerintah India-Belanda, atau dimana peralatannya tidak bisa bekerja secara efektif seperti di perairan Hamehera-Seram Utara, kepulauan Kei-Aru, dan kepulauan Seram-laut. Terutama di Laut Seram itulah kita lihat adanya perbauran antara bajak laut dan perdagangan. Dan sudah tentu keadaan semacam ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh unsur-unsur yang secara langsung ingin menentang kekuasaan Belanda seperti Raja Jailolo.

RAJA JAILOLO

Mangoffa dan Mohammad Asgar, dua Raja Jailolo yang dibahas dalam makalah ini, adalah keturunan langsung dari Raja Jailolo I atau Sangaji Tahani. Mohammad Asgar adalah salah seorang putra dari Sangaji Tahani yang banyak berjasa dalam pertempuran-pertempuran laut di masa Sultan Nuku. Mangoffa adalah adiknya yang rupanya masih terlambat muda ketika Nuku melancarkan ekspedisi ekspedisinya melawan Ternate dan Tidore dalam akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.

Tahani adalah seorang Sangaji (bisa di samakan dengan Bupati di Jawa) dari bagian Timur pulau Makian. Di sekitar tahun 1783 ia bergabung dengan sejumlah 200 orang pengikutnya, dalam sebuah armada Nuku yang dipimpin Hukom Doy. Kemudian ia bisa diselundupkan ke Tidore yang sedang kacau akibat perlawanan sebagai salah seorang yang dipercaya Sultan Kamaludin di Tidore. Dalam waktu itu ia senantiasa mengirim berita-berita mengenai situasi Tidore kepada Nuku. Kemudian ketika Sultan Nuku mulai mencapai kemenangan-kemenangan, ia mengangkat Tahani sebagai "Raja ke-empat" di Maluku dengan nama Raja Jailolo dengan kedudukan di Halmahera. Sejak sekitar 1793 itu Tahani alias Raja Jailolo memimpin sebuah armada kora (hongi) dengan daerah operasi khususnya di sekitar Halmahera. Daerah itu harus direbutnya sendiri dari tangan Ternate maupun Tidore. Usaha ini dilakukannya dengan cukup berhasil selama peperangan yang dipimpin oleh Nuku tersebut. Ia meninggal di salah satu tempat di Halmahera pada tahun 1910. 12

Sepeninggal Tahani kedudukan sebagai Raja Jailolo dialihkan pada putranya Mohammad Asgar dengan kedudukan di Maba. Situasi bagi Mohammad Asgar memang sudah jauh lebih sulit dari pada situasi di masa Tahani. Sultan Nuku sendiri wafat tahun 1805. Perlawanan yang sedemikian gigih sejak tahun 1773 sudah patah sama sekali. Terutama sejak kembalinya Belanda di Maluku pada tahun 1817 kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore yang telah menjadi sekutunya sejak awal abad ke-17, dipulihkan. Malah sudah dalam masa pendudukan Inggeris situasi bagi Raja Jailolo II tidak begitu menyenangkan. Pada suatu ketika terjadilah pertentangan antara Asgar dan penduduk Maba sehingga timbul campur tangan Inggeris. Raja Jailolo II kemudian ditangkap dengan alasan menjadi sebab kerusuhan, dan dipenjarakan di Ambon. Ketika Belanda tiba di Ambon pada bulan Maret 1817, salah satu masalah yang mereka hadapi adalah kedudukan Mohammad Asgar karena khawatir pengaruhnya, yang rupanya masih ada di

wilayah-wilayah tertentu di Halmahera, Belanda lalu membuang Mohammad Asgar ke Semarang. 13

Seperginya Raja Jailolo II alias Mohammad Asgar, gelar tersebut dialihkan kepada saudaranya yang bernama Kalim Mangoffa. Sebenarnya masih ada beberapa orang Saudara lainnya. Tetapi dua diantaranya meninggal di Sulawesi Tenggara, dimana rupanya terdapat kegiatan bajak-laut pula. Sebagian dari wilayah itu memang di claim oleh Ternate sebagai wilayah kekuasaannya terutama Teluk Temini.

Kegiatan Kalim Mongaffa atau Raja Jailolo III tidak banyak dapat kita ketahui berdasarkan dokumen-dokumen dari "Arsip Ambon" saja. Tetapi rupanya sejak Mongaffa lah aspirasi perjuangan untuk mempertahankan kerajaan ke-4 di Maluku dikaitkan dengan kegiatan bajak-laut. Kedudukan Mongaffa mula-mula di salah satu pulau di kepulauan Raja Ampat. Tetapi pengaruhnya boleh dikatakan merata di seluruh Laut Seram. Terutama bajak-laut dan Tobelo dan Galela menjadi pengikutnya. Mongaffa juga telah berhasil membangun suatu sistem pemerintah yang merupakan kopi dari sistem yang ada di kerajaan Ternate dan Tidore. Tetapi mengenai hal ini "Arsip Ambon" juga tidak banyak bicara. Yang pasti adalah bahwa Kalim Mongaffa tidak saja menggunakan gelar Raja Jailolo, tetapi malah Sultan Jailolo. Masalah gelar sultan itu pernah menjadi heboh dimana pengangkatan sultan dan pemberian gelarnya harus dilakukan dengan sepenuhnya.

FALA RAHA (EMPAT RAJA)

Secara historis tuntutan Raja Jailolo adalah syah. Sudah sejak awal sejarah kerajaan-kerajaan di Maluku Utara ada kerajaan Jailolo. Tradisi empat kerajaan di Maluku Utara memang sudah merupakan suatu bagian dari kebudayaan setempat. Selain Ternate dan Tidore, juga terdapat kerajaan Bacan dan kerajaan Jailolo.

Malah menurut tradisi-tradisi setempat yang dikumpulkan oleh Valentijn, umpamanya, kerajaan Jailolo lah yang merupakan kerajaan utama di awal sejarah wilayah itu.¹⁴ Persaingan-persaingan antara keempat kerajaan itu merupakan bagian utama dari sejarah politik wilayah tersebut. Dalam pertengahan abad ke-16 kerajaan Jailolo yang terletak di pulau Halmahera itu bisa dipatahkan oleh kerajaan Ternate. Tetapi baru pada awal abad ke-17 kerajaan ini dihapuskan dari peta politik wilayah itu. Hal ini terjadi karena adanya kerja-sama yang erat antara kerajaan Ternate dengan pihak VOC. Pada saat itu Jailolo bersekutu dengan Tidore yang kebetulan mendapat Sepanyol - Belanda untuk menguasai daerah rempah-rempah mempunyai akibat yang tidak menyenangkan bagi Jailolo. Sejak kekalahan tersebut keturunan raja-raja Jailolo berdiam di istana Ternate. Selama beberapa generasi keturunan langsung itu masih dihargai karena terjadi perkawinan antara mereka dengan para bangsawan Ternate maupun Tidore. Tetapi menjelang abad ke-18 tidak terdengar lagi berita-berita mengenai garis keturunan ini. Tindakan Sultan Nuku untuk mengangkat Sangaji Tahani sebagai Raja Jailolo merupakan tindakan politik untuk memecah belah keturunan dari Tahani mempertahankan claim sebagai Raja Jailolo.

Sekalipun garis keturunan raja-raja Jailolo yang asli sudah tidak jelas, namun mitos mengenai empat raja di Maluku tidak pernah pudar. Malah sesungguhnya pembagian empat tersebut merupakan suatu segi yang

esensial dalam seluruh kebudayaan di Maluku secara keseluruhan. Di Maluku Utara, khususnya di Ternate, ada mitos yang mengatakan bahwa penguasa-penguasa daerah itu sebenarnya terdiri dari empat keluarga, yaitu keluarga Tomagola, keluarga Tomaitu, keluarga Marsaoli, dan keluarga Lumatau. 15 Sultan Ternate selalu dipilih dari salah satu keluarga tersebut. Kemudian dalam abad ke-16 dan ke-17 keluarga Tomagola yang terkenal saat itu sebagai laksamana atau Kapitan Laut kerajaan, berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Maluku Tengah sehingga sultan secara turun temurun menghadiahkan kedudukan "wakil sultan" di jazirah Hoamoal (pulau Seram) kepada salah seorang dari keturunan Tomagola. 16 Setelah kekuasaan Ternate di Maluku Tengah dipatahkan, sebagian dari keluarga Tomagola berpindah ke Seram Timur. Kedudukan sebagai "wakil sultan" di kepulauan Sula diserahkan kepada anggauta anggauta dari keluarga Tomasitu, karena salah seorang dari keluarga inilah yang menaklukkan kepulauan tersebut.

Bawa pembagian empat ini sangat berpengaruh dalam masyarakat dan kebudayaan di Maluku, bukanlah suatu hal yang baru. Sudah sejak tahun 1935 hal ini diketahui dengan pasti. Pada tahun itu F.A.E. van Wouden menyusun desertasinya mengenai struktur sosial di Indonesia bagian Timur yang didasarkan pada pembagian-pembagian dua, empat, delapan dan lain-lainnya. 17 Sekalipun van Wouden tidak berbicara mengenai Maluku Utara, tetapi keadaan yang sama ternyata terdapat pula di sana, seperti yang diperlihatkan oleh Chris van Fraassen. 18

Khususnya di Maluku Utara alam pikiran tersebut nampak sekali dalam mitos-mitos mengenai asal-usul raja-raja di sana. Salah satu mitos tersebut mengatakan bahwa raja-raja di Maluku berasal dari telur ular. 19 Ceritanya memang tidak berbeda dengan cerita-cerita lain mengenai asal-usul raja-raja. Suatu ketika, demikian salah satu versinya, seorang yang berjalan ke hutan menemukan empat buah telur ular atau naga dibawah rumput bambu. Ketika telur-telur itu di pegang, terdengar suatu suara yang misterius yang memerintahkan orang tsb untuk memelihara telur-telur tsb. Dari telur-telur itu lahirlah empat orang; tiga diantaranya pria. Mereka kemudian menyebar kesegenap pelosok Maluku Utara dan menurunkan raja-raja di Ternate, Bacan, dan Jailolo.

Mitos ini sudah tentu tidak sama di keempat kerajaan tersebut. Tetapi pola empat itu tetap sama. Versi Bacan tentu akan memberi tempat utama kepada kerajaan Bacan, dan versi Ternate tentu akan memperlihatkan kedudukan utama dari kerajaan tersebut. Sampai abad ke-19 mitos-mitos ini masih memegang peranan penting dalam kehidupan politik kerajaan-kerajaan itu. Hal ini bisa kita lihat dalam Hikayat Bacan 20 ataupun Hikayat Ternate yang ditulis dalam abad itu. 21 Berdasarkan *Hikayat Tanah Hitu* yang ditulis pada tertengahan abad ke-17, Dr.J.Z. Manusama berhasil menyusun struktur pemerintahan tradisional serta dasar-dasar pembagian masyarakat tradisional di Hitu. 22 Sekalipun sampai sekarang belum ditemukan suatu naskah yang sejenis dari Jailolo, tetapi pengakuan adanya kerajaan Jailolo dalam hikayat-hikayat tersebut membuktikan bahwa mitos ini juga terdapat di sana. 23 Sebab itu tidak mengherankan bahwa Mohammad Asgar maupun Kalim Mongaffa menge-claim kedudukannya berdasarkan mitos itu pula. Dan rupanya banyak diantara pengikutnya tertarik kepadanya karena latar belakang mitos tersebut dari gelar Raja Jailolo.

FAKTOR—FAKTOR LAIN

Seperti dikatakan diatas, situasi di Laut Seram yang didominir oleh bajak-laut dari Tobelo dan Galela merupakan faktor yang sangat menguntungkan bagi Raja Jailolo III. Namun sesungguhnya Tobelo dan Galela tidak mempunyai hubungan langsung dengan Raja Jailolo III. Kegiatan bajak-laut mereka di laut Seram bukan merupakan akibat dari adanya gerakan Raja Jailolo III. Mereka sudah ada di nerairan itu jauh sebelumnya adanya gerakan ini. Bahwa mereka tidak terikat secara organik dengan Raja Jailolo nampak kemudian ketika kegiatan-kegiatan Raja Jailolo dipatahkan pada tahun 1832, mereka masih mengadakan kegiatan bajak laut, sekalipun dengan alasan ingin membala dendam karena ditangkapnya Raja Jailolo.²⁴ Sampai pertengahan abad ke-19 bajak-laut Galela dan Tobelo masih merajai Laut Seram. Tidak jarang mereka bekerja sama dengan bajak-laut dari Mindanao dengan pusat di Teluk Tomini.

Pengikut-pengikut Raja Jailolo juga tidak berasal dari Jailolo, sebuah kota kecil di pantai Barat Halmahera yang secara politis termasuk wilayah Kerajaan Tidore. Daerah ini rupanya sudah demikian menderita sehingga tidak banyak lagi penduduknya.

Menurut penyelidikan van Fraassen 25 negeri Jailolo dalam abad ke-19 justru di diamai oleh orang-orang lain seperti orang-orang Morotai dan lain-lain.

Pengikut-pengikut Raja Jailolo I sampai III memang masih berasal dari Halmahera, daerah yang pernah menjadi wilayah kerajaan Jailolo sebelum abad ke-17. Hubungan yang nyata antara Raja Jailolo dengan penduduk daerah Halmahera yang termasuk bilangan Tidore sudah mulai sejak Sangaji Tahani (Raja Jailolo II). Pada waktu itu Sultan Nuku menyerahkan wilayah itu padanya. Selain pengikut-pengikutnya yang berasal dari Makian yang berjumlah 200 orang itu, banyak diantara penduduk Maba, Weda dan Patani (di Halmahera Tidore) sudah menyertainya dalam ekspedisi-ekspedisi jaman Nuku. Mungkin sekali gelar Raja Jailolo yang penuh charisma itulah yang menarik mereka. Usaha Nuku untuk menghidupkan kerajaan ke-4 di Maluku tersebut bisa dibayangkan merupakan daya tarik yang kuat bagi penduduk yang pernah mengenal kerajaan tersebut.²⁶ Dan dalam masa Sultan Nuku cita-cita itu memang sempat direalisasikan, sekalipun hanya untuk masa kira-kira 10 tahun saja.

Sepeninggal Raja Jailolo I pada tahun 1810, Mohammad Asgar, salah satu diantaranya putra-putranya yang paling terkenal sebagai laksamana, diangkat (atau pengangkat dirinya?) sebagai Raja Jailolo. Sekalipun hal ini tidak berlangsung lama karena pada tahun berikutnya ia tertangkap oleh Inggeris, Asgar pun mempunyai pengikut-pengikut diantara penduduk Halmahera pula. Hal ini sudah tentu berlalu juga bagi Kalim Mongafa, Raja Jailolo III.

Mengenai Kalim Mangopa kita mempunyai lebih banyak keterangan sehubungan dengan pengikut-pengikutnya yang berasal dari Halmahera. Pada tahun 1828 Gubernur Jenderal di Batavia pernah mengadakan penyelidikan mengenai hal ini.²⁷ Demikian pula Gubernur Maluku dua tahun sebelumnya.²⁸ Penduduk Halmahera sendiri mempermasalahkan Sultan Tidore. Tindakan-tindakannya kurang baik dan mengakibatkan

kegelisahan dalam masyarakat di Maba, Weda, dan Patani. Pertama-tama di katakan bahwa pajak yang dipungut Tidore atas wilayah "jajahannya" itu terlampau berat. Pajak itu terdiri atas (1) penyerahan beras sebanyak 18 gantang (setiap gantang $7\frac{1}{2}$ "pound") setiap keluarganya sebagai upeti. Pajak ini, menurut penduduk tersebut keraton yang bisa diwajibkan setiap waktu; (3) kerja rodi berupa pekerjaan di istana, penyediaan tenaga untuk ekspedisi hongi, penyediaan tenaga untuk memperdagangkan modal istana, dan pekerjaan lain seperti memancing ikan untuk keperluan istana. Selain itu pejabat-pejabat yang diangkat oleh istana untuk memerintah daerah "jajahan" tersebut sering melakukan tindakan-tindakan dan mewajibkan penduduk melakukan pelbagai hal yang justru malah lebih berat lagi dari pajak-pajak tersebut diatas.

Keadaan tersebut di atas ditambah lagi dengan masalah bajak-laut yang dipersalahkan kepada penduduk setempat menimbulkan keresahan yang lebih parah lagi. Sejak Raja Jailolo III banyak di antara penduduk Maba, Weda, dan Patani sudah bergabung secara insidentil dengan tokoh legendaris itu di laut Seram. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah bajak-laut. Tetapi ketika mereka kembali ke negeri masing-masing pada tahun 1818 Sultan Tidore mengirim honginya untuk menyita semua hasil bajakan tersebut.

Kemudian dalam tahun 1819 Sultan Tidore dengan bantuan Residen Belanda di Ternate mengirim sebuah hongi lagi, antara lain untuk mengejar Raja Jailolo III yang pada waktu itu bermarkas di kepulauan Raja Ampat. Tindakan ini lalu dibalas oleh Raja Jailolo III dengan mengarahkan honginya ke Halmahera. Ketika itu hampir semua wilayah yang dikunjunginya menyatakan takluk kepada Raja Jailolo. Daerah sendirinya hal ini menimbulkan kemarahan Sultan Tidore, yang dengan bantuan Residen Ternate lagi, mengeraahkan hongi yang lebih besar ke wilayahnya di Halmahera. Ketika itu negeri-negeri Maba, Weda, Patani habis dibakar oleh hongi tersebut.

Keadaan ini lalu mendorong penduduk negeri-negeri tsb. untuk mengadakan hubungan dengan Raja Jailolo. Untuk itu mereka mengirim-suatu perutusan dipimpin oleh Rabajala. Sangaji Maba. Raja Jailolo III (Kalim Mangoffa) rupanya menyetujui utusan tersebut.

Ia bersedia mengirim honginya ke negeri-negeri tsb. untuk mengangkut penduduknya ke Seram Utara. Tidak kurang dari 6.000 sampai 7.000 orang Maba, Weda, Patani yang kemudian berpindah sejak tahun 1820 ke Seram Utara. Sultan Tidore yang mendengar keadaan itu pernah mengirimkan sebuah hongi lagi pada tahun 1921 untuk mencegah sebagian dari penduduk yang pada waktunya sedang menyeberang. Hanya sebagian kecil saja yang berhasil ditangkapnya.

Penduduk Maba, Weda, dan Patani ini kemudian mendiami tempat-tempat di Seram Utara bagian Timur. Daerah ini sudah didatangi banyak orang-orang Bugis dan Makasar sebelumnya. Orang-orang Tobelo dan Galela pun banyak yang berdiam di sana. Berdasarkan armada yang kadang-kadang sampai 100 perahu kekuatannya itu, Raja Jailolo III berhasil mendudukkan penduduk asli di wilayah yang sama. Penduduk yang kebanyakan ber-agama Islam itu dan tergabung dalam apa yang dinamakan "Negeri Sembilan" 29 dengan pusat di Saway dan Wahay tidak

mempunyai pilihan lain dari pada bekerja sama dengan Raja Jailolo. Malah kekuasaan Raja Jailolo menyebar sampai ke sekitar Nuniali, wilayah yang dikuasai oleh Saniri Sopalewa. 30 Juga pulau-pulau kecil lainnya seperti pulau Manipa sampai pulau Buru tidak terlepas dari jaringan kekuasaan Raja Jailolo yang didasarkan pada armada bajak-laut itu. 31

Mungkin sekali pada saat itu Raja Jailolo, yang diketahui telah menggunakan gelar Sultan Jailolo itu, sudah mempunyai sistem pemerintahan pula. Pusat kekuasaannya memang berpindah-pindah tetapi selalu berada di salah satu tempat di pantai utara Seram Timur. Ia sering disinyalir berada di Kobi atau di Hoti. Tetapi menjelang tahun 1822 ia berusaha untuk membangun suatu perbentengan di Hatiling.

Sistem pemerintahan Raja Jailolo lebih jelas nampak pada masa Raja Jailolo II yang kemudian dijadikan "Sultan Seram" oleh Belanda pada tahun 1826. Tetapi pada masa Kalim Mongafa sudah nampak adanya pejabat-pejabat yang menguasai pelbagai suku tersebut. Malah penduduk yang berpindah dari Maba, Weda dan Patani juga meindahkan sistem pemerintahan desa mereka. Dengan demikian pemimpin tertinggi adalah seorang sangaji dengan dibantu kapitan laut. Melalui pejabat-pejabat inilah Raja Jailolo mengerahkan tenaga-tenaga untuk mengadakan bajak laut. 32 Ekspedisi-ekspedisi yang dipimpin oleh Mangofa ini berlangsung dengan singitnya antara 1817 sampai 1825. Sejak tahun 1819 pihak Belanda di Ambon sudah mulai mengadakan perlawanan terhadapnya. Tetapi usaha usaha yang berhasil baru nampak pada masa Pieter Merkus menjadi Gubernur di Ambon antara 1822 sampai 1828.

"SULTAN SERAM"

Untuk pertama kalinya pemerintah India-Belanda di Ambon berkenalan dengan kekuatan Raja Jailolo III adalah pada tahun 1818 dan 1810. Dalam masa itu sedang dilakukan reorganisasi dan "pasifikasi" setelah Perang Pattimura. Pertama-tama setiap raja atau kepala desa yang memihak pada Pattimura di pecat dan diganti dengan yang lainnya. Kemudian daerah-daerah yang terpencil seperti Seram Utara mulai dikunjungi pada tahun 1818. Ternyata wilayah Sopalewa yang berpusat di Nuniali itu membangkang dan tidak mau mengirim utusannya ke Ambon untuk menyatakan tunduk kepada India-Belanda. Juga penduduk daerah "Negeri Sembilan" yang terletak di sebelah Timurnya tidak kunjung datang ke Ambon.

Sebab itu Let.Kol. Kruythoff yang menggantikan Laksamana Muda Buyskes sebagai penguasa di Maluku mengirim sebuah armada Hongi ke Seram Utara. 33 Sebelum berangkat ke Nuniali ia singgah di Boanou untuk mengambil kedua rajanya (Islam dan Kristen) yang akan bertindak sebagai jurubahasa di Nuniali dan sekilatnya. Tetapi sesampai di Nuniali ternyata tidak ada pejabat negeri yang mendapatkannya. Sebab itu ia meneruskan pelayarannya ke Saway. Memang menurut berita-berita yang sudah di terimanya di Ambon, Raja Jailolo berada di sekitar tempat itu. Ia berkesimpulan bahwa Raja Jailolo-lah yang merupakan biang keladi pembangkangan di Seram Utara. Beberapa negeri dari kalangan Negeri Sembilan berhasil di hubunginya dan mereka bersedia mengakui kekuasaan India-Belanda (Saway, Hatuwe, Pasanea dan Besi) Tetapi banyak pula

yang tetap membangkang. Sebab itu ia mengeluarkan proklamasikan yang isinya mendiskreditkan Raja Jailolo sebagai seorang jahat dan seorang asing yang akan mengakibatkan kehancuran daerah tsb.

Ia menyerukan agar penduduk menyerahkannya kepada Belanda. Bila Raja Jailolo III tertangkap hidup-hidup maka imbalannya adalah "1000 ropeyan", bila tertangkap mati hadiahnya dalam separoh dari itu. Hongi Kruythoff memang berhasil mendatangi tempat-tempat yang diperkirakan menjadi dari Mangoffa, namun orangnya tidak pernah dijumpainya. Yang menarik baginya adalah sejumlah desa yang sangat rapi makmur dengan arsitekur rumah yang mirip terdapat di Makasar Bugis. Boleh dikatakan wilayah Seram Utara bagian Timur yang didatanginya masih asing bagi orang Belanda.

Yang lebih berhasil dari Kruythoff adalah Pieter Markus, seorang ahli hukum yang menjadi Gubernur di Ambon antara 1822 sampai 1828. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari seorang mata-matanya yang sengaja dikirim ke Seram Utara, Markus mendapat berita bahwa Mangofa berada di Hatiling dan sedang membangun sebuah benteng yang kuat di sana. Korvet "Anna Pawlowna" yang bertugas di Maluku Tengah dikirimnya ke sana dengan maksud mempelajari kekuatan Raja Jailolo. Korvet itu memang berhasil menemukan tempat tersebut. Sebuah surat dikirim kepada Raja Jailolo. Tetapi rupanya Mangofa belum bersedia berunding sekalipun sudah beberapa kali ia mengirim berita melalui pelbagai saluran tidak resmi bahwa ia bersedia berunding. Permintaan berunding dari Mangofa ini disebabkan adanya usaha Tidore untuk menghancurkannya di kepulauan Raja Ampat. Mungkin sekali Mangofa mencoba menetralisir tindakan-tindakan Tidore dengan berusaha menjadi "sekutu" Belanda pula. 34

Berdasarkan laporan Korvet "Anna Powlowna", Merkus mengambil tindakan lanjutan. 35 Kebetulan pada saat itu di Ambon ada Korvet Komeet yang sedang dalam perjalanan dari Manado ke Batavia. Korvet Komeet diperintahkan memperkuat Korvet Anna Powlowna untuk menyerang Hatiling. Selain itu kedua kapal perang itu diperkuat lagi dengan 60 orang tentara Ambon dipimpin Kapitein van Ganzen. Kekuatan ini berangkat tahun 1823 itu juga. Mula-mula mereka singgah di Saway. Raja Saway, yang baru saja dibebaskan Raja Jailolo sejak ditahan pada tahun 1819 karena membantu Hongi Kruythoff, segera memberi bantuan. Pasukannya diperintahkan menuju Hatiling melalui daratan.

Pertempuran di Hatiling cukup seru. 36 Pasukan Ambon yang dipimpin van Ganzen ternyata tidak bisa mendarat karena tembakan-tembakan gencar dari darat. Sekalipun meriam-meriam kedua kapal perang tsb telah memberi bantuan meriam namun banyak pula yang gugur pada saat pendaratan tsb. Baru setelah pasukan alifuru 37, Saway tiba tiga hari kemudian dan mengadakan serangan dari belakang, terjadi sedikit kekacauan dalam barisan pasukan Mangofa. Pada saat itulah pasukan van Ganzen mendarat dengan lindungan meriam kapal-kapal perang. Mereka kemudian disusul pula oleh pasukan marinir kedua kapal perang tersebut. Tidak lama kemudian benteng Hatiling jatuh. Namun Mangofa beserta pasukannya telah mengundurkan diri sebelumnya. Sebagian besar dari benteng Hatiling berhasil di hancurkan. Dan berdasarkan saran dari

komandan Korvet Anna Powlowna, Merkus menghidupkan kembali pos di Saway yang ada sebelumnya tetapi yang di masa pemerintahan Inggris pernah dihapus. Pos Saway inilah yang kemudian, setelah dipindahkan ke Wahay, menjadi pusat pemerintahan India Belanda di Seram Utara.

Dari Saway yang diperkuat dengan suatu detasemen tentara, pihak Belanda berusaha mengintai kegiatan Mangofa. Selama dua tahun kemudian Saway berfungsi dengan memuaskan bagi Belanda.³⁸ Dengan cara ini diharapkan penduduk di daerah Negeri Sembilan dan daerah Sopalewa dibebaskan dari pengaruh Raja Jailolo.³⁹ Malah pihak Tidore sempat mengirimkan empat buah kora-kora lengkap dengan pasukan dan persenjataannya untuk membantu Saway mengadakan patroli di Seram Utara.⁴⁰

Setelah mengadakan perundingan. Namun usaha itu selalu kandas karena ke curigaan Mangofa atas maksud baik Merkus tsb. Tetapi ketika pada bulan Mei Merkus bertemu dengan Gubernur Jenderal di Banda, muncul suatu gagasan baru.

Tidak jelas bagaimana ujung-pangkalnya gagasan ini. Tetapi pada suatu ketika Merkus mendapat kesediaan dari seorang dagang asal Muntok (keturunan Arab), yang bersedia membawa surat lagi ke Seram Utara.⁴¹ maksud semula sama sekali bukan untuk mendapatkan Mangofa yang sudah berkali-kali mengecewakannya dengan tidak membalas suratnya atau mengirimkannya kembali tanpa dibuka. Maksudnya adalah untuk menemukan para penguasa dari Halmahera tsb agar mereka mengambil sikap yang lebih bermusuhan terhadap Mangofa. Entah bagaiman surat tersebut oleh bantuanutusan tsb. tidak diserahkan kepada kepala-kepala tersebut, tetapi kepada Mangofa. Dalam surat itu Merkus mengajak para pemimpin dari Maba, Weda, Patani, Galela dan Tobelo agar mengusahakan supaya Mangofa mau berunding dan mengakui kekuasaan India-Belanda. Sebagai imbalannya Merkus bersedia mengakui kekuasaan Mangofa. Tetapi bila peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka Merkus bersedia mengadakan tindakan yang lebih drastis daripada yang diambilnya di Hatiling.

Beberapa bulan kemudian utusan tersebut, yang bernama Juragan Jusuf, tiba di Ambon dengan lima orang yang mengaku sebagai pimpinan dari orang-orang Tobelo, Galela, Patani, Maba dan Papua (Raja Ampat). Mereka membawa sepucuk surat dari Mangoffa yang bersedia mengadakan perundingan sesuai dengan surat yang diajukan oleh Merkus.

Dalam perundingan itu⁴² para utusan tersebut meminta agar diadakan pemilihan seorang sultan sesuai adat kebiasaan dalam kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Setelah itu sultan yang terpilih itu dikokohkan oleh Gubernur, juga sebagaimana terjadi di kerajaan-kerajaan di sana. Usul ini bisa diterima oleh Merkus. Namun Merkus tidak bersedia memenuhi tuntutan agar kerajaan baru itu dibangun di bekas kerajaan Jailolo yang lama di Halmahera.

Daerah itu, menurut Merkus, telah menjadi bagian dari kerajaan Ternate dan Tidore. Belanda tidak bisa membantalkannya karena kedua kerajaan itu adalah sekutu-sekutunya. Tetapi dalam suratnya kepada Mangofa, yang dibawa oleh kelima utusan tsb yang disertai Juragan Jusuf, ia meminta pada Mangofa agar mengadakan "gencatan senjata" sampai Gubernur Jenderal memberi keputusan lebih lanjut mengenai usaha tsb. Ini berarti

pihak Mangofa harus berusaha agar kegiatan bajak-laut dihentikan. Memang sejak tahun 1824 praktis tidak terjadi kegiatan bajak-laut lagi sampai tahun 1830 ketika rencana Merkus tsb mulai buyar lagi. Selain itu ia juga memerintahkan pos di Soway agar tidak memusuhi orang2 Halmahera yang berdiam di Seram Utara. Juga Residen Banda yang berkuasa atas kepulauan Seram Laut dan Gorong mendapat instruksi yang sama.

Bagaimana kelanjutan usul ini tidak begitu jelas. Tetapi yang jelas adalah bahwa pihak pemimpin-pemimpin Halmahera serta Mangofa akhirnya mengusulkan lagi kepada Merkus agar yang dijadikan Sultan adalah Mohammad Asgar yang pada waktu itu sedang menjalankan hukuman buangan di Jawa. Kepada Gubernur Jendral, Merkus meminta agar usul itu diterima saja. Tetapi daerah yang akan diberikan kepada Sultan Jailolo tersebut bukan di Halmahera (bekas kerajaan Jailolo) tetapi di Seram Utara dari Hatiling sampai Barakit. 43 Dalam surat tsb Merkus mencoba membenarkan rencananya. Ia mengatakan bahwa cara lain untuk memberantas bajak-laut Seram tidak ada. Serangan-serangan seperti di Hatiling mungkin hanya bisa menghancurkan armada mereka serta pusat kekuasaan mereka untuk sementara waktu. Tetapi karena cara hidup mereka yang berpindah-pindah dengan menggunakan perahu-perahu kecil yang juga digunakan untuk merampok, maka sulitlah untuk melenyapkan keseluruhan kekuatan mereka. Mereka tersebar dimana mana dan bisa berlindung di teluk-teluk kecil yang ratusan jumlahnya dan sulit dimasuki. Apalgi bila diingat bahwa kapal-kapal perang tidak bisa dengan mudah mendekati pantai atau sering juga terhalang oleh angin musim yang tidak tepat, maksud usaha militer tidak akan banyak bermanfaat. Sebab itu usaha yang paling baik adalah mengalihkan kegiatan mereka dari laut ke darat; menjadikan mereka petani-petani. Daerah Seram Utara, menurut Merkus cukup subur untuk itu. Dan hasilnya pasifikasi seperti ini, juga tempat-tempat lainnya di Halmahera, yang sudah memihak pada Raja Jailolo akan kehilangan. Tetapi akan ternyata nanti bahwa usaha ini bisa berhasil bila Raja Jailolo atau Mangofa yang memegang kekuasaan. Pada waktu itu Merkus tidak menyangka bahwa Mohammad Asgar yang sudah tua dan pemadat itu tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengekang para bajak-laut tsb.

Mangofa yang oleh Merkus dikatakan sebagai seorang yang "penuh inisiatif.....lemah lembut.....bijaksana.....dan yang oleh pengikut-pengikutnya sudah dianggap sebagai penguasa mereka yang syah...." 44, kemudian ternyata menyetujui semua rencana Merkus. Dalam suratnya tertanggal 27 Nopember 1824 45 Mangofa mengakui bahwa ia tidak pernah menuntut agar daerah Jailolo yang telah dikuasai Ternate dan Tidore itu dijadikan daerah kekuasaannya. Selain itu ia juga menyatakan keinginan pribadinya agar Mohammad Asgarlah yang diangkat sebagai penguasa yang syah.

Selain itu ia mengucapkan terimakasih atas kiriman yang dibawa oleh Juragan Jusuf untuknya, berupa sebuah bendera (Belanda). Ia bersedia berpindah ke Matakap dan mendirikan markas sementaranya di sana dan mengibarkan bendera Belanda. Selain itu ia mengusulkan agar diadakan pertemuan antara ia sendiri dan Merkus.

Pada bulan Juli 1825 Merkus bertolak ke Seram Utara untuk bertemu

dengan Mangofa di Matakap. Disana ia menemukan seorang yang sudah berumur antara 45-50 tahun tetapi nampanya lebih tua. Ia dikelilingi oleh para pemimpin dari sejumlah 7000 orang Halmahera yang menjadi pengikutnya. Dalam perundingan itu orang-orang Halmahera menekankan lagi agar kedudukan mereka jangan dibawakan pada Tidore yang terlalu banyak menuntut pajak dari mereka. Dalam perundingan itu tercapailah kesepakatan yang terdiri atas lima pasal, yaitu : 46

1. Agar Mohammad Asgar menjadi Sultan dengan wilayahnya di Seram Utara bagian Timur
2. Pusat kekuasaan kerajaan itu adalah di Hatiling;
3. Orang-orang Maba, Weda, Patany, Tobelo, Galela, dan Papua (Raja Ampat) membangun negeri-negeri mereka dipantai tsb;
4. Kedua putra dari Monarfa yang pada saat itu memegang jabatan Jogugu (Menteri Utama) dan Kapitan Laut (Laksamana) serta beberapa orang wakil Halmahera menjemput Mohammad Asgar yang sementara itu telah tiba di Ambon.
5. Aturan-aturan selanjunya tentang pemerintahan akan ditentukan bersama antara Merkus dan Asgar.

Suatu hal yang tidak dicantumkan di dalam perjanjian itu adalah gelar dari Asgar. Karena sudah barang tentu ia tidak bisa menggunakan gelar Sultan Jailolo, maka gelar resmi yang diberikan padanya adalah "Sultan Seram". 47

Mohammad Asgar tiba di Hatiling dalam tahun 1826. Sebagai Sultan Seram ia bernama Mohammad Saleh Amiruddin. Pekerjaan pertama yang harus dilakukannya adalah mengumpulkan semua pengikutnya dan mengajurkan mereka berdiam di negeri-negeri pantai wilayah yang sudah ditentukan. Dalam pekerjaan itu ia selalu didampingi oleh Juragan Yusuf yang kini sudah dinamakan Kapitan Yusuf. Selain itu ia juga harus berurusan dengan wakil syah dari gubernur yang berkedudukan di Saway, yaitu Engerhard yang diberi gelar "Gecommitteerde voor Geram" 48 Masalah lain yang harus dihadapinya adalah membangun pemerintahannya serta personaliannya. Seperti halnya dengan Mangofa, yang kemudian dijadikan "Sultan Muda", Asgar pun mengikuti pola yang terdapat di kerajaan2 di Maluku Utara. Sebagai Menteri Utama ia mengangkat Jamaluddin dengan gelar tradisional Jogugu, kemudian Abdul Gani dijadikan Kapitan Laut, Abdurachman menjadi Hukum, dan seorang Jurutulis yang biasanya menjadi penasehat utama dari Sultan.

Para penguasa suku-suku Maba, Weda, Petani, Tobelo, Galela, yang bergelar Sangaji juga mempunyai Kapitan laut dan pejabat-pejabat lainnya seperti Klimelaha dan lain-lain.

Tidak lama kemudian muncul permasalahan-permasalahan yang akhirnya akan mengakibatkan dibubarkannya eksperimen Merkus ini. Salah satu masalah yang tidak bisa didamalkan adalah kedudukan Gecommitteerde voor Geram. Kedudukan ini tentu tidak sama dengan kedudukan Asisten Residen di tempat-tempat lainnya. Namun dalam kenyataan tidak berada. Dalam tahun 1830 terjadi perselisihan pertama sehingga Sultan Seram mengirim suatu laporan panjang mengenai tindakan-tindakan Gecommitteerde tersebut merasa harus mempertahankan dirinya dengan suatu laporan yang membantah tuduhan-tuduhan Sultan Seram. 50 Permasalahan-

nya, menurut Sultan Seram adalah bahwa Gevommitteerde mengadakan hubungan langsung dengan para sangaji-nya tanpa melalui dirinya. Gubernur Ellinghyuzen yang menggantikan Markus mengambil kebijaksanaan memindahkan Engelhard sebagai Gecommitteerde (ia kemudia menjadi Residen di Saparua). 51

Masalah lain adalah formasi pemerintahan Sultan Seram, mengenai hal ini harus diadakan perundingan-perundingan dengan Gubernur. Umpamanya pengangkatan Sangaji Maba yang bernama Catu sebatai Kapitan Laut pada tahun 1830, demikian pula Sangaji Sendayu sebagai Sekretaris Besar, dan Sangaji Gemala Musa sebagai Suwy (Utusan). Tetapi Sangaji Rabajala dari Maba, yang banyak berjasa kepada Mangofa, ternyata tidak bisa diterima oleh Ellynhuizen. 52 Padahal sejak tahun 1828 sudah ada kesepakatan untuk memberi jabatan pada tokoh yang berjasa ini. Rabajala memang sudah sejak tahun 1828 merupakan tokoh yang kurang senang dengan Gecommitteerde tsb. Usaha Gecommitteerde untuk memindahkan pusat kekuasaan Sultan Seram dari Hatiling ke Wabay, umpamanya, mendapat tantangan dari SANGAJI YANG PADA SAAT ITU MENYANDANG GELAR Shahbandar. Sebagai akibatnya Rabajala diharuskan berdiam di Ambon agar bisa lebih mudah diawasi. Tetapi hal ini terjadi ketika Ellinghuizen belum menunjukkan sikap tersebut di atas. 53

Masalah lainnya yang tidak mudah di atasi adalah perbedaan-perbedaan antara orang-orang Halmahera yang berorientasi ke laut ini dengan penduduk Negeri Sembilan yang lebih banyak bertani. Umpamanya masalah harga-harga bahan-bahan makanan yang dihasilkan oleh penduduk tersebut, tetapi yang ingin diubah oleh Sultan Seram. Juga masalah penjualan ikan menjadi pangkal perselisihan yang bisa berlarut-larut. 54 Masalah didudukinya ladang-ladang penduduk Hatuwa oleh orang-orang Tobelo menimbulkan perselisihan yang menambah ketegangan antara penduduk Negeri Sembilan dan orang-orang Halmahera.55

Ketegangan antara Sultan Seram dengan Gubernur di Ambon ditambahkan lagi karena tuntutan Sultan Seram agar ia diberi mahkota seperti Sultan-sultan lainnya di Maluku Utara. Dalam salah satu suratnya kepada Gubernur tertanggal 29 Mei 1831 56 ia mengatakan bahwa "didalam negeri Maloko empat, Tidore, Ternate, Bacan, Jailolo, sekarang tiga negeri sudah....." mendapat mahkota. Hanya "Sultan Jailolo belum betul". Pernah Merkus menjanjikan akan membicarakan hal ini dengan Batavia, katanya, tetapi sampai saat itu belum juga dilaksanakan. Perlu ditambahkan disini bahwa permasalahan mahkota dan alat-alat pusaka lainnya tidak pernah dibereskan sampai "Kerajaan Seram" dihapus pada tahun 1832.

Kekompakan antara orang-orang Halmahera juga sangat membantu ke arah pembubaran itu. Terutama orang-orang Tobelo dan Galela kurang serasi dengan orang-orang Halmahera lainnya. Pada tahun 1832 orang-orang Maba, Weda dan Petani mulai menunjukkan kurang senang. Alasan mereka adalah bahwa daerah yang mereka diami di Seram kurang baik karena banyak lumpur, terutama pada masa penghujan. Mengenai hal ini sebelumnya Sultan Seram juga sudah mengajukan keluhan. Setelah berpindah dari Hatiling ke Wahay ia masih mengeluh bahwa pengikut-pengikutnya tidak betah di tempat yang telah ditentukan bagi mereka. Sebab itu ia mengajukan usul agar kedudukannya bisa dipindahkan ke sebuah pulau kecil di Utara,

yaitu pulau Obi. Tetapi ini semua merupakan alasan yang dicari-cari saja. Sebenarnya Sultan yang sudah sangat tua dan madatan itu memang tidak sanggup lagi memerintah. Sebab ia tidak mengherankan bila muncul suara-suara yang menuntut agar Mangofa dijadikan sultan.

Rupanya beberapa diantara pemimpin Baba dan Petani secara diam-diam menghubungi Sultan Tidore dan meminta agar mereka diijinkan pula ke desa mereka di Halmahera. Tetapi Sultan Tidore dan Residen Ternate mengajukan persoalan ini kepada Gubernur di Ambon sehingga terbongkarlah keadaan yang sebenarnya. Situasi ini rupanya menimbulkan kehebohan juga, karena Jogugu Jamaluddin lalu ke Ambon melaporkan tindakan ke-enam pemimpin tersebut. Hal ini lalu memaksakan Gubernur untuk mengadakan penyelidikan. Ternyata kebanyakan dari orang-orang Maba, Weda, dan Petani memang sudah secara diam-diam meninggalkan Seram kembali ke desa asal mereka.

Dari jumlah 7000 orang yang semua menjadi pengikut dari Raja Jailolo III dalam tahun 1822, di tahun 1832 ternyata hanya tinggal 2111 orang lagi. Mereka mengeluh bahwa Sultan Seram tidak berhasil memperbaiki nasib mereka seperti yang mereka harapkan ketika mereka meninggalkan Halmahera. Sebab itu mereka mendesak agar Gubernur mengijinkan mereka kembali.⁵⁷

Gubernur Ambon lalu mengajukan usul kepada Gubernur Jendral di Batavia untuk membubarkan "Kerajaan Seram" dan menangkap Mohammad Asgar serta Mangofa. Kehadiran mereka di Seram tidak lagi dibutuhkan bila sisa dari orang-orang Maba dan Weda serta Petani telah dipulangkan. Mengenal orang-orang Tobelo dan Galela ia tidak memberi komentar.

Muslihat yang dipakainya untuk menangkap kedua tokoh tersebut diatas adalah dengan mengadakan rapat di Ambon.⁵⁸ Namun rupa-rupanya Sultan Seram telah mencium bahaya dan mengusulkan agar rapat itu diadakan di Wahay. Dengan menggunakan dua buah kapal perang, Pejabat Gubernur menuju ke Wahay. Rapat diadakan di atas geladak salah satu kapal perang tersebut dan di situpula Sultan Seram, Mangofa, dan beberapa orang pengikutnya ditangkap kemudian diangkut ke Ambon dan akhirnya dibawa ke Batavia.⁵⁹ Sebagai tempat buangan terakhir bagi Sultan Seram pejabat-pejabat di Batavia menentukan Cianjur.⁶⁰

Selama beberapa tahun kemudian orang-orang Tobelo dan Galela masih melakukan kegiatan bajak lautnya. Berkali-kali mereka didekati untuk mencari penyelesaian. Tetapi kegiatan mereka untuk tahun-tahun pertama mendapat legalitas karena 'alasan yang mereka berikan adalah "membalas dendam" penangkapan Sultan Seram, Namun tidak lama kemudian alasan ini mereka dan kegiatan bajak laut diteruskan seperti sediakala (sejak abad ke-18).

Sebagai kesimpulan dapat kita katakan bahwa unsur bajak laut yang nampak menonjol dalam perjoangan Raja Jailolo II dan Raja Jailolo III, hanya unsur sambilan saja. Situasi pada itu memang mengharuskan mereka menggunakan cara itu. Bagaimana halnya dengan perjoangan Danu Hassan pada tahun 1876 dan perjoangan Raja Jailolo lainnya pada tahun 1914. Sudah barang tentu situasi sosial budaya yang memungkinkan mereka muncul dalam panggung sejarah lain pula.

CATATAN

1. E.Katoppo, Nuku : **Sulthan Saidul Djehad Muhammad El Mabus Amirud-din Sjah, Kalil Paparangan, Sultan Tidore**, Bandung : Kilat Maju, 1957.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. D.G.E.Hall, **A History of South East Asia**, 3ed. New York : Mc Millan, 1968, 338-339.
5. **Hongitchten** armada kora-kora (perahu perang) yang digunakan untuk mengadakan patroli di lautan.
6. Arombay adalah perahu-perahu pengangkut yang sejak lahir akhir abad ke-18 menggantikan kora dalam hongitchten.
7. Hal ini diketahui setelah Sultan Seram ditahan pada tahun 1832. Dalam daftar-daftar hutang dan piutangnya nampak bahwa ia banyak memberi modal pada para pejabatnya untuk berdagang. Juga hubungan dagang dengan orang-orang Cina, Ambon dll, nampak dari daftar-daftar itu. Lihat Surat Residen Ternate tertanggal 26 September 1835 dan Surat Gubernur Maluku tertanggal 11 Januari 1836.
8. Lihat laporan Hongi Kruythoff, akhir Desember 1919.
9. R.Broersma, **Koopevaatdij in de Molukken**, Groningen 1934.
10. Laporan Juragan Jusuf, Ambon 27 September 1826.
11. Lela + meriam ukuran kecil.
12. Katoppo, op.cit.54, 63, 99, 109, XXX 121, 143, 149, 165, 171, 176, dst.
15. Valentijn, **Oud, en Nieuw Oost-Indien**, Dordrecht 1734, II, Zaken.
16. R.Z. Leirissa, "Local Potentates and the Competition for Cloves Early Seventeenth Century Ternate", Paper untuk IAHA Bangkok, dalam **Proceedings Seventh IAHA Conference**, Bangkok : Chalalongkorn University Press, 1979, II 319332.
17. F.A.E. van Wouden, **Types of Social Structure In Eastern Indonesia**, KITLV, Martinus Nijhoff, 1968.
18. Ch.F. van Fraassen, "Types of Sociopolitical Structure in North Halmahera History", **Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia** Vol VIII No.2, (November 1978/1979), 87-150.
19. Valentijn, loc.cit.
20. W.P.H.Coolhaas, "Kroniek van het Rijk Bayjan, "Tijdschrift, No. 63, 1923, 474-512.
21. P.A.van der Crab, "Geschiedenis van Ternate in het Ternataansche en Maleinche Tekst door den Ternataan Naidal met vertaaling en aantekeningen door P.A. van der Crab, "Bijdragen" 79.
22. J.Z. Manusama, "Hikayat Tanah Hitu", Desertasi Universitas Leden 1971.
23. Wawancara dengan tokoh-tokoh dari Tidore, 1981.
24. Prosesverbal 11 Maret 1833, Ambon 26 Maret 1835, Ambon 15 Agustus 1835.
25. Van Vraassen, Loc.cit.
26. Katoppo, op.cit. 176.
27. Gubernur Maluku 17 Maret 1830 dan Resolusi Gubernur Jendral 24 Oktober 1828, 55.

28. Laporan Gubernur pada Batavia 15 Juli 1826.
29. Istilah Negeri Sembilan muncul dalam beberapa surat antara lain. 24 April 1830 dili.
30. Saniri Sopalewa adalah salah satu dari tiga Saniri (rapatnya J.Ph. Duyvendak, *Het Kakean Genootschap van Seram*, Amelo, 1926).
31. Mengenai kegiatan bajak laut di Maluku Tengah lihat surat Gubernur 29 Juni 1819, 30 Oktober 1819, surat D. Hatuey 26 September 1823.
32. Salah satu contoh ekspedisi bajak laut adalah yang dilakukan ke Kalencucu Sulawesi Tenggara. Ini dilakukan dengan bantuan bajak laut Mindanao (keterangan buku Kapitan Tobalo, 8 Agustus 1823).
33. Laporan Hongi Kruythoff, akhir Desember 1819.
34. Surat Merkus 29 September 1824, 4.
35. Surat Merkus 25 Maret 1824, 2.
36. Laporan Korvet Kommeet 6 Oktober 1823.
37. Alifuru + penduduk pedalaman.
38. Surat Komandan Saway 31 Oktober 1824.
39. Surat Merkus, 23 Februari 1824, 3.
40. Surat Merkus, 23 Februari 1824, 5.
41. Surat Merkus, 3 Mei 1824.
42. Besluit Gubernur Jendral, Batavia 14 September 1824, 1.
43. Surat Merkus, 10 Desember 1824.
44. *Ibid.*
45. Surat Mangofa (kapitan Laut Jailolo) 27 Nopember 1824.
(berbahasa Melayu dengan transkripsi dari tulisan Arab).
46. Resolusi Gubernur Jendral Batavia 4 Oktober 1825, 2.
47. Istilah Seram sebenarnya hanya dipakai untuk pantai Selatan Tanah Hitu (lihat catatan 22).
48. Surat Mohammad Asgar pada Merkus 5 April 1826 (bahasa Melayu).
49. Surat Sultan Seram 8 Maret 1830 (bahasa Melayu).
50. Surat Engelhard, 1 April 1830.
51. Surat Ellynhuitzen pada Sultan Seram 23 Maret 1830.
52. Surat Ellynhuizen Sultan Seram 30 Juni 1830.
53. Besluit gubernur Jendral 30 April 1828.
54. Surat Komandant Wahay kepada Gubernur 23 Januari 1831.
55. Surat Komandant Wahay kepada Gubernur 29 April 1831.
56. Surat Sultan Seram kepada Gubernur 29 Mei 1831 (Melayu).
57. Resolusi Gubernur Jendral Batavia, 15 Agustus 1832, 32.
58. *Ibid.*
59. Surat Pej. Gubernur 24 Desember 1832.
60. H.C. van Eijbergen, "Geschiedkundige Aantekeningen omtrent de Noordkust van Ceram van af het jaar 1816 tot 1832".
Tijdschirft, XVII, 1869, 489-504.

TRADISI LOKAL DAN PENULISAN SEJARAH BUTON

Oleh : Julianti L. Poram

I HISTORIOGRAFI DAN KEBUDAYAAN

Tulisan ini mungkin terlalu berani dalam mengungkapkan pemikiran yang mungkin oleh kaum sejarawan belum bisa dianggap ilmiah. Seringkali ke-ilmiah-an tersebut merupakan suatu proses yang pada waktunya akan menemui kematangannya juga.

Apabila Buton menjadi sasaran dalam memberi wadah penulisan ini, maka sekedar faktor kebetulan saja yang saatnya saling bertemu dengan suatu kesempatan dalam Seminar Sejarah Nasional ke-III. Tapi pemikiran ini sudah muncul dalam suatu pengungkapan kreativitas dan penghayatan daripada Kebudayaan Betawi, Minangkabau, Melayu, Sunda, Jawa, Bali, dan sebagainya.

Pada kesempatan ini ingin kami mengutip pendapat Prof. Dr.A. Sartono Kartodirdjo yang mengutarakan melalui suatu ceramah pada Pekan Arsip Internasional di Jakarta, bulan Desember 1979 bahwa pengalaman kita masing-masing menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu setiap orang bertindak sebagai sejarawan. Dalam kaitan ini seorang seniman yang bertindak sebagai sejarawan akan lebih mengerti apa yang dicetuskan oleh Pak Sartono pada ceramah itu juga terutama apabila dihubungkan dengan pendapatnya bahwa karya sejarah memerlukan suatu aktivitas yang asli atau suatu kreativitas.

Dalam mempertinggi mutu keilmuan daripada sejarah, pengujian bahan bukti perlu lebih cermat. Hal ini bisa menjadi masalah, apabila disadari bahwa di dalam menghadapi sumber sejarah ada faktor subyektivitas. Permasalahan ini muncul kalau kita berpegang pada apa yang diucapkan pak Sartono 1) tersebut, bahwa hampir setiap barang dapat dipakai sebagai bukti bagi subyek tertentu di dalam sejarah. Seringkali hal ini tergantung pada orisinalitas dan kemahiran sejarawan dalam mengupas berbagai aspek daripada kehidupan manusia.

Kehidupan alam semesta dengan manusia sebagai bagian terpenting daripada kehidupan tersebut sejak ia lahir hingga mati, senantiasa mencari pengungkapan dari bentuk kehidupannya. Manifestasi daripada kehidupan manusia dengan alam lingkungannya ini disebut orang sebagai kebudayaan dan pada hakekatnya adalah obyek daripada ilmu sejarah.²⁾

- 1). Kartodirdjo, Sartono A. "Arti dan Fungsi pengetahuan Sejarah dan Peranan Dokumentasi di dalamnya". Ceramah di dalam **Pekan Arsip Internasional**. Desember 1979. Arsip Nasional R.I.
- 2). Zoetmoeder, P.J. "The Significance of the Study of Culture and Religion for Indonesian Historiography". **Internasional to Indonesian Historiography**. 1965.

Dengan demikian kebudayaan dari masa ke masa merupakan jalur merah daripada studi sejarah yang wujudnya bisa berupa kehidupan politik, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Di dalam jalur merah ini kebudayaan tradisi sebagai endapan kehidupan yang telah mengental dari masa lampau merupakan bukti-bukti yang mengandung suatu kebenaran yang cukup nyata. Suatu studi terhadap kebudayaan pada umumnya dimaksudkan untuk mencari modus pelestarian daripada nilai-nilai estetis sebagai khasanah budaya. Penerapan orientasi kesejarahan terhadap studi demikian akan bisa membawa berbagai manfaat dalam pengembangan kita pada masa kini. Warisan budaya tradisi bisa mengambil bentuk keseni-rupa-an, kesusasteraan, teater, musik, seni suara, seni tari, dan lain-lain.

Di dalam pemahaman masa lampau seni budaya tradisi perlu ditempatkan dalam kedudukan tersendiri sebagai bahan bukti kehidupan manusia. Legalitas kehidupan yang terungkap di dalamnya berbentuk perlambangan dan tidak bisa secara mentah dianggap sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Bentuk-bentuk ini merupakan perlambangan perilaku dan kegiatan manusia. Faktor kebenarannya tidak senyata seperti suatu Akta/Kontrak/Sertifikat dan dokumen sejenisnya.

Peninggalan tertulis berupa naskah-naskah resmi tersebut mempunyai kedudukan sebagai bahan bukti sejarah dari kejadian/kegiatan/transaksi masa lampau yang lebih nyata daripada peninggalan seni budaya.

Secara metodologis peninggalan seni budaya ini masih perlu didukung oleh disiplin-disiplin ilmu sosial lainnya, misalnya Arkeologi, Antropologi, Sosiologi, Linguistik, dan lain-lain. Warisan budaya dari masa lampau yang diturunkan secara lisan, apabila hendak digunakan sebagai sumber sejarah perlu diberlakukan metode kritik sejarah yang kebenaran informasinya perlu diuji melalui pendekatan secara Interdisipliner.³⁾ Metode kritik sejarah perlu diterapkan dalam penulisan sejarah masyarakat apabila peninggalan seni budaya tradisi akan dijadikan bahan bukti untuk mendukung kebenaran seperti yang diinginkan ilmu sejarah.

Namun demikian dalam berhadapan dengan keaneka-ragaman kebudayaan daripada bangsa Indonesia, pemahaman warisan tradisinya akan sangat berarti dalam memperoleh jawaban terhadap persoalan-persoalan yang bertalian dengan kehidupan pada masa kini. Tidak saja bentuk warisan tradisi lokal berupa catatan tradisi yang bersifat sejarah seperti yang dikenal sebagai babad, sejarah, serat kanda, cerita, wawacan, hikayat, salsila, seperti yang diungkapkan oleh H. Djajaningrat,⁴⁾ tapi bentuk seni budaya seperti Lenong, Gambang Kromong, Tanjidor, Makyong, Randai, dan lain-lain apabila dipelajari dan diteliti bisa membuka tabir dari masa lampau. Sebagai contoh bisa diberikan sebagai berikut.

Teater Makyong, yang sisa-sisanya masih terdapat di Pulau Matang di Kepulauan Riau, terdapat juga di Malaysia. Di dalam bentuknya kini Makyong dari daerah-daerah tersebut tidak keseluruhannya serupa. Tapi tidak bisa dielakkan adanya kesamaan baik dilihat dari pengungkapan keseniannya

3). Vasina, Jan. *Oral Tradition, A study in historical Methodology*. 1965.

4). Djajaningrat, Hoessein. "Lokal Tradition and the study of Indonesian History", *Internasional to Indonesian Historiography*. 1965.

maupun peranan dan fungsi kemasyarakatannya. Bentuk teater ini yang terdapat juga di kesultanan-kesultanan Melayu di daerah Sumatera Timur, membawa pemahaman sejarah lokal yang lebih menyeluruh. Fakta yang dijumpai ini, kalau bisa dimengerti dan diteliti lingkup sejarahnya, bisa membawa perkembangan yang bermanfaat tidak saja dilihat dari pembinaan kebudayaan, tapi juga dari ilmu sejarahnya.

Menurut Prof. Kuntjaraningrat bahwa ada keterbatasan pengaruh elemen kebudayaan Cina di Indonesia apabila dibandingkan dengan kebudayaan Hindu.⁵⁾ Pendapat ini mungkin akan bisa lebih dikembangkan apabila penelitian terhadap peninggalan seni budaya tradisi bisa mengarah ke penelitian musik tradisi, misalnya musik rakyat di Betawi seperti Gambang Kromong, ataupun di Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Di dalam penerapan ilmu Antropologi Musik, Antropologi Tari, Antropologi Teater, ataupun Sosiologi Musik, Tari, dan sebagainya, bisa berkembang dengan subur di Indonesia, karena materi yang bisa diteliti berlimpah-limpah. Penelitian kesenian Betawi bernama Tanjidor, tidak saja muncul hal-hal baru yang menarik dan sangat bermanfaat yang dapat diteliti dari unsur keseniannya tapi juga dari segi Sejarahnya.⁶⁾

Demikianlah apa yang ditemukan di Pulau Buton yang belum dikenal oleh masyarakat Indonesia baik dari kaum sejarawan maupun yang dari orang awam.

II. BUTON, SEPINTAS SEJARAH DAN SENI BUDAYANYA

Sejarah Botan telah diungkapkan dalam batas-batas tertentu saja oleh penulis-penulis Belanda maupun oleh pencatat-pencatat dari kesultanan 16. diri. Yang ditulis tersebut belum banyak jumlahnya dan pada umumnya hanya dicatat hubungan Belanda dengan daerah tersebut dan baru dimulai dengan kontrak-kontrak Belanda yang dilaksanakan sejak Appolonius Scotte, kommander kapal "der Veer" dan Kaitein di Makian merangkap anggota Raad van Indie, pada tanggal 5 Januari 1613. Sebelum masa itu orang Belanda menduga bahwa Sultan Buton berasal dari Majapahit yang ketika kerajaan tersebut mulai memudar, ada pembesar-pembesar yang sebetulnya ingin mengungsi ke Ternate kemudian dalam perjalanan merubah niatnya dan pergi ke Buton.⁷⁾ Tentang berita yang kebenarannya masih ragu-ragu ini kemudian bisa dicocokkan dengan berita yang terdapat pada salah satu cabang tradisi lisan dari Buton, yaitu suatu nyanyian rakyat yang sering dilakukan oleh anak-anak di sekitar Desa Tolandana bernama "La Naga".

- 5). Koentjaraningrat, "Use of Antropological Methods in Indonesian Historiography". *Internasional to Indonesian Historiography*. 1965.
- 6). 1. **Tanjidor**, Sebuah Laporan Pengamatan Lapangan di Daerah Jakarta dan sekitarnya. Departemen Tari I.K.J. tahun 1980.
2. Lohanda, M. "Majoor Jantje and the indische element in Betawi folk-music". *Ind Dutch — Indonesia Historical Conference*, Lage Vuursche 23 - 27 Juni 1980.
- 7). Boersma, R. "Meedeelingen over de eilanden van het Sultanaat Buton". *Kolonial Tijdschrift* deel 19 (1930).

Menurut penjelasan Pak Abdul Mulku Zahari bekas juru tulis Sultan Buton terakhir, bahwa nyanyian tersebut diduga berasal kira-kira dari abad ke-XIII yang mengisahkan putri Wa Kaa Na yang akan meninggalkan Buton untuk suatu perjalanan bersama-sama suaminya Sang Pangeran bernama Sibatara berasal dari putra Raja Majapahit.

Tentang masa sebelum itu, misalnya masa masuknya agama Islam di Buton, berita-berita yang sementara ini bisa dikumpulkan belum ada kepastiannya. Ada suatu berita yang menyebut bahwa Raja Ternate bernama Baaboellah sekitar 1580 menaklukkan Buton dan memasukkan agama Islam.⁸⁾ Sedang di dalam lampiran suatu mimeograph ⁹⁾ mengisahkan tentang Sejarah Masoeiknya Agama Islam di Negeri Boeton dan Moena, adalah sebagai berikut :

.....pada masa Radja Boeton jang ke IV bernama Lekina La Pona bertaha keradjaan maka kira-kira tahoen 940 hidjarahan Nabi, maka datanglah seorang goeroe bernama Abdoel Wahid dengan dia poenja isteri bernama Waode Solo dan seorang anak laki-laki Ledi Penghoeloe moesjafir keradjaan Boeton. Maka bertemoelah dengan Radja Boeton laloe bersahabat.

Goeroe itoe seorang Keramat serta menerangkan tentang dirinja : Saja ini kelahiran Mekkah toeroenan Sajid, tjoetjoe Nabi Moehammad s.a.w. Saja ada toeroenan di negeri Djohor, laloe berangkat ke negeri Solo achirnya berangkat ke Baroengasi masoek di negeri Boeton. Maksoed saja adalah membawa Igama Islam di negeri ini dengan pengharapan soepaja Radja Boeton masoek memeloek Igama Islam. Terdahoeloe diminta akan kawon dengan seorang familienja Radja. Keduanya akan mendirikan Masjid, laloe menghadjar anak negeri Tentang igama Islam. Diterangkan lebih djaoeh bahwa Radja Boeton poen setelah mendengar chabar Radja Solo, maka Radja poen masoek Islamlah djoega.....

Berita yang sebetulnya mengenai Muna ini, juga menyangkut hal ichwal Buton, karena pada jaman Hindia Belanda, Buton termasuk Zelfbester end Landschap; behoorende tot het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, yang berada di bawah kekuasaan seorang Sultan yang daerahnya juga termasuk Muna, Kabaena, Wowoni, Polejang, Roembia, Kepulauan Toekang Besi. Pada awal abad 20, orang Belanda mencatat ada 190.000 jiwa di daerah-daerah tersebut, sedangkan pada waktu kini Kabupaten Buton mempunyai 15 kecamatan, dengan penduduk kurang lebih satu juta orang.

Berita-berita tentang masuknya agama Islam di Buton ini perlu dibandingkan dengan berita-berita mengenai masuknya agama Islam di negara tetangganya. Seperti sudah banyak diketahui oleh sejarawan Indonesia, Kerajaan Goa mempunyai peranan penting dalam meng-Islamkan

-
- 8). Ligvoet, A., "Beschijving en geshiedenis van Boeton", Bijdr. K.I.T.L.V. 42 reeks II 1878.
- 9). Couvreur, J., Ethnografisch Overzicht van Moena. 1936 (Perpustakaan Museum Pusat Jakarta).

Daerah Tetangganya. Sedangkan agama Islam menjadi agama resmi di Goa sekitar tahun 1607. Sejarah Goa menyebut bahwa masa sebelumnya, yaitu sekitar abad 16, Goa sudah berkenalan dengan agama Nasrani yang dibawa orang Portugis dari Ternate dan juga dari Malaka. Perkenalan dengan agama Nasrani ini tidak mendalam, karena dalam waktu seabad, Islam sudah bisa masuk dan menjadi agama rakyat hingga kini.¹⁰⁾

Kalau orang Portugis sudah menyebarkan kebudayaannya di daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya pada abad 16 tersebut dan ternyata tidak berhasil dalam menanamkan agama Nasrani, ternyata masih ada sisa-sisa peninggalan kebudayaan Portugis yang jejaknya masih terlihat pada seni budaya Buton. Kalau kita mengunjungi kraton Sultan di Bau-Bau, ibu kota Buton, maka pada pintu gerbang halaman kraton ada suatu gambar buah Nenas. Menurut Laode Manarfa, pewaris Sultan Buton terakhir, lambang tersebut adalah lambang Raja/Sultan Buton. Sedangkan Ibu Paramita Abdulrahman, seorang yang namanya cukup terkenal dalam sejarah pengaruh kebudayaan Portugis di Indonesia menyatakan bahwa Lambang tersebut Portugis-sentris.

Peninggalan pengaruh Portugis ini bisa pula diteliti dari suatu tarian tradisi bernama tari Galangi dan penamaan tokoh-tokoh penari yang menurut penjelasan para ahli, kelihatannya berasal dari bahasa Portugis. Tarian ini adalah tarian laki-laki yang semuanya memakai rambut palsu panjang, dan bajunya mengingat pada serdadu-serdadu jaman abad pertengahan. Tarian ini menggambarkan semacam tari upacara di mana para pengawal istana, serdadu-serdadu dan staf istana lainnya menari-nari. Tarian ini disebut Galangi karena ada penari-penari memakai Tombak yang dalam bahasa Buton disebut Gala sedang Ngi berarti bermain. Seorang penari lainnya disebut Alifirasi yang menari-nari dengan bendera besar seperti Tarian berasal Abad Pertengahan di Eropa Barat. Tarian Galangi diiringi oleh seorang penabuh tambur yang disebut Tamburu, kemudian ada empat orang Saraginti dan satu orang Lutunani.¹¹⁾

Menurut pengamatan seorang Belanda pada tahun 1937,¹²⁾ tarian upacara yang digambarkan pada perayaan Idul Adha adalah tarian yang penggambarannya seperti tarian yang dikenal sebagai Galangi ini. Tarian ini menghantarkan Sultan yang akan ke Masjid untuk upacara sembahyang pada Hari Besar tersebut.

Tari-tarian yang kelihatannya mendapat pengaruh dari kebudayaan Islam, ialah tari Mangaru yang juga disebut tari Mincei. Tarian ini adalah tari perang yang menggambarkan kepahlawanan. Gerak-gerak tariannya sangat dinamis yang diiringi tabuhan gamelan kecil yang sifatnya sangat ritmis. Penari-penarinya pria-pria mempergunakan keris di tangan dengan memakai jubah seperti pedagang Arab jaman Tempo Dulu. Sebagai pementasan sering menjadi bagian dari tari Linda.

10). **Sejarah Daerah Sulawesi Selatan.** Departemen P & K. 1978.

11). Penjelasan Pak Abdul Mulku Zahari, di dalam Naskah yang belum diterbitkan, **Memperkenalkan Kesenian Rakyat Tradisional Wolio.**

12). V/D Berg, E.J. -De vierung van den raraja hadji in de kota Wolio (Boeton) **Meedeelingen.**

Sayang sekali kami belum bisa memberi penjelasan lebih banyak mengenai latar belakang tarian ini, tetapi bisa kami katakan bahwa tariannya sangat menarik dan tidak gampang untuk dilakukan.

Tarian yang dilakukan oleh wanita, baik yang sendiri-sendiri maupun berpasangan cukup ada. Antara lain, tarian yang cukup dikenal di seluruh daerah Buton dengan berbagai variasi daerahnya adalah tarian Linda yang bisa dianggap semacam tari upacara. Sepenglihatan kami tari Linda ini sudah ada tiga versi dan sudah dimodernkan pula oleh penata tari Buton sendiri yaitu Laode Umuri. Mengenai tari Linda belum diketahui latar belakang historisnya, kecuali tari Linda yang berasal dari Desa Rongi yang juga dikenal sebagai tari Batanda. Desa Rongi dan tari Batanda mempunyai cerita tersendiri.

Dahulu kala Rongi merupakan tempat kediaman Iasykar kerajaan yang terletak pada suatu daerah yang lebih tinggi letaknya dan berjarak kurang lebih tiga puluh kilometer dari kraton Sultan yang terletak di daerah dekat ibu kota Bau-bau. Tari Batanda ini merupakan tari sambutan yang dilakukan oleh isteri prajurit yang sedang menyambut kedatangan kembali suaminya sehabis berperang. Di kemudian hari setelah jaman damai, tarian ini merupakan tari upacara panenan. Pada saat kini tentu fungsinya ditambah lagi dengan berbagai maksud kontemporer.

Tarian lain yang juga menarik adalah Pajoge (Padoge) Ngibi. Kalau mendengar namanya dan melihat tariannya seperti yang banyak ditemukan di daerah Sulawesi Selatan (Bone). Menurut penjelasan sumber kami, Pak Abdul Mulku Zahari tarian ini memang mendapat pengaruh dari kerajaan Goa (ataukah Bone) pada jaman dahulu.

Di dalam arena perperangan kekuasaan di Indonesia Timur pada masa-masa yang lalu, Buton tidak pernah memperoleh peranan yang berarti. Kalaupun ia menjadi pelaku dan bertempur di dalam arena tersebut baik melawan Belanda, Goa, ataupun Ternate, maka Buton senantiasa di dalam kedudukan yang tidak terlalu menguntungkan. Namun demikian kraton Sultan sering menjadi tempat berlindung para pelaku pertarungan.

Mungkin yang paling banyak disebut-sebut dalam penulisan adalah masa-masa sebelum Perjanjian Bonggaya (1667). Tokoh-tokoh semacam Speelman dan Aroe Palakka, nama-namanya diabadikan dalam berbagai cerita apabila kini sebagai turis keliling-keliling di kraton Sultan Buton. Menjelang saat-saat sebelum disahkan Perjanjian Bonggaya, terjadi beberapa pertemuan antara Belanda, Gos, dan juga Ternate. Ternyata kekuatan dari daerah-daerah ini sangat berarti pada masa-masa itu. Dalam permainan yang serupa ini, tidak jarang Buton menjadi tempat pertemuan/persinggahan dan ada kalanya tempat persembunyian. Kalau ada faktor celaka sudah barang tentu yang menjadi korban adalah rakyat beserta Sultan Buton sendiri.

Ternyata Pulau Buton dan sekitarnya juga merupakan tempat persembunyian yang nyaman bagi kaum prompak terutama orang-orang Bajau sekitar abad 19. Perompak Bajau memang sekitar abad 19 tersebut terkenal mengganggu perairan sekeliling Kalimantan dan Sulawesi.

Karena Buton terletak di tempat yang strategis yang tidak menguntungkan ditambah pula bahwa penghasilannya tidak seberapa berarti di masa-masa lalu, maka orang Buton sering berpindah.¹³⁾Pada awalnya tentu

13). Boersma, R., "meedeelingen over de eilande van het Sultanaat Boeton".

Kolonial Tijdschrift deel 19 (1930) hal. 29.

terbatas pada daerah-daerah yang terletak dekat dengan Buton, misalnya ke Pulau Binongko senantiasa mengadakan hubungan dagang ke Maluku yang ada kalanya, mereka kemudian menetap sebagai pekerja-pekerja. Hingga kini; kita masih temukan orang-orang perantau keturunan Buton ini di Ambon, Banda hingga ke Irian (Kaimana). Di daerah-daerah baru ini baik Buton maupun orang Binongko, sebagai pekerja sangat populer, karena mereka umumnya rajin-rajin dan kuat-kuat. Mereka juga jadi penyelam mutiara di Kepulauan Arafuru, karena sudah punya pengalaman di kampung halaman-nya sendiri. Di Ujung Pandang juga ada Kampung orang-orang Buton yang sejarahnya bisa ditarik ke belakang pada jaman Speelman. Katanya di Betawi juga banyak orang-orang keturunan Buton. Mungkin asal-usulnya bisa ditarik pada jaman Speelman tersebut.

Sebetulnya minat Belanda terhadap Buton tidak terlalu dititik beratkan pada faktor ekonomis, hanya sekedar menjaga stabilitas keamanan saja di sekitar daerah tersebut. Terutama setelah perjanjian Bonggaya dan kemudian dengan ketidak-amanan abad 19 di perairan Indonesia karena perompak-perompak.

Pada tahun 1873, Belanda menempatkan seorang sekretaris untuk urusan pribumi di Buton, yaitu A. Ligtvoet yang pada tahun 1978 menulis *Beschrijvingen en geschiedenis van Buton* dalam Bijdragen T.L. & V. Pada tahun 1911 Sultan Buton, Muhammad Hoesain menandatangani *Korte Verklaring* dengan Belanda.

Penghasilan Buton yang terutama pada jaman Hindia Belanda adalah jagung, kemudian bisa dikatakan Kapok dan Ikan Kering.

Rotan, kayu dan penghasilan seperti tripang, mutiara dan lain-lain diekspor. Di kepulauan luar Pulau Buton sendiri, kopra merupakan penghasil pokok. Pada akhir-akhir ini Jambu Mente merupakan bahan ekspor yang cukup baik. Sedangkan apa yang dikenal sebagai Aspal Buton baru jaman R.I., ternyata aspal Buton tersebut belum digarap, dan dimanfaatkan dengan baik. Malahan ada yang mengatakan lebih baik digarap pada jaman Belanda.

Pengelolaan Aspal Buton berada di bawah wewenang instansi pemerintah yang berkedudukan sebagai salah satu Direktorat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Sebagai bahan ia cukup kuat dan dianggap lebih baik daripada Hot Mix hasil Pertamina yang lebih populer di pasaran menurut penjelasan seorang pejabat Aspal di Buton sendiri. Tapi lucunya justru urusan jalan di Indonesia yang menjadi tanggung-jawab P.U. (baik instansi Pusat maupun Daerah) lebih suka memakai Hot Mix Pertamina, sedangkan hasil mereka sendiri yang dari Buton yang dinyatakan kualitasnya lebih baik, tidak dipergunakan sendiri.

Semoga hal ini berubah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya setelah kunjungan Menteri P.U. sendiri ke Pulau Buton pada bulan Januari 1981 yang lalu.

III. ARSIP KESULTANAN BUTON

Pada kesempatan ini ingin dijelaskan arsip-arsip yang merupakan koleksi perorangan yang diperoleh dari peninggalan/warisan leluhur. Yaitu dari Koleksi arsip yang tersimpan pada satu tempat di kraton Sultan, dengan penanggung jawabnya Bapak Abdul Mulku Zahari.

Berdasar kepada pemiliknya maka koleksi tersebut dapat kita bedakan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Koleksi dari Abdul Mulku Zahari.
2. Koleksi dari Ny. Syamsia Mz.

Berdasarkan jenisnya maka koleksi tersebut dapat kita bedakan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Kelompok arsip Kerajaan, yang menyangkut masalah pemerintahan.
2. Kelompok arsip yang menyangkut masalah agama, adat-istiadat.

Koleksi arsip tersebut meliputi kurun waktu dari awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20.

Koleksi tersebut seluruhnya berjumlah 299 naskah, kalau dihitung secara perlembar mencapai jumlah kurang lebih enam ribu lembar (data yang sementara bisa dikumpulkan).

Koleksi arsip kerajaan terutama berisi masalah-masalah perjanjian dagang, silsilah kerajaan, sejarah kerajaan Wolio, besluit-besluit, undang-undang kerajaan, surat-surat dan sebagainya.

Menurut kabar berita, bekas bangsawan Buton lainnya masih menyimpan warisan arsip. Seperti juga di daerah-daerah lain, arsip yang sejenisnya ini sering masih dianggap sakral dan magis yang dihubungkan dengan faktor supernatural sebagai warisan leluhur. Karena sifatnya yang sedemikian itu, eksistensi arsip ini belum di-terbuka-kan dan sifatnya masih serba tertutup. Di dalam penjagaannya, seringkali diberi informasi bahwa arsip-arsip sudah tidak dimiliki lagi. Tapi bisikan di belakang sering menyebut-nyebut bahwa arsipnya masih ada, hanya tidak mau diberitahukan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.

Hal yang merupakan supernatural ini menjadikan permasalahan arsip kerajaan bernilai spiritual dan sukar dipecahkan secara administratif maupun secara formal. Dalam keadaan yang demikian kita perlu bertindak secara dewasa dan dapat secara bijaksana mengambil berbagai keputusan dalam pemeliharaan peninggalan budaya, terutama menyangkut pelestarian informasinya.

Di dalam melancarkan pembangunan nasional kita membutuhkan kelengkapan informasi lokal di dalam mengidentifikasi nilai-nilai lokal untuk dipertemukan dengan nilai-nilai nasional.¹⁴⁾ Di dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Arsip Nasional sedang merencanakan kegiatan reprogramik dalam bentuk Mikrofilm daripada Arsip untuk melengkapi sumber-sumber penelitian sejarah kebangsaan kita. Dalam waktu dekat arsip-arsip yang dirawat oleh keluarga Pak Abdul Mulku Zahari sudah akan dimikrofilm. Arsip-arsip ini akan sangat bermanfaat dalam melengkapi pemahaman sejarah Buton di dalam konteks Sejarah kebangsaan kita. Sebagai sumber, arsip-arsip tersebut sudah dapat menunjukkan identitas Buton di masa lampau yang dapat dipergunakan dalam berbagai keperluan penelitian serta pengembangan Studi Lingkungan.

14). Mattulada, "Pre-Islamic Soeth Sulawesi". *Dynamics of Indonesian History*. 1978.

Peninggalan arsip daripada administrasi kesultanan Buton menunjukkan beberapa faktor positif bagi kita pada masa kini. Penyelenggaraan administrasi kerajaan Buton bisa dipelajari melalui arsip-arsip tersebut. Di dalam mempelajari administrasi kerajaan tersebut kita mempelajari pula perkembangan masyarakat Buton.

Penelitian sejarah masyarakat yang cenderung ingin menyoroti peradaban ataupun kebudayaannya, seringkali akan lebih menarik apabila pendekatan sumber tidak saja pada peninggalan administratif tapi juga peninggalan budaya, tradisi hidup (the living tradition), tradisi lisan dan benda-benda purbakala. Pertemuan antar berbagai pendekatan ini akan menghasilkan pemahaman masyarakat secara utuh.

Bapak A.M. Zahari telah menyusun suatu Naskah yang belum diterbitkan yang diberi nama "Salinan Surat Menyurat Kerajaan Buton di masa Lampau". Salinan suratini berupa suatu transkripsi ke huruf Latin. Menilik pada tanggalnya, surat-surat tersebut berasal dari abad 18, 19, 20.

Arsip kesultanan Buton ini memuat antara lain :

- Surat-surat mengenai hak waris.
- Surat-surat mengenai jual-beli
- Surat-surat mengenai pembebasan budak
- Surat-surat izin resmi bagi tugas-tugas pejabat
- Surat-surat yang menyangkut etika pergaulan seperti ucapan terima kasih, selamat, berduka-cita dan lain-lain.
- Surat-surat izin untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya.
- Surat-surat keputusan pengadilan dan lain-lain, yang bisa disebutkan sebagai berikut :
 - Surat Sultan La Kopuru membalas surat tanggal 25 Nopember 1795 dari kompeni Walanda.
 - Surat Sultan Muh. Idrus kepada Gubernur di Ujung Pandang dalam hubungan penugasan Sapati Raja Bombonawulu dan teman-temannya.
 - Surat gubernur tanggal 2 Agustus 1983 untuk Sultan Muh. Idrus Kaimudin I.
 - Surat Muh. Idrus tanggal 9 Syawal 1261 H yang dibawa oleh Sekretaris Kerajaan Abdul Khalik.
 - Surat gubernur membalas surat Muh. Idrus tanggal 9 Syawal 1261 H.
 - Jawaban gubernur atas surat Muh. Idrus tanggal 9 Syawal 1261 H sebagai peringatan bagi Abdul Khalik.
 - Pernyataan bersama dari cucu Sapati Baluwu atas warisan uang meja dari Guvernemen Belanda.
 - Surat kerajaan Buton kepada kerajaan Bone tanda turut berduka atas berpulangnya Raja Bone Muhibuzzuddin yang digantikan oleh Sultan Muhibbuddin.
 - Surat pernyataan membebaskan budak dari pribadi Sultan Muh. Idrus.
 - Surat pembelian budak tgl. 25 Syawal 1285 H. di masa Sultan Muh. Isa Kaimuddin II.
 - Surat Kaimuddin III kepada Sultan Ternate mengenai surat Raja To-bungku kepada Buton.

- Surat pembelian suatu daerah lautan tertentu untuk menangkap ikan dan memungut hasil laut seperti teripang dan lain-lain (Hijrah 1297).
- Surat Muh. Umar Kaimuddin IV kepada syarat-Waha tentang kekuasaan untuk menindak kepada mereka yang suka memeras rakyat (Hyjrah 1320).

Perlu diketahui bahwa kepemimpinan Hindia Belanda juga meninggalkan endapan administrasi kepemimpinannya di Buton. Yang tertinggal di Buton sendiri tidak banyak. Pertama-tama, karena pemeliharaan peninggalan arsip ini kurang terjamin. Di samping itu Buton termasuk daerah yang relatif mikro kepentingannya bagi Belanda.

Dengan demikian bisa dimengerti mengapa bisa dikatakan arsip-arsip yang bisa dikumpulkan relatif sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah Tetangganya misalnya Kepulauan Maluku atau Sulawesi Selatan. Secara sporadis arsip-arsip mengenai Buton juga terdapat di kelompok-kelompok yang berada di Pusat (Batavia) ataupun di Daerah Tetangganya seperti Daerah-daerah Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Sunda Kecil. Seperti peneliti, menemukan informasi dengan cara demikian merupakan kegiatan penemuan jejak yang tidak gampang. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa arsip-arsip yang kini berada di Buton baik yang disimpan di kraton maupun yang masih berada di kantor pemerintahan daerah sendiri, merupakan "mutiara" yang tiada nilainya bagi rekonstruksi Sejarah Buton dan sekitarnya.

PEMBERONTAKAN PETANI DI TANGERANG, 1924

Oleh : Didi Suryadi.

1. Pendahuluan.

Dalam usaha memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat dewasa ini sebagai akibat dari pergolakan politik dan perubahan sosial di masa lampau maka studi mengenai gerakan sosial dalam sejarah Indonesia dirasakan makin penting.

Masalah tanah yang menjadi sebab timbulnya keresahan dan pertanahan (Agrarische Wet, 1870) warisan dari masa kolonial seperti yang dimaksud dengan pergolakan politik di atas, sampai kini masalah tanah protes-protes dari petani di beberapa tempat di wilayah Republik Indonesia masih terasa. Perubahan dimensi politik pertanahan di pedesaan mengakibatkan perubahan dalam dimensi ekonomi dan sosial. Perubahan sosial yang dimaksudkan di atas ialah perubahan dalam susunan masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, hubungan masyarakat, kepemimpinan, di dalam masyarakat petani pedesaan, dalam ikatan desa yang sejajar dan ikatan feodal yang tegak lurus sebagai akibat dari perubahan Undang-undang Agraria (1870), yang menempatkan kedudukan masyarakat petani dari pemilik tanah, penggarap tanah menjadi bujang sawah dari tuan tanah partikelir.

Dalam masalah ini dicoba membuat rekonstruksi sejarah dengan mengambil model sebagai sebuah contoh dari sebuah kasus yaitu peristiwa pemberontakan petani di Tangerang (1924), dengan latar belakang perubahan sosial ekonomi dan politik sebagai faktor-faktor kondisional serta akibat yang ditimbulkan dengan maksud untuk menampilkan masyarakat petani bangsa Indonesia sebagai dramatis personae dan peranannya dalam sejarah perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dalam rangka penulisan sejarah Indonesia yang dipandang dari sudut pemandangan Indonesia. Penafsiran kembali sumber-sumber primer dari arsip-arsip dan sumber-sumber sekunder karya-karya sejarawan konvensional dan laporan-laporan para pejabat pemerintah kolonial penting dalam rangka penulisan kembali sejarah Indonesia.

Pada umumnya laporan pejabat pemerintah Hindia Belanda mengenai pemberontakan petani berkisar pada masalah Ratu Adil, Imam Mahdi dan Perang Suci, dimensi sosial ekonomi serta peranan bangsa Indonesia hampir tidak menjadi pokok masalah. Dalam studi kasus mengenai pemberontakan petani di Tangerang (1924). Laporan Resmi pejabat pemerintah yang dijadikan masalah dan sebab kekuatan pendorongnya adalah kepercayaan akan datangnya Ratu Adil.¹⁾ Berbeda dengan laporan pribadi dari R.A.Kern seorang

1). Report over de Tangerangsche Ratoe Adil Beweging, 10 Maart 1924, juga telah dipegunakan oleh Prof.DR. Sartono Kartodirdjo dalam Pergerakan Sosial Dalam Sejarah Indonesia,- Pidato Dies, UGM, 1967.

pejabat (Adviseur voor Indische en Arabische Zaken) yang menyajikan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik sebagai faktor kondisional dalam masyarakat petani di Tangerang sebagai penyebab pemberontakan untuk menuntut pengembalian tanah partikelir.²⁾

Peristiwa Tangerang tahun 1924 seperti umumnya gerakan pemberontakan petani tradisional berlangsung dalam waktu singkat. Kalin bersama pengikutnya petani pada hari Jum'at tanggal 8 Februari berkumpul sebanyak 40 orang di rumah pemimpinnya di Pangkalan.

Pengikut yang hadir itu menyerahkan uang satu gulden tujuh sen yang disimpan di tempat air dan bunga di depan Kalin bersemedi. Esok harinya uang yang tujuh sen dikembalikan kepada para pengikutnya sebagai jimat. Air berbunga ditempat menyimpan uang itu bekas mencuci wayang golek Sena (Bima), Arjuna dan Semar yang dianggap keramat oleh dalang Kalin. Hari Minggu tanggal 10 Februari 1924, pemberontakan petani meletus di bawah pimpinan dalang Kalin seorang petani yang tidak memiliki tanah untuk menuntut pengembalian tanah dari tuan tanah partikelir dan kepada pemerintah Hindia Belanda yang telah menjanjikannya. Gerakan Kalin dimulai dari Pangkalan terhadap pemilik toko Cina, (Thio A. Pang alias Atang), mendatangi rumah penguasa negeri, kemudian ke rumah tanah di kampung Melayu (Him Po Liem) semuanya disuruh pulang sebab kontrak 25 tahun sudah habis, semua pajak, kerjapaka dan kompenian harus dihapus. Kalin kemudian menuju rumah Camat Teluknaga untuk menyatakan kepada Camat bahwa mereka sedang menuju Betawi untuk menghancurkan kota itu. Camat menjamu Kalin bersama pengikutnya minum-minum dan merokok. Siang hari sekitar jam setengah tiga Controleur bersama Komandan Detasemen Polisi dari Nauk dan beberapa polisi setempat datang di Teluknaga. Setelah diadakan tanyajawab antara Kalin dengan pejabat setempat Kalin diliringkan menuju Betawi, tetapi sesampai di Tana Tinggi Kalin jatuh dari pegangan polisi serentak dengan jatuhnya Kalin para pengikutnya menyerang polisi dan terjadilah tembakan-tebakan dari polisi 19 orang dari pemberontak mati dan 23 orang lagi yang luka-luka ditahan.

2) Koleksi R.A.Kern berjudul Onderzoek naar de diepere oorzaken van de gebeurtenissen op 10 Februari 1924 ini penulis menemukannya di Perpustakaan Koninklijk Instituut Voor Taal Land En Volkenkunde, di Leiden dalam kesempatan Penataran Sejarah Tahun 1978-1979 yang diberikan oleh Panitia Pengarah Indonesia-Kerjasama Indonesia Belanda dalam pengembangan Studi Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia. Dari laporan R.A.Kern yang disampaikan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda ini menunjukkan bahwa yang menjadi sebab timbulnya keresahan dan pemberontakan petani di Tangerang yang meletus pada tanggal 10 Februari 1924 itu ialah masalah tanah yang dikuasai tuan tanah partikelir yang kebetulan oleh orang-orang Cina, perubahan politik dijelaskan oleh sebab pengaruh Sarekat Islam di Tangerang sejak 1913.

2. Latar Belakang Sosial Ekonomi.

Dari laporan R.A.Kern kepada Gubenur Jendral Hindia Belanda D.Fock 3) dapat diketahui faktor-faktor sosial ekonomi, politik sebagai penyebab pemberontakan dan dari Van Jagt 4) dapat diungkapkan bagaimana tindakan konvensional dalam memadamkan gerakan petani.

Hampir seluruh daerah Tangerang adalah pesawahan. Pertanian adalah pokok penghidupan penduduk. Tanah di sini subur tetapi pengairan masih jelek dan pembagian penghasilan dari pertanian penduduk tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup penduduk yang padat. Dengan berdagang dan bekerja sebagai kuli adalah usaha penduduk untuk menutupi kekurangan akan keperluan hidup. Karena letak Tangerang berdekatan dengan Betawi menguntungkan bagi penduduk untuk memasarkan hasil bumi mereka, tapi keadaan keterbelakangan jalan-jalan kecil sebagai penghubung tidak dapat memenuhi seperti yang diharapkan. Juga sebagai pasaran kerja kota Tangerang tidak banyak mempunyai arti karena kepadatan penduduk dan penduduk pergi ke Jakarta atau kota-kota lain yang berdekatan. Sebagian besar penduduk berbahasa Sunda hanya di sepanjang pantai berbicara Melayu. Sebagian besar tanah di Tangerang dipergunakan oleh perusahaan tanah swasta yang telah berlangsung sejak masa perusahaan swasta istimewa tanah-tanah orang Cina dan juga penduduk Cina yang luar biasa besarnya jumlahnya di daerah ini. Mereka tinggal tersebar di seluruh daerah Tangerang, di tengah-tengah penduduk dan melakukan pertanian seperti penduduk dan juga berdagang. Adanya petani Cina ini perlu mendapat perhatian untuk memahami masalah sebab-sebab kegelisahan penduduk bumiputera.

Petani pribumi harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen kepada pemilik tanah sebagai cukai. Seperti padi yang telah selesai ditulai dari sawah yang menyerahkannya kepada yang menyewakan tanah. Ini yang berkenaan dengan sawah, sedang yang berkenaan dengan tanah tegalan penyewa harus membayar cuke dengan uang sebagai uang sewa kebun atau ladang. Kerja rodi dikenakan oleh pemilik tanah terhadap penduduk bumiputera dalam mengerjakan pembalkan jalan, jembatan, pengairan, pemugaran batas tanah atau keperluan tuan tanah dan juga jaga malam yang tidak boleh diganti atau dibayar dengan uang, tapi harus dikerjakan sendiri.

Kerja paksa ini menghilangkan kesempatan untuk pekerjaan lain dalam usaha menambah kekurangan keperluan hidup mereka, seperti memotong padi ditempat lain pada musim panen yang upahnya lebih besar dari pada di daerah ini.

-
- 3) Kern,R.A. Onderzoek naar de diepere oorzaken van de gebeurtenissen ini het Tangerangsche op 10 Februari 1924. Nota van waar nemend adviseur voor Inlansche van de gouverneur generaal betreffende de oorzak en van de ongereheldheden in Tangerang op 10 Februari 1924, Koleksi R.A. Kern, KITLV. Stationplein Leiden.
 - 4) Jagt, M.B. van der., de Tangerang Zaak. Koloniaal Tijdschrift 1926, hal. 166-172.

Kerja paksa dari pemilik tanah kepada penyewa tanah yaitu peduduk bumiputra dari tahun ke tahun berpindah kepada anak-anak penyewa tanah dari tanah yang sama. Jika seseorang ingin mengerjakan tanah milik penyewa Cina orang harus membayar uang lebih dahulu yang disebut dengan istilah uang "teko", sedang sebagai pembantu pada tanah pertanian orang pribumi disebut dengan istilah "bujang sawah" atau penyawah, (beoreinabeiders). Kecuali mengusahakan tanah dan pada tanah teko, sebagian besar dari penduduk yang bekerja bukan pada tanah kongsi, yang karena itu penduduk tidak mempunyai hak guna atas tanah milik tuan tanah. Penduduk yang bekerja di atas tanah tuan tanah adalah wajar untuk memberikan sebagian dari pada hasilnya sebanyak 1/5 dari hasil panen padi. Dalam peraturan pemilik tanah harus memberi ternak untuk mengerjakan tanah jadi kira-kira 2/5 jadi cuke seluruhnya bagi penyewah 3/5. Hal ini berlaku di daerah tempat Kalin.

Di Pangkalan yaitu kampung tempat Kalin tinggal tanah itu dibagi ke dalam : Tanah Kongsi 30%, tanah penduduk pribumi 40%, tanah teko orang Cina 30%, jadi orang Cina memiliki 60% dari seluruh daerah Pangkalan dan penduduk hanya memiliki 40%. Ini berarti ± 20% penduduk Cina memiliki tanah 60% dan ± 80% penduduk bumiputra memiliki tanah 40%, jadi rata-rata tanah teko adalah tigakali lebih banyak dari pada milik tanah penduduk pribumi. Dari data-data statistik menunjukkan bahwa petani-petani Cina rata-rata memiliki tanah lebih banyak dari pada penduduk pribumi.

Sebagian dari tanah-tanah orang Cina tidak dikerjakan sendiri oleh mereka tapi disewakan kepada penduduk pribumi. Petani dapat meminjam bibit padi dari pemilik tanah dan kemudian dikembalikan apabila sudah panen padi ditambah gula dengan sedikit cuke yang harus diantarkan kepada pemilik dekat rumahnya yang telah memiliki lumbung padi. Pembelian bibit dapat diberi uangnya dari pemilik tanah tapi pembayarannya harus dengan padi, hal ini bila harga naik yang untung adalah pemilik tanah yang meminjamkan uang untuk bibit. Jadi seluruh tahun kehidupan petani bumiputra yang mengerjakan tanah milik orang Cina bergantung kepada tuan tanah, atau "babah besar", atau kepada "administrateur" yang menyewakan tanah, adalah para penguasa di daerah tanah kongsi dan tanah-tanah babah besar, di atas penduduk pribumi petani. Petani menganggap kepada mereka adalah "yang berkuasa" dan dirasakan oleh petani kekuasaan mereka lebih banyak dari pada kekuasaan Gubernurmen.

Petani tahu bahwa pajak masuk kepada pemilik tanah, mereka tahu bahwa untuk hidup perlu ada ketertiban dan keamanan, tapi tanah dan pajak masuk kepada tuan tanah yang jumlahnya hanya 20% dari jumlah penduduk di daerahnya di Tangerang.

Petani tahu dan merasakan bahwa mengerjakan tanah milik orang Cina kurang aman dan tidak menguntungkan dari pada mengerjakan tanah milik sendiri. Pemasukan pajak lebih lancar dari pedagang dari pada penduduk petani, karena sebagian besar pedagang adalah pula orang Cina di luar pajak perorangan (keluarga), hanya dari pemilik pemilik rumah besar yang tidak menunggak.

3. Pengaruh Sarekat Islam

Sikap penduduk penggarap terhadap tuan tanah dahulu sebelum berdiri

Sarekat Islam adalah baik tidak bersikap memusuhi tuan tanah. Sikap petani penggarap ini berubah setelah adanya pengaruh dari Sarekat Islam setempat Sarekat Islam afdeeling Tangerang didirikan pada tahun 1915, terbentuk dengan bantuan Sarekat Islam dari Betawi.5)

Kesadaran penduduk jadi tinggi kemudian terjadilah perbenturan perbuatan dengan pemerintah dan dengan orang Cina pemilik tanah di Tangerang yang telah berlangsung lama dan mengganggu ketertiban dan keamanan sehari-hari.

Tuan tanah pada umumnya adalah orang-orang Cina dan penggarap adalah penduduk pribumi yang mulai menunjukkan sikap yang berubah. Tuan tanah di Tangerang membagi usaha tanahnya menjadi : cuke, kebun sewaan atau "Kompenian". Beban-beban yang menimpa penggarap pada umumnya tidak seberat yang berlaku pada penduduk petani di tanah-tanah partikelir seperti di Mr Cornelis dan di Buitenzorg. Bahkan penyewaan tanah dengan cara kompenian hanya beberapa saja jumlahnya dapat dihitung dengan jari.

4. Kalin Bapa Kajah

Kalin adalah petani. Ia tidak termasuk kepada kelompok usaha petani yang mengerjakan tanah luas, tapi mengerjakan tanah dari milik orang lain, sebagai bujang sawah atau penyawah, sebagai kuli penyawah dengan mendapat upah harian, sebagai penyewa dari bagian tanah orang. Dia sebagai pengganti pengawas dari tanah A Slong.

Kalin tidak memiliki sawah, pekarang, ladang maupun kebun, ia hanya menumpang mendirikan rumah di atas tanah pekarangan saudara perempuannya Malah. Malah dalam buku tanah sewaan tercatat sebagai penyewa tanah pada tanah kongsi, ia membayar sewa tanah dengan teratur kepada pemilik tanah itu. Kalin bertempat di tanah pekarangan saudara perempuannya Malah tidak dapat diusir. Ia kepada pemilik tanah hanya berutang secara "kompenian", yaitu membayar secara taratur, yang pada tahun 1924 itu masih belum membayar 11/2 tahun, tapi ia tidak diusir oleh pemilik tanah. Tuan tanahnya tidak memperdulikan hal itu. Pemilik tanah Lie Kim Liong terkenal pemilik yang baik di Pangkalan dan ia mendapat tanah warisan dari ayahnya dan mengerjakan huma.

Kalin dahulu bekerja sebagai mandur waluku pada tuan tanah selama tiga tahun lebih dan ia bertengkar dengan bawahannya. Untuk pekerjaan sebagai mandur ditempatkan orang lain. Kalin dilepas dari pekerjaannya, dan mulai tahun 1913 dia menjadi opas pada kecamatan di Teluknaga, tapi ia hanya 3 atau 4 bulan saja. Ia pergi ke Betawi dan disana untuk beberapa bulan menjadi opas pada seorang komisaris polisi.

-
- 5) Mengenal berdiri dan pengaruh S.I. lokal dibahas dalam karya Prof. DR. Sartono Kartodirdjo, Sarekat Islam Lokal, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.7, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1975 dan kemudian pada 1977, Sejarah Islam Lokal di Jawa Barat diterjemahkan oleh Didi Suryadi sebagai laporan untuk memenuhi tugas dari Panitia Pengarah Indonesia-Belanda, Kerjasama Indonesia Belanda untuk Pengembangan Studi Indonesia.

Ketika ia kembali ke kampungnya ia menjadi pembantu seorang dalang wayang golek.⁶⁾ Setelah ia beberapa lama membantu dalang wayang seorang Cina dari Mauk, lama kelamaan ia juga menjadi dalang wayang golek. Kedudukannya dalam masyarakat berubah diantara penduduk petani yang sederhana di kampung tempat tinggalnya, dan mulailah ia dikenal. Sebagai dalang ia terkenal di daerah Kebayuran (MR Cornelis), sebagai dalang wayang golek yang menarik di Tangerang.

Ia sekarang disebut dalang yang berwibawa dan tenang di kampungnya. Kaiin adalah seorang yang setengah baya ketika memasuki dunia pewayangan dari cerita Mahabarata yang membuat ia sangat terkesan dan mendalam baginya terhadap tokoh Arjuna yang menjadi teladan dalam dirinya.

Kira-kira setengah tahun setelah pernikahannya dengan seorang wanita Cina yang di Islamkan (Tan Ten Nio) yang dikenal sebagai Nyonya Banten. Istrinya baik, sebagian besar rumah yang didirikan dibiayainya dan ia memberikan pula wayang golek yang diperlukan oleh Kaiin.

Setelah perkawinannya 4-5 bulan ia menjadi berlainan. Ia berbicara sangat sedikit sekali dari pada biasanya; lebih sering berlatih sebagai dalang Sejauh yang dikenal ia pada tahun 1923 hanya tiga kali mentas di panggung sebagai dalang. Ia lebih banyak bicara mengenai tanah di Pangkalan, dimana ia tinggal dan bahwa tanah itu adalah milik seorang Cina yang secara kenyataan dia bukan orang pribumi katanya. Tanah adalah milik dari nenek moyang kita. Mengapa Kaiin harus tinggal dan menyewa kepada seorang Cina ?

Mengapa Cina disini menjadi kaya mempunyai sawah dan kebun? Kami yang keturunan dari nenek moyang tidak memiliki tanah, kami tetap miskin. Semua tanah adalah milik tuan tanah. Seorang yang ingin memiliki sebidang sawah atau kebun harus menyerahkan hasilnya kepada tuan tanah. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Suatu saat harus lenyap dan orang Cina harus lenyap. Negeri ini adalah negeri kami dan harus kembali kepada kami; "Dari asal pulang ke asal". Kalimat terakhir ini sering dipikirkannya. Kami harus menutut hak kami. Waktunya untuk itu akan datang. Kami akan mencari keadilan Tuan tanah atau tuan Besar di Bogor juga harus tahu bahwa kami "minta mulangkan hak kami kembali". kami tidak akan mendapatkan hak kami dari Tuan Besar, kami harus menyampaikannya kepada Raja Belanda. Kami akan meminta petunjuk jalan buat berhubungan dengan Raja Belanda. Kami akan menyatakan bahwa kami punya tanah telah dirampas.

Itulah pikiran Kaiin yang telah lebih setahun lamanya dan dipercayainya keyakinannya itu. Ia sibuk dan selalu menyatakan semboyannya yaitu "dari asal pulang ke asal". Kepercayaannya terhadap rencana yang tidak mungkin itu harus dilaksanakan dengan hati-hati, tapi Kaiin tetap pada maksudnya semula. Untuk itu ia memerlukan suatu "ilmu".

6) Prof. DR.B. Dahn dalam *The Ratu Adil of Tangerang* menduga Kaiin Bapak Kuyah adalah dalang wayang kulit padahal dalang wayang golek (B.Dahn, Sukarno And The Struggle For Indonesian Independence Cornell University Press, Ithaca and London, 1969 hal. 1 - 20).

4.1. Persiapan Pelaksanaan Rencana Kalin Bapak Kayah

Adapun bermacam cara untuk mencari ilmu. Orang dapat pergi ke seorang guru dengan ajarannya dengan ajaran agama Islam dan hukumnya, yang dapat menuntut orang. Ada pula yang melalui ajaran kebatinan dan mistik, atau kepada seorang yang tahu tentang rahasia-rahasia sebagai alatnya. Itu semua arti dari mencari ilmu.

Kalin dilihat dari ajarannya yaitu ajaran Nabi Muhammad S.A.W. ia termasuk yang tidak mempunyai kepercayaan, ia hanya percaya kepada seorang guru dan dukun. Ia mencari seorang guru yang terkenal supaya ia menjadi kebal terhadap senjata tajam, ia sering pergi kekuburan-kuburan untuk mendapatkan kekuatan, ia bertapa untuk mencapai ilmunya itu. Demikianlah Kalin seperti pada umumnya terdapat dalam masyarakat bumiputra yang masih sederhana cara berfikirnya. Dukun dan guru tidak selalu merupakan alat memperkuat dan dapat lebih dipercaya antara batas yang jelas. Seorang guru terkenal di daerahnya lalah Sairin alias Bapa Tjongkok dari kampungnya Kalin. Sairin adalah dukun untuk pembalas dendam.

Kalin merasa gelisah hatinya. Dan ia sering tinggal seorang diri di rumahnya, oleh karena itu ia sering menyuruh istrinya untuk mendatangkan seorang dukun obat-obatan yaitu Minah. Kalin telah melakukan persiapan yang sungguh-sungguh dan telah banyak mencari ilmu. Ia telah menjadi seorang yang lain dari pada Kalin dahulu sebagai opas dan dalang wayang. Ia sekarang hilang ingatan. Ia jadi keras kepala, ia menuntut panggilan mas dan menolak disebut raden. Ia berpakaian yang lain dari pada biasanya, sering ia memakai serban dan kain sarung. Suatu kali membicarakan rencana nya dengan orang dari Kebayoran.

4.2 Pembantu-pembantu Kalin

Pertama harus disebut Marin dari kampung Parungkored, desa Pondok-bahar, distrik Kebayoran, ia berumur 45 tahun. Di Sekelilingnya masih dapat dilihat ada sebuah kuburan keramat dari cucu Raden Bagong yang dikuburkan di Parungkored, anak dari Ki Reog, yang bangkit dari kuburan sebagai guru mistik. Ki Reog banyak muridnya, juga di daerah Tangerang yang penduduknya sangat menghormatinya. Mereka pepercaya kepadanya, apa yang ia pikirkan kecuali kepada usianya yang tinggi; kepada almarhum ayahnya Raden Bagong. Kuburan Raden Bagong banyak dikunjungi orang-orang dari Tangerang. Pengunjung mengharapkan kekuatan ajalb dari Kramat dan berkahnya dapat mencapai tujuan.

Sairin sebagai guru lebih besar dari Ki Reog. Karena itu Merin datang kepada Sairin untuk memperkuat apa-apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Merin adalah murid dari ayahnya, ia dianggap oleh penduduk juga di luar kampungnya. Merin berada di bawah pengaruh Kalin. Merin banyak membawa orang-orang sekampungnya untuk berkunjung kepada "Pak Dalang". Mereka percaya kepada Kalin dan karena itu Merin dijadikan sebagai propagandis diantara orang-orang di Kebayoran. Merin akan dijadikan raja di tanah partikelir di Pangkalan dan Kampung Melayu. Ia banyak membantu Kalin. Kepercayaan kepada Kalin untuk memulangkan atau melenyapkan orang-orang Cina. Ia percaya tentang kedudukannya yang baik di masa yang akan datang dan lain-lain. Merin sekarang banyak pengaruhnya atas penduduk sekellilingnya dan yang menjadi pengikutnya dan

terutama adalah anggota keluarganya. Merin sering menyebutkan bahwa Jiwa Raden Bagong dari kuburan keramat dari Parungkored telah masuk kepada tubuh "Pak Dalang".

Kelompok kedua pengikut Kalin ialah pengikut Siban bapa Sambut dari kampung Pondok Aren, distrik Kebayuran. Orang ini punya masa lampau yang gelisah. Ia tinggal beberapa tahun yang lalu di Petojo Sawah (Weltevreden), ia adalah seorang penjudi, seorang pencuri yang bertopeng, ia adalah murid Ki Reog, ia bersahabat baik dengan Merin dan mempunyai hubungan darah pula dengan Kaiin.

Ibu Minah dari kampung Kelor, kecamatan Teluknaga (Tangerang) adalah seorang istri setengah baya dari seorang dukun jamu yang terkenal pula di Tangerang. Keahlianya membawa dia berkenalan dengan guru-guru dan banyak dukun di Tangerang dan Meester Cornelis. Ia pula yang membawa Kaiin ke Kramat di Manggadua dan juga berkenalan dengan Sairin bapa Tjongkok dari Cawang. Ia seringkali datang di rumah Kaiin lebih banyak dari pada Merin dan ia yang mengatur bersama Nyonya Banten untuk melakukan jarak ke tempat-tempat suci dan guru-guru terkenal.

Enang, petani dan dukun juga bekas murid dari Ki Reog yang terkenal, ia bersahabat dengan Merin dan juga dengan Kalin dan kepadanya ia memberikan bini piara. Kaiin menaruh perhatian kepada keponakan Enang yaitu Siti yang menjadi istri piaraannya. Enang sering datang kepada pak Dalang dan bersama Merin ia menjadi pula propagandis.

Enang dalam suatu perjalanan mendapat luka dan meninggal.

Haji Riun mendapat perhatian istimewa karena ia adalah guru ngaji Kur'an, ia seorang Haji dan pedagang pula dari hasil bumi. Pada jabatannya sebagai pedagang ia sering pergi ke Bogor dan tempat lain, jadi ia adalah pengembara yang banyak melihat dunia selain kampungnya dari pada penduduk sekampungnya. Ia juga seorang guru tarekat, ia adalah penganjur mistik dan banyak mempunyai murid-murid yang datang ke rumahnya. Sebegini jauh tidak mempunyai permusuhan dengan guru-guru tarekat lainnya. Tapi setelah istrinya yang pertama meninggal timbul kelainan pada dia, ia menjadi pendiam dan penuh rahasia. Hal itu terjadi lima tahun yang telah lalu, jadi jauh sebelum Kaiin menjadi dalang wayang golek dan ketika Kaiin masih tinggal di kampung Ketapang, tanah Cipondah. Untuk kepentingan dagang hasil bumi Haji Riun 21/2 tahun yang lalu pindah ke Kalideres dekat sebuah halte kereta api antara Betawi dan Tangerang. Haji Riun memberikan ilmu tarekat kepada muridnya yang tua dan muda dalam penuh kegelapan malam dan rahasia. Rahasia seni kekebalan dan menghilang. Ini semua sudah tidak lagi dalam bidang tarekat. Hanya oleh bekas murid-muridnya dapat dipahami yang hanya beberapa orang yang tinggal dekat kampung tetangga dengan Kaiin. Tidaklah jelas siapa guru dari Cawang, Sairin alias Tjongkok yang sudah beberapa kali memperkuat Merin dan Kaiin. Ia mengajarkan kepada muridnya ilmu kekebalan dan dapat menghilang tidak dengan tujuan tertentu, tapi pada umumnya sebagai suatu ajaran mistik ialah menjaga diri.

Kejadian dalam masyarakat luas yang berangkat dari pemikirannya dan ia berbicara tentang : keadaan tanah partikelir, pemogokan dalam bermacam cabang dari dinas, pergerakan penduduk pribumi dan pemimpinnya.

Mengenai pengertian ilmu kekebalan dan menghilang bagaimana terjadi dalam pemikiran asli Indonesia. Ia mulai dengan menghilang atau meninggal kan istrinya yang pertama yang naik kelangit.

Haji Riun dan Kailin bersama-sama dapat mengajarkan, bagaimana hal itu tidaklah diketahui. Ia mengatakan bahwa setiap orang pada suatu saat pada waktu yang sama, akan bertemu dengan Sairin dengan guru dari Cawang. Pengikut dari Haji Riun tidaklah menjadi pengikut dari Kailin yang dalam perkembangannya berada di atasnya. Tapi Kailin membawa muridnya dalam rencana yang tertentu dan kelak akan membebaskan tanah partikelir dari Cina kembali kepada penduduk prbumi yang dimulai oleh Kailin.

4.3. Persiapan Terakhir

Ketika Kailin menyatakan telah cukup ilmu dan telah banyak tempat suci dikunjungi, ia telah merasa telah menjadi kuat untuk melaksanakan rencananya. Dia telah membagi orang-orang yang dipercaya dan diperlukannya dan yang ikut, tapi tidak diketemukannya.

Ia hanya mendapat teman yang memberi nasihat supaya hati-hati. Kailin mengemukakan bahwa hari untuk melaksanakan rencananya telah ditetapkan gurunya pada tanggal 3 atau 4 bulan Rajab atau 9 atau 10 Februari 1924.

Pada bulan Januari 1924 diadakan rapat di kampung Parungkored di Kebayuran yang diselenggarakan oleh Merin dan yang kedua di Pangkalan di rumahnya Kailin yang dihadiri juga oleh orang-orang dari Kabayuran. Pada akhir bulan Januari 1924, Kailin dan Merin mendapat surat undangan untuk menghadiri pesta sitanan dari Babah Entong yang telah masuk Islam dan anak tiri dari Kailin. Undangan itu untuk hari Sabtu tanggal 9-10 Februari 1924.

Sudah sejak permulaan bulan Februari banyak tamu-tamu datang dari tempat jauh, yang membawa makanan, ayam, atau buah-buahan. Pada hari yang sama tamu-tamu itu ada yang pulang kembali ke kampungnya terutama yang datang dari Kabayuran. Mereka tidak hanya tertarik pada pesta sitanan saja tetapi ingin pula mendengar perintah terakhir dari Merin, Enang dan Haji Riun sebagaimana rencana Kailin. Mereka yang datang masing-masing mewakili daerahnya. Juga tamu-tamu dari Pangkalan ada yang pulang dahulu ke rumah. Haji Riun nampak di pesta sitanan itu pada tanggal 3 Februari dan juga di rumah Kailin sebentar. Dan hari Kamisnya Haji Riun kembali kerumahnya Kailin bersama-sama teman-temannya kira-kira 15 orang jumlahnya dan tetap tinggal di rumahnya Kailin di Pangkalan. Pada malam Jumat dan Sabtu mereka tidak dapat tidur. Tamu-tamu mendapat kiriman terakhir. Selama selamatan beberapa orang dari tamu-tamu itu mendapat panggilan dari Kailin, Merin atau Enang untuk datang kebelakang serambi yang tertutup. Di sini Merin yang paling banyak bicaranya. Ia mengatakan bahwa Pak Dalang akan diangkat jadi raja di Pangkalan dan kampung Melayu. Orang-orang Cina harus diusir. Dan kontrak menurut hak tuan tanah sudah habis waktunya. Kontrak tanah sudah 25 tahun sekarang sudah tidak perlu lagi ada cuke dan kerjapaska kumpenan. Pak Dalang ingin mengembalikan tanah-tanah dari nenek moyang kita. Tuan Besar akan diminta untuk mengembalikannya. Kita harus pergi ke Bogor pada hari Minggu yang akan dipimpin oleh Pak Dalang yang kebal yang banyak mendapat ajaran dari banyak guru dan telah mengunjungi banyak pekuburan orang-orang suci.

Jika Pak Dalang sudah diangkat jadi raja maka cuke dan kumpenian akan segera lenyap. Haji Riun sekarang hanya duduk berdo'a ke arah Selatan. Pada hari Sabtu malam Merin dan Enang masih hadir dalam pembicaraan. Kaiin memperlihatkan dirinya hanya beberapa kali saja untuk mengenalkan dirinya sebagai calon raja dari pada Malaikulmaut sebagai Saidina Ali. Banyak yang berangkat kemudian kembali dan menghilang.

4.4 Deskripsi Pemberontakan.

Orang-orang yang ikut mengambil bagian dalam perjanjian pemberontakan bersama Kaiin dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut: Kelompok ke I :

1. Kaiin bapa Kayah; 2. Nyonyah Banten, istri dari Kaiin; 3. Babah Entong, anak tiri. Semua orang dari kelompok ini berangkat dari Tanah Tinggi.

Kelompok ke II :

1. Merin; 2. Adim; 3. Rencin, istri Merin; 4. Lioeng; 5. Koentan; 6. Meran; 7. Haji Moh.Adjari, anak dari haji Riun; 8. Kliling; 9. Pidang; 10. Bodo; 11. Sajian; 12. Radi bapa Ramah.

Pengikut nomor 1 sampai 4 ditahan, 5 sampai 6 dalam tahanan kota dan karena luka-luka meninggal, 7 sampai 12 tahanan sementara. Beberapa orang ikut hanya pengaruh Merin.

Orang-orang yang pada waktu pagi dari halaman rumah Kaiin bersama berangkat, 15 orang kembali ke kampungnya masing-masing. Sekarang Kaiin melakukan perjalanan untuk membebaskan tanah dari orang-orang Cina. Sebuah Warung Cina milik Thie A Pang alias Atang di datangi rombongan dan ditangkap oleh Kaiin serta ditegur : "Mau pulang Cina atau kaga?" Setelah menjawab mau, ia dilepaskan dan dibiarkan pergi. Selanjutnya Sahir seorang penduduk bumiputra karena bekerja pada tuan tanah ia ditangkap oleh Kaiin ditangkap dari atas kudanya setelah lebih dahulu dihadang di jalan dan kemudian dianiaya setelah dicaci karena Sahir adalah pembeli padi dari sebuah Kongsi Cina. Masih beberapa yang dianiaya oleh rombongan Kaiin ini. Seorang Cina pegawai dari tanah Pangkalan cepat-cepat pergi memberitahukan polisi. Dengan bantuan polisi Sahir yang ditahan Kaiin dapat dibebaskan dengan mengatakan bahwa : Sahir orang baik bukan orang jahat". Rombongan Kaiin kemudian mendatangi rumah penguasa dan tuan tanah tapi rumah dikunci. Kamar depan dari kantor ini dibongkar tapi ternyata sudah kosong. Para pegawai yang diberi tahu tentang adanya rombongan Kaiin sudah menyembunyikan diri, karena itu Kaiin tidak menemukan, kemudian mereka pergi ke rumah tuan tanah di kampung melayu. Kaiin langsung masuk ke dalam serambi muka rumah administratur Him Po Liem, yang diperingatkan oleh Kaiin supaya datang ke depan menemui Kaiin. Segera Him Po Liem ditanya oleh Kaiin bila ia akan meninggalkan tanah sewaan karena kontrak sudah habis 25 tahun. Him Po Liem menjawab apabila kontrak sudah sampai pada waktunya ia akan meninggalkan tanah sewaan itu. Kaiin pergi ke depan serambi kantor Kongsi disana orang berdiri menunggu perintah tuan tanah. Kaiin bicara kepada mereka bahwa tidak usah lagi bayar kumpenian. Orang Cina bakal diusir dari sini!. Kemudian Kaiin pergi ke depan meja yang banyak surat-suratnya berseri pajak kompenian. Setelah itu Kaiin pergi bersama rombongannya menuju

rumah Camat di Teluknaga. Di rumah Camat rombongan Kaiin dijamu sementara Camat meminta bantuan polisi dari Mauk. Sekira setengah tiga bantuan polisi datang. Selanjutnya mereka pergi menuju arah Betawi untuk menemui Tuan Besar yang dahulu pernah menjanjikan akan mengembalikan tanah-tanah kepada penduduk putribumi. Kepada pengusa dalam perjalannya Kaiin telah menyatakan bahwa telah banyak kesalahan yang terjadi dan dia hari ini datang untuk mengembalikan kebenaran, tetapi di Tanah Tinggi ia jatuh dari pengawalan polisi dan terjadilah pertumpahan darah yang dikenal dengan peristiwa Tangerang 1924.

5. Kesimpulan

Gerakan penduduk memperpolitikkan tanah swasta menurut R.A.Kern karena pengaruh Sarekat Islam tidak diragukan lagi. Kaiin sudah lama memikirkannya sebelum ia mengawini wanita Cina Tan Ten Nio, untuk dibawa dalam hubungan keadaan krisis antara penduduk petani dan tuan-tuan tanah Cina di Tangerang. Di bawah pengaruh keadaan krisis seperti dilukiskan di atas yang dia sendiri terlibat dalam keadaan itu, kemudian muncul dalam pikirannya dibentuk usul-usul perubahan. Dia adalah seorang anak laki-laki dari keluarga petani sederhana, dia sedikit sekali mendapat pendidikan sekolah, pemikiran cara Barat bagi dia merupakan buku yang tertutup, dan pengalaman sistem Islam baginya sangat berpengaruh. Ia adalah orang Indonesia yang sederhana tapi dia menjadi berbeda pandangan terhadap lingkungannya setelah dia mengalami keguncangan jiwanya, suatu pemikiran padanya telah dipegang tidak besar. Ia telah melakukan dan melaksanakan pikirannya, tapi sayang gagal. Untuk itu ia tidak mengharapkan dari yang lain, selain tanah. Rencananya sederhana yaitu pengusiran setiap orang Cina jadi tidak enggan ia melaksanakan rencananya. Para pengikutnya ada di bawah tekanan kepribadiannya, karena ia dianggap dari keluarga lingkungan Raden Bagong di daerah itu.

Dan ia menanamkan kepercayaan pengaruhnya baik ilmu dan kesaktian serta cita-citanya sehingga pengikutnya percaya kepada dia.

Sebagai seorang anak dari daerah pedataran, pemikiran dan pandangan tentang hidup sangat kuat terikat pada tanah dan petani sebagai dasarnya. Bahwa sifat perasaan tajam petaninya menguasai dia. Jiwanya sulit untuk memisahkan antara hak dan kekuasaan, kekuasaan bagi dia adalah untuk dan mengembalikan tanah-tanah dari Cina, dan hak diintefikasikan olehnya dengan perasaan bahwa antara petani dan tanah adalah bersama. "Dari asal pulang ke asal". Itu nampak kepadanya semua begitu sederhana, bahwa dia mencampuri Tuan Besar juga memikirkan semacam itu.

Apa yang mengenal dia orang dapat mengatakan bahwa kemunculannya seperti juga pergerakan lain di negeri tidak ada yang tidak menyedihkan, asli Indonesia, juga cara yang ia lakukan dengan tubuh dan Jiwa kuat untuk permulaan suatu usaha yang besar. Kemungkinan tetap hanya ada sebab ia dalam pergerakan penduduk yang telah sempai pada suatu aksi.

Dari pihak para pengikutnya bolehlah dipastikan Haji Riun. Sebab mereka masih berpegang pada pemikiran lama dari duninya tuntutan-tuntutan kebebasan yang disuarakan oleh Sarekat Islam mengenal kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan pemerintahan dan keadaan masyarakat yang luas dan tanpa akhir di Tangerang yang sampai kepada telinga mereka

tidak dapat mereka tinggalkan. Tetapi bahwa pemerintah Hindia Belanda mengalihkan perhatian permasalahan dari masalah sosial-ekonomi, politik kepada persoalan Gerakan Ratu Adil dari pemberontakan petani membuktikan bagaimana kebijaksanaan ekonomi liberal kolonial dan kegagalan politik etis dengan menimpa faktor penyebabnya adalah pengaruh Sarekat Islam dan dengan membela warga negara kelas dua untuk kepentingan pemasukan uang sewa tanah dan pajak yang dimulai dengan berlakunya Undang-undang Agraria 1870 (Agrarische Wet), tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa penduduk yang menuntut keadilan selalu didasarkan pada dalih untuk ketertiban dan keamanan (Rust en Orde).

Demikian pula pengalaman kehidupan ekonomi yang pahit mendorong pecahnya isolasi cara berfikir masyarakat petani pedesaan yang mengarah ke luar dan untuk mengorganisasikan diri ke dalam gerakan pemberontakan 7) melalui saluran baru, yaitu Organisasi Sarekat Islam 8)

-
- 7) Joel S. Migdal, *Peasants, Politic, and Revolution Pressures toward Political and Social Change In The Third World*, Princeton University Press, 1974.
 - 8) Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1977, Dr.Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, 1970, hal. 31.

SUMBER DAN BIBLIOGRAFI

A. Sumber Arsip.

1. Rapport over de Tangerangsche Ratee Adil Beweging, 10 Maart 1924 (MS), Algemeen Rijksarchief, Den Haag.
2. R.A.Kern, Onderzoek naar diepere oorzaken van de gebeurtenissen in het Tangerangsche op 10 Februari 1924. Nota van Waarnemend adviseur voor Inlandsche en Arabische Zaken aan de Gouverneur General betreffende de oorzaken van de onregelheden in Tangerang op 10 Februari 1924 niet begeleidende brief, 1924, No.F/345; onderwerp; Tangerang, 30 September 1924, Koleksi Perpustakaan Koninklijke Instituut Voor Taal, Land en Volkenkunde, Leiden.

B. Perpustakaan.

1. M.B.van der Jagt. De Tangerangzaak, Kolonial Tijdschrift, 1926, Perpustakaan Koninklijk Instituut Voor Taal, Land En Volkenkunde, Leiden.
2. Sartono Kartodirdjo, Religious Movement of Java In The 19th and 20th centuries, Faculty of Letters, Gajah Mada University, 1970.
3. Sartono Kartodirdjo, Pergerakan Sosial Dalam Sejarah Indonesia Pidato Dies Natalies ke 18 Universitas Gajah Mada, 1967.
4. Barrington Moore Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant In the Making of the modern world, Penguins Books New York, 1977.
5. Eric R.Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century, Faber and Faber 3 Queen Square London, 1971.
6. Joel S. Mogdal. Peasants, Politics And Revolution. Princeton University Press, 1974.
7. Jamer S. Scott, The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence In Southeast Asia, New Haven and London, Yale University, 1978.
8. Donal S.Zagoria, Asian Tenancy Systems and Communist Mobilization of the Peasantry, dalam John Wilson Lewis (ed), Peasant Rebellion & Communist Revolution in Asia, Stanford University Press, 1974;
9. Bernhard Dahm, Sukarno And The Struggle For Indonesian Independence Cornell University Press, Ithaca and London, 1969.
10. Didi Suryadi, Sarekat Islam Lokal Jawa Barat, Laporan Terjemahan Sementara dari Sarekat Islam Lokal, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.7 Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta, 1975. Untuk memenuhi Tugas dari Panitia Pengarah Indonesia-Belanda, Kerjasama Indonesia Belanda untuk Pengembangan Studi Indonesia, 1977.

**KERJA WAJIB NEGARA (HEERENDIENSTEN) DI KARESIDENAN KEDU
PADA ABAD KE 19**
Suatu Bentuk Penindasan Pada Jaman Kolonial
Oleh : AM. Djulieti Siroyo

PENDAHULUAN

Penetrasi kekuasaan Kolonial makin meluas dan mendalam di Indonesia sejak awal abad 19. Perang yang dilakukan Belanda terhadap kekuasaan kerajaan tradisional dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan politik serta memperluas daerah kekuasaan kolonial di seluruh Indonesia. Pemantapan kekuasaan politik baru tercapai setelah menghadapi perlawanan selama satu abad penuh.

Di Jawa dimana kekuasaan politik Belanda telah mulai tertanam sejak pertengahan abad 17 dan terasa mantap setelah Perang Diponegoro (1830), penindasan di bidang ekonomi dapat dilaksanakan lebih instensif. Namun baru pada abad 19 eksplorasi ekonomi meningkat pesat baik dalam keragaman, volume maupun intensitas. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kolonial memerlukan keuangan dan beaya yang makin banyak untuk peperangan yang dilakukan di seluruh Indonesia, untuk membeayai pemerintahannya di Indonesia dan untuk mengisi kas keuangan Negeri Belanda. Salah satu bentuk eksplorasi tersebut adalah Kerja Wajib Negara (Heerendienst, selanjutnya disingkat KWN), yang disamping kerja wajib yang lain-lain merupakan pajak tenaga kerja (dan uang) yang membeayai pemerintah Kolonial serta mendatangkan keuntungan ekonomi Pemerintah Kolonial. Eksplorasi KWN ini mengakibatkan tidak saja kerugian pada rakyat petani tetapi juga merubah tata kehidupan masyarakat desa serta mempengaruhi para pejabat demi kelancaran roda pemerintah kolonial.

Karesidenan Kedu pada abad 19 merupakan salah satu yang paling padat penduduknya. Penelitian mengenai kwn dan kwtp (kerja wajib tanam paksa) yang dilakukan pada akhir abad 19 menyimpulkan bahwa pelaksanaan kwn di Kedu termasuk yang ringan dibandingkan dengan karesidenan-karesidenan lain seperti Surabaya, Pasuruan atau Cirebon¹⁾.

Untuk mengkaji pernyataan ini perlu diteliti faktor-faktor yang menyebabkan berat ringannya kwn. Apakah benar bahwa kwn di Kedu termasuk ringan? Kiranya perlu diteliti dikemukakan suatu gambaran konkret mengenai berat ringannya beban kwn ini, perkembangan pada periode-periode tertentu dimana terdapat peningkatan menonjol, meskipun tidak selalu dapat menemukan data, disamping ketepatan data kwantitatif sering perlu dipertanyakan.

Mengingat kwn dikenakan kepada petani pemilik tanah sawah dan tegal, perlu pula diteliti hubungan perkembangan kwn dengan pemilikan tanah, pendapat petani, kekayaan, struktur kekuasaan, pelapisan masyarakat (Social stratification) pertumbuhan penduduk dan lain-lain. Penting pula mengetahui jenis kwn baik yang ringan maupun yang berat serta reaksi petani menghadapi beban tsb. Akhirnya bagaimanakah sikap dan tindakan Pemerintah Kolonial dalam memperbaiki, mengurangi dan menghapuskan kwn ini demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa sekaligus melancarkan roda pemerintahan dan perekonomian, tanpa banyak merugikan Pemerintah Kolonial.

LATAR BELAKANG KARESIDENAN KEDU PADA ABAD 19

Karesidenan Kedu pada abad 19 hanya meliputi Kabupaten Magelang dan Kabupaten Tamanggung yang sekarang. Sebelum diambil oleh Pemerintah Kolonial pada tahun 1812 merupakan daerah Kerajaan Mataram (Nagaragung), dimana para bupati, pejabat-pejabat kerajaan dan kerabat Raja (sentono) mempunyai tanah apanage (tanah lungguh) di daerah tersebut. Setelah menjadi daerah "gubernemen" (daerah kekuasaan langsung Kolonial) lambat laun disesuaikan dengan tata pemerintahan Kolonial, menjadi 1 Karesidenan dengan 2 Kabupaten, 2 Afdeeling 12 Distrik dan 2856 desa pada tahun 1887²⁾. Terletak di daerah yang dikelilingi gunung-gunung berapi, Kedu merupakan daerah aliran sungai Progo dan Kali Elo dengan tanah dataran tinggi dan perbukitan di sebelah Utara (Kabupaten Temanggung) dan dataran rendah membentang di sebelah Selatan (Kabupaten Magelang). Tanah pada umumnya subur, terutama untuk padi dan tembakau. Pada jaman Tanam Paksa, seluruh distrik ditanami kopi yang merupakan tanam paksa utama dengan hasil cukup baik.

Penduduk Karesidenan Kedu termasuk salah satu yang cukup padat, pada pertengahan abad 19 mencapai kepadatan penduduk 487 per pal² (324 per km²), sedang tahun 1887 untuk Kabupaten Magelang mencapai 1090 per pal² (2 x lipat), untuk Karesidenan Kedu 650 per km²). Jumlah dan kepadatan penduduk turut mempengaruhi berat ringannya *kwn*, sebab dengan jumlah penduduk yang banyak, jumlah petani yang banyak, dapat membagi beban.³⁾ Dari berbagai catatan, angka perkembangan penduduk Kedu nampak tidak teratur⁴⁾. Belum adanya sistem registrasi yang baik menyebabkan para Residen membuat perhitungan kira-kira berdasarkan data dari kepala Distrik. Baru tahun 1866 diadakan sensus di Kedu guna meneliti beban wajib kerja petani. Namun betapapun kurang tepatnya, angka-angka tersebut dapat dipakai untuk gambaran kasar dengan koreksi dari sumber lain. Pada masa Perang Diponegoro melanda seluruh Distrik Karesidenan Kedu (1825-1830) penduduk banyak sekali berkurang. Di 3 Distrik (Magelang, Menoreh dan Bemameh) penduduk berkurang 29.291 orang⁵⁾. Demikian pula pembangunan benteng Willem III di Ambarawa sejak tahun 1832 – + 1850 melibatkan 1200 orang setiap hari untuk *kwn* dan disediakan 46.350 orang setahun.⁶⁾ Juga dikarenakan beratnya kerja wajib tanam paksa (*kwrp* atau *kultuurdiensten*) penduduk banyak berkurang karena melarikan diri atau meninggal karena penyakit/kelaparan antara tahun 1840 - 1850⁷⁾. Periode selanjutnya tidak nampak menurunnya jumlah penduduk secara berarti, bahkan terdapat lonjakan bertambahnya penduduk. Hal ini terutama disebabkan pencatatan yang makin baik dan makin teliti, hingga pencatatan tahun yang lebih muda lebih banyak karena lebih teliti dan lengkap daripada tahun sebelumnya, dan bukan semata-mata bertambahnya penduduk secara menyolok⁸⁾.

Mata pencaharian penduduk adalah bertani, dimana sebagian besar menghasilkan tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri (subsistence crops), sedang sebagian kecil tanaman perdagangan. Tanaman pangan terutama adalah padi. Kedu dari jaman Kerajaan Mataram merupakan penghasil-padi Tanaman ini mengalami perkembangan, baik pertambahan areal sawah, maupun jenis/kualitas padi.⁹⁾ Luas pemilikan tanah petani cenderung makin

sempit, demikian pula luas tanam (tabel 3,4). Ini menunjukkan pendapatan petani makin menurun, khususnya dari sektor padi. Sedang kualitas padi juga menurun, karena makin banyak distrik yang menanam padi nomor 2 (padi *genjah*) yang lebih cepat berbuah (4 bulan, dibandingkan padi no. 1 atau padi *dalem* yang berumur 8 bulan) sejak Tanam Paksa. Tahun 1860 produksi padi *genjah* mencapai 38%.¹⁰ Palawija mengalami pertambahan yang makin pesat, meskipun tidak tercantum luas areal tanaman. Hal ini disebabkan karena palawija pada umumnya hanya untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari dan dapat ditanam baik di pekarangan, tegal, perbukitan, tanah kosong atau sawah. Ketela singkong mulai ditanam secara meluas pada tahun 1830 an, dan makin lama makin banyak dikonsumsi, terutama apabila harga beras menjadi semakin mahal, seperti sekitar tahun 1840 an. Jagung dikembangkan pada tahun 1840 an, pada waktu mana terdapat banyak kelaparan di banyak daerah Tanam Paksa, demikian pula di Kedu.¹¹ Tanaman perdagangan ada pula diusahakan petani, terutama tembakau, dan kopi. Dalam jumlah kecil juga tebu, teh, tarum (indigo). Tembakau merupakan tanaman perdagangan yang sejak jaman pemerintahan Raja-raja Mataram telah ditanam petani Kedu secara bebas dan dijual secara bebas pula kepada Cina. Sebagai pajak petani menyetor 2/5 dari hasil tanaman kepada Raja. Oleh sebab itu ketika pemerintah dan kemudian penguasa swasta akan mengadakan kontrak penanaman dengan penduduk secara paksa, petani menolaknya. Akhirnya tembakau tetap sebagai tanaman bebas milik rakyat. Berlainan dengan kopi. Tanaman ini semula juga merupakan tanaman bebas yang diusahakan petani, sebagai usaha sampingan dengan cara menanami halaman rumahnya atau di kebun-kebun kecil di sekitar rumah (dinamakan *pager koffie*). Karena sejak Semula kopi rakyat dibeli oleh Pemerintah (dengan dipotong pajak 2/5 bagian), maka rencana Pemerintah mengadakan tanam paksa kopi di Kedu tidak menimbulkan banyak protes. Karena kopi pagar rakyat itu juga yang dijadikan tanaman pemerintah, dengan diberikan upah tanam menurut jumlah kopi yang dihasilkan, yang jatuhnya hampir sama dengan harga kopi bebas. Namun tanarn paksa kopi kemudian menjadi beban yang berat bagi rakyat karena kopi pagar harus diperluas sampai 4 juta pohon, harus dibuka kebun-kebun kopi di Tegal dan bukit-bukit yang jauh dari rumah penduduk, angkutan kopi dari kebun ke gudang ditanggung oleh petani sendiri, perawatan dan pemupukan sepanjang tahun yang menghabiskan waktu. Demikian pula dengan Tanam Paksa tarum (indigo) yang menggunakan tanah sawah. Sedang tebu dan teh ternyata tidak cocok ditanam di Kedu hingga Pemerintah kemudian membatalkan kedua tanaman tersebut.

Akibat Tanam paksa maka infra struktur di Karesidenan Kedu bertambah banyak dibangun. Untuk angkutan kopi, indigo dari kebun ke gudang dan dari gudang ke pelabuhan Semarang setiap tahun diperlukan jaringan jalan-jalan yang lebih banyak dan baik, alat angkutan yang cukup guna angkutan hasil bumi dan para pengawas, Kontrolir, Inspektur dan pejabat-pejabat lain yang bertugas mengawasi dan memeriksa kelancaran Tanam Paksa ini. Gedung-gedungpun banyak dibangun, baik gedung-gedung kopi, indigo, teh, garam, pabrik-pabrik indigo, teh, rumah-rumah pejabat, tangsi tentara, setasiun pos dan lain-lain. Maka dapat dikatakan pembangunan Karesidenan Kedu maju pesat sejak awal 1830 an sampai tahun

1860 an. Hal ini meningkatkan **kwn** yang dipikulkan pada bahu petani pemilik tanah dan tegal, dimana **kwn** dianggap satu-satunya cara untuk memperoleh tenaga.

PERKEMBANGAN KERJA WAJIB NEGARA DI KARESIDENAN KEDU: 1840-1890

Kerja wajib negara (**kwn**, heerendiensten) merupakan salah satu jenis kerjawajib perorangan (persoonlijke diensten) yang dituntut Negara sebagai pajak tenaga kerja, khususnya kepada mereka yang memiliki tanah komunal desa. Sistem ini umumnya terdapat pada masyarakat pra industri, dimana tenaga kerja belum dapat dilepaskan dari kerja pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guna pembangunan dan pemeliharaan prasarana, membantu pelaksanaan pemerintahan, pelayanan kepentingan masyarakat dan kepentingan keamanan, pemerintah perlu merekrut tenaga kerja lewat sistem wajibkerja ini. Belum adanya pajak uang secara intensif, sistem kerja upah di sektor non pertanian sebagai usaha nafkah menyebabkan sistem wajibkerja menjadi cara yang paling memungkinkan. Hal ini terjadi pada masyarakat foodal di Asia, Eropa dan di daerah lain, pada masyarakat hidraulik (masyarakat pertanian yang mengembangkan teknologi pengairan) dari kerajaan-kerajaan kuno.¹²

kwn di Karesidenan Kedu telah ada sejak jaman pemerintahan Mataram. Mereka yang dikenakan **kwn** adalah pemilik tanah, yang disebut **kuli kenceng** atau **kuli baku**). Namun belum diperinci golongan petani yang dikenakan wajibkerja dan yang dibebaskan, juga jenis-jenis **kwn** belumlah bermacam-macam seperti pada jaman Kolonial abad 19. Yang termasuk **kwn** pada jaman Mataram adalah **kerig aji**, yaitu kerja membuat dan memperbaiki jalan dan jembatan, **kemit** yaitu kerja menjaga gardu di tepi jalan, dan di rumah-rumah pembesar. Disamping itu ada pekerjaan yang memerlukan penanganan segera misalnya musibah kebakaran, banjir dan sejenisnya. Dalam hal ini dipanggil semua orang laki-laki yang dapat bekerja (wong kuwat) untuk menangani yang dinamakan kerja **gugur gunung**. Suatu perbedaan pokok antara **kerig aji** dan **kwn** Kolonial adalah bahwa kerja **kerig aji** bersifat insidentil. Pekerjaan memelihara dan memperbaiki jembatan dan jalan sangat sedikit serta jarang sekali dilakukan. Jaringan jalan pada waktu itu terbatas dalam bentuk yang paling sederhana, hanya tanah biasa yang dibersihkan dari semak belukar.

kwn jaman Kolonial sebaliknya merupakan pekerjaan tetap, rutin, seperti membersihkan jalan dan saluran air, pasar, gedung-gedung dinas tranport dan sebagainya, yang memerlukan sejumlah orang setiap hari atau hari-hari tertentu sepanjang tahun (bijzonder diensten). Disamping itu masih ada pekerjaan yang dilakukan secara insidentil, misalnya perbaikan jalan dan jembatan setahun sekali atau perbaikan besar bila terdapat kerusakan, yang melibatkan semua pelaksana **kwn** (algemeene diensten).

Hanya kerja **kemit** atau **jaga** dan kerja **pancen** atau pelayanan pribadi kepada seorang pembesar/kepala yang merupakan pekerjaan rutin, baik jaman Mataram maupun Jaman Kolonial. Kerjawajib pada Jaman Mataram lebih dititik beratkan kepada pelayanan kepentingan pribadi sehingga tidak perlu melibatkan orang terlalu banyak, sedangkan kerjawajib Jaman Kolonial lebih

mementingkan bidang pekerjaan umum dan pelayanan umum, karenanya menuntut jumlah orang yang jauh lebih banyak dan bersifat rutin. Hal ini saja telah jelas menunjukkan beban yang lebih berat bagi pelaksana *kwn* pada Jaman Kolonial.

Dasar-dasar dan pelaksanaan *kwn* lebih jelas dan terperinci pada Jaman Kolonial abad 19, seperti yang terdapat di Karesidenan Kedu (14). Pemikul beban *kwn* adalah *kuli kenceng/kuli baku*, yaitu orang yang mempunyai hak memperoleh bagian tanah desa. *Indung* atau *Pengindung*, adalah orang yang hanya memiliki pekarangan dan rumah, hanya membantu *kwn* apabila diperlukan tenaga lebih banyak dalam melaksanakan *kwn*. Sedang *Tempel* yang hanya memiliki rumah diatas tanah milik orang lain, tidak dikenakan *kwin*. Ke tiga golongan tersebut dikenakan *wajib kerja desa [kwd]*, yaitu kewajiban untuk memelihara prasarana di desanya, memelihara pengairan, juga gardu desa. Disamping itu ada sebagian penduduk desa yang dibebaskan dari *kwn*, yaitu mereka yang terpandang di desa, yang dianggap masuk golongan atas dan golongan yang memerintah : Kepala Desa [*Bekej*], Pamong desa (prabot), para pegawai Negeri dan pensiunan pegawai negeri dan pensiunan militer, pensiunan Lurah, Haji dan guru agama, para Sentono (kerabat raja). Disamping mereka yang terkemuka, mereka yang dibebaskan adalah mereka yang dianggap tidak mampu, baik secara ekonomis: *Mondok Glosor* (menumpang di rumah orang lain, tetapi mempunyai nafkah sendiri), *Mondok Menumpang* (menumpang dan bekerja untuk tuan rumah) *Ngenger* (seluruhnya ditanggung tuan rumah), *Perjoko* (jejaka), demikian pula yang tidak mampu secara fisik : anak-anak, orang jompo, orang cacat, janda (kadang-kadang tidak dibebaskan). Dengan demikian beban paling berat dipikul oleh petani pemilik tanah desa, yang meliputi sebagian besar petani di Kedu.

Jenis-jenis *kwn* berkembang makin banyak pada jaman Kolonial, karena Belanda dalam rangka memperluas administrasi pemerintahan, mengintensifkan pajak dan pendapatan Negara menggunakan satu-satunya bentuk hubungan kerja yang sudah ada, yaitu kerja wajib. Pada pokoknya *kwn* dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu memelihara dan memperbaiki jalan jembatan dan bangunan pengairan, kerja menjaga lingkungan di gardu-gardu tepi jalan, di rumah-rumah pejabat, gedung-gedung kantor pemerintah, gudang-gudang, pabrik, pasar, stasiun dinas angkutan, setasiun pos. Selanjutnya adalah dinas pengawalan para tahanan, pengawalan angkutan, pengambilan uang negara dan lain-lain, bermacam-macam kerja kuli, baik di pabrik, pekerjaan bangunan, penebangan kayu dan sejenisnya. Selain itu *kwn* juga dalam pelaksanaannya dibagi dalam pekerjaan-pekerjaan rutin setiap hari atau beberapa hari sekali (*bijzondere diensten*) seperti kerja pemeliharaan dan kerja jaga dimana sejumlah orang tertentu bekerja secara bergilir sepanjang tahun. Disamping itu ada pekerjaan yang dikerjakan secara serentak atau dalam jumlah besar dimana semua orang (sebagian besar, menurut kebutuhan) harus bekerja, misalnya perbaikan jalan dan jembatan dan pengairan, pembuatan jalan baru, jembatan baru, gedung, penebangan pohon dan pengangkutannya dan sebagainya. Kerja pelayanan kepada pejabat (*pancendiensten*) sampai pertengahan abad 19 masih termasuk *kwn*, setelah itu tidak dimasukkan lagi dalam daftar *kwn*.

Perkembangan dari peningkatan jenis dan volume kerja *kwn* makin besar di Kedu sesuai dengan meningkatnya kebutuhan pemerintahan Kolonial akan tenaga kerja. Peningkatan pertama secara besar-besaran terjadi pada waktu Perang Diponegoro (1825 - 1830). Perang yang melanda seluruh distrik dan sebagian besar desa-desa di Kedu menghabiskan puluhan ribu orang mati baik karena terbunuh, kelaparan dan beratnya *kwn*. Rakyat dikerahkan besar-besaran untuk *kwn* mengangkut perbekalan dan persenjataan tentara Kolonial, membersihkan dan memperbaiki jalan dan jembatan, membuat barikade dan benteng pertahanan, tanpa mereka sempat menggarap sawahnya, hingga terjadi kelaparan.¹⁵⁾ Setelah perang selesai rakyat kembali dibebani pekerjaan wajib tanam paksa, dimana Kedu dipilih untuk wajib tanam kopi, tebu (segera dihapuskan karena merugikan), tarum (indigo) dan teh. Proyek Tanam Paksa meningkatkan volume kerja wajib berlipat ganda, karena disamping proyek ini menciptakan wajib kerja baru yaitu wajib kerja tanam paksa (*kwtp*, Kultuurdiensten) yang juga dibebankan pada pelaksanaan *kwn* sebagai pemilik tanah, jaringan jalan-jalan diperluas untuk mencapai kebun-kebun kopi, untuk angkutan hasil tanam paksa ke gudang-gudang, angkutan ke pelabuhan Semarang. Jalan dan jembatan perlu diperbaiki mutunya, diperlebar dan dipelihara secara lebih rutin. Dibutuhkan lebih banyak gudang, pabrik, pesanggrahan, gardu jaga. Lebih banyak dibutuhkan pejabat yang bertugas membina (mengawasi dan melaksanakan proyek ini seperti Kontrolir, petugas pembukuan, Mantri kopi, indigo, mandor, yang berarti bertambahnya perumahan pegawai, kereta-kereta untuk turne, kuda tunggangan, setasiun pos/setasiun angkutan dan, gerobak angkutan barang/hasil tanam paksa dan sebagainya. Semua pembangunan tersebut sebagian besar langsung dibeayai rakyat. Pemerintah Kolonial tidak membeayai tenaga kasar karena sudah menggunakan *kwn*. Pembayaran untuk upah kuli hanya diberikan untuk sebagian pembangunan jembatan dan bangunan pengairan yang baru sejak tahun 1859 oleh Dinas Pengairan (Waterstatt) diberi upah antara 5 - 10 duiten (4 - 7 sen) sehari, dimana harga beras waktu itu kira-kira 5 - 8 sen per kilogram.

Antara tahun 1830-an sampai 1860-an jaringan jalan di Karesidenan Kedu bertambah 2 kali lipat. Pada tahun 1870 terdapat jaringan jalan sepanjang 144 pal (216 km), tahun 1889 telah menjadi 801 km se Karesidenan Kedu. Terdapat 3 macam jalan : a. Jalan Pos Besar, jalan terbaik, lebar 9 – 191 elo (9 m), diperkeras dengan fondasi batu dan diratakan serta diberi lapisan kerikil. Jalan ini khusus untuk lewat para pembesar berkereta kuda, untuk orang-orang Belanda dan Bupati dan kereta pos.

- b. Jalan dari kota distrik ke gudang-gudang, lebih kecil, diperkeras dengan batu dan tanah untuk lewat para pengawas kebun dan pengangkutan hasil tanam paksa.
- c. Jalan kuda, jalan tanah berumput untuk lewat kuda dan orang pribumi pejalan kaki.

Disamping itu masih banyak jalan desa yang kecil-kecil yang tidak tertera dalam peta, tak diketahui panjangnya.

Selain itu jembatan ditambah dan ditingkatkan. Selama 30 tahun (1838 - 1869) telah dibangun atau diperbaiki sebanyak 55 buah jembatan yang ber-

ukuran panjang antara 4 - 41 elo (36,9 m) dan lebar 5 - 10 elo (4 - 9 m). Pada tahun 1870 ada 74 buah jembatan di Kedu, 30% terbuat dari kayu, dan batu, 66% terbuat dari kayu, dan 4% dari besi, kayu dan batu (Amerikaanschebrug) Pembuatan dan perbaikan jembatan memerlukan kayu jati yang sampai tahun 1860 belum dapat dihasilkan oleh daerah Kedu sendiri, hingga harus diambil dari hutan jati di Karesidenan Semarang. *Kwn* tebang kayu [blandong] dan angkutan kayu merupakan salah satu yang terberat karena sangat jauhnya hutan dari rumah para kuli kenceng, tidak disediakan penginapan atau makan, hanya diberi upah seharga 1 kg beras/hari. Mereka bekerja kira-kira 1 minggu terus-menerus, kemudian digilir kelompok berikut. Setahun kira-kira 34 hari kerja setiap pelaksana *Kwn* yang bertugas khusus blandong.

Saluran air diperluas sejak tahun 1837. Perluasan saluran pengairan adalah untuk pengairan sawah, baik sawah yang sudah ada maupun sawah-sawah baru yang dibuka karena pertambahan penduduk, disamping juga untuk mengairai kebun tarum, tembakau dan tebu. Tahun 1870 terdapat 58 buah saluran air yang mengairai 82.775 bau sawah (57.942 Ha). Setelah 1870 sawah hampir tidak bertambah.

Bila pada Jaman Mataram masih sangat sedikit gedung-gedung Pemerintah, dan dari bahan yang sederhana (kayu, sedikit batu), maka pada Jaman Kolonial dibangun banyak gedung untuk kediaman Residen, Pengadilan, penjara, rumah sakit, tangsi, pasar, benteng dan sebagainya. Pada tahun 1848 di Karesidenan Kedu terdapat bangunan gedung sebagai berikut :17)

Gedung-gedung	:108 buah
gudang kopi	:13 buah
pabrik indigo	:8 buah
pasangrahan	:13 buah
setasiun pos	: 10 buah

gardu jaga di tepijalan : 110 buah (dari kayu dan bambu).

Jumlah 262 buah.

Pada tahun 1887 gedung kopi bertambah 100 ½ (26 buah) dan gardu jaga naik 137 ½ (261 buah).

Gambaran pertambahan prasarana dan gedung-gedung ini memberi gambaran betapa luas dan banyaknya pekerjaan *kwn*. Masih ditambah dengan kerja pemeliharaan dan penjagaan, pengawalan dan lain-lain. Bila tahun 1848 tercatat 11 macam *kwn*, maka tahun 1858 terdapat 24 macam kerja *kwn*. Tetapi pada tahun 1887 (30 tahun) tinggal 5 buah yang pokok dan kira-kira 5 buah yang insidentil.¹⁸⁾

Untuk mengukur banyak beban dipakai perhitungan jumlah harikerja per tahun (dagdiensten) baik untuk semua pelaksana *kwn* maupun untuk seorang. Meskipun data masih jauh dari tepat dan lepas-lepas, apalagi sebelum tahun 1848 belum dicatat *kwn* secara teratur, tetapi berguna untuk gambaran yang lebih konkret. Tabel 9 menunjukkan jumlah pelaksana *kwn* telah mencapai lebih dari 75 ribu keluarga (hiusgezinien) atau 90 ½ dari seluruh keluarga petani. Rata-rata harikerja (hk) per orang 17,5 hk per tahun. Angka ini melonjak tahun 1858 dengan 40hk/ tahun per orang dan turun kembali

menjadi 18 hk tahun 1885. Mungkin juga angka 1848 jauh kurang daripada keadaan yang sesungguhnya karena belum banyak diadakan penelitian Jenis kwn juga lebih sedikit tahun 1848 (11 macam) padahal Tanam Paksa dan pembangunan fisik telah lama berjalan. Tahun 1885 memang kwn telah banyak jenis yang dihapuskan dan pada waktu itu dan tahun-tahun berikutnya khusus diadakan penelitian mengenai kwn di Kedu, hingga ketepatan data lebih baik.

Selain satu kwn yang paling berat adalah pemeliharaan dan perbaikan jalan, karena beayanya paling mahal dan tenaga paling banyak dibutuhkan serta sifatnya yang rutin. Mulai dari membersihkan jalan, mengumpulkan dan mengangkut kerikil, menanam pagar hidup dan memotong rumput di tepi jalan, dan perbaikan setahun sekali (dahulu 2 kali) baik tenaga maupun beaya dibebankan seluruhnya kepada rakyat/pelaksana kwn. Untuk meringankan beban tersebut maka kwn jalan selalu dibebankan kepada orang dalam jumlah yang besar. Bahkan pada tahun 1845 seluruh pelaksana kwn (75.000 orang) dibebani. Dengan demikian beban setiap pelaksana, baik dalam bentuk uang maupun tenaga dapat dibagi rata dan menjadi lebih ringan¹⁹⁾. Pada tahun-tahun selanjutnya kwn jalan selalu dibebankan kepada semua pelaksana kwn. Betapa beratnya pemeliharaan dan perbaikan jalan dapat digambarkan bila setiap tahun harus diangkat kira-kira 750.000 kg kopi ke gudang-gudang, dan dari sana diangkut dengan gerobak lembu ke pelabuhan Semarang. Diperlukan waktu 10 bulan untuk menyelesaikan angkutan tersebut¹⁹⁾. Disamping itu para pembesar : Inspektur pertanian, Residen, Kontrolir sering mengadakan peninjauan dan pengawasan di kebun-kebun Tanam Paksa dengan menggunakan kereta dan kuda. Maka dinas angkutan memerlukan kwn angkutan (gladak) yang mengurus kereta dan membantu kusir, disamping tenaga pemelihara kuda (gamel) membersihkan kandang dan setasiun transpor. Sampai tahun 1844 penyediaan transport baik kereta, kuda rumput dan lain-lain masih dibebankan kepada pelaksana kwn dan beberapa desa tertentu menyediakan transportasi tersebut tanpa beaya dari Pemerintah. Kwn untuk ini disediakan 2000 orang. Baru kira-kira tahun 1850 dinas transpor pejabat ditanggung pemerintah atau merupakan usaha swasta yang mendapat imbalan uang. Kwn juga gardu malam dirasa paling berat oleh sebagian orang, karena harus berjaga malam hari, sedang siang hari mereka bekerja bertani.

Kwn yang paling berat dirasakan rakyat mungkin kerja membangun benteng Willem III di Ambarawa yang memakan waktu 17 tahun. Karena jumlah setiap hari sampai 1200 orang, maka direkrut orang dari desa-desa yang sangat jauh juga dari tempat itu, disamping dari desa-desa yang dekat. Mereka harus berjalan berpuluhan puluh pal, bekerja disana sampai 10 hari kemudian pulang. Kelak berangkat lagi bila telah sampai lagi padagilirannya. Untuk pekerjaan ini diberikan upah 15 sen sehari. Meskipun upah itu termasuk tinggi tetapi dengan tempat yang begitu jauh tanpa fasilitas apapun dan harus bekerja terus menerus merupakan penderitaan berat bagi petani yang masih mempunyai sawah untuk digarap²⁰⁾. Laporan-laporan menyebutkan banyak orang Kedu melarikan diri hingga penduduk banyak berkurang sekitar tahun 1840-1848. Maka Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengurangi jumlah kwn hingga 700 setiap harinya dengan tambahan upah 25 sen sehari²⁰⁾.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kwn dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk dan jumlah pemilik tanah di suatu daerah. Karena kewajiban kwn hanya dibebankan kepada pemilik/pemakai tanah, maka jumlah pemilik yang banyak akan dapat membagi beban kwn. hingga menjadi ringan daripada jumlah petani pemilik yang lebih sedikit. Namun dengan adanya jumlah penduduk yang banyak berarti mempunyai tenaga kerja yang banyak. Apabila pekerjaan terlalu banyak seorang petani pemilik dapat meminta seorang tenaga kerja menggantikan dirinya (jagul). Ini terjadi pada petani kaya biasanya.
- b. Jarak tempat kerja kwn dari rumah pelaksana kwn. Jarak yang jauh berarti memakan waktu yang banyak untuk perjalanan. Para petani lebih suka bekerja 4 - 5 jam sehari untuk kwn, agar ia masih mempunyai waktu untuk mengerjakan atau menengok sawah/ladangnya, meskipun untuk itu ia harus datang 2 hari (misalnya memperbaiki jalan yang jam kerjanya 10 jam/hari). Jarak yang jauh akan menghilangkan kesempatan petani untuk bekerja pada usaha taninya. Kenyataan di Kedu menunjukkan bahwa 1635 desa atau 48% dari desa-desa terletak lebih dari 4 km dari tempat-tempat kerja kwn, hingga jelas bahwa kwn cukup berat. Seperti juga wajib kerja tanam paksa kopi yang dianggap oleh Pemerintah tidak berat karena merupakan kopi pagar yang ditanam di halaman rumah Kenyataannya 860 desa kopi terletak pada jarak lebih dari 4 km dari rumah penduduk, karena 1/3 areal kopi berupa kebun-kebun yang jauh dari rumah. Hal ini turut menyebabkan makin beratnya kwtp kopi.
- c. Adanya proyek Tanam Paksa di daerah tersebut. Adanya proyek ini menyerap pelaksana kwn dalam jumlah yang sangat besar. Pekerjaan yang makin intensif di kebun-kebun mengakibatkan petani dibebaskan sebagian tugas kwn atau diberi keringanan. Maka tugas yang seharusnya mereka kerjakan terpaksa dibebankan kepada pelaksana lainnya. Ini berarti menambah beban kepada yang lain.

AKIBAT AKIBAT PENINGKATAN KWN

Tidak dapat disangkal bahwa meningkatnya *kwn* akibat Tanam Paksa dan proyek pembangunan benteng dan perluasan jalan dan jembatan menjadi beban berat yang harus dipikul petani dan masyarakat desa turut merasakannya. Sebagai manusia yang ingin mempertahankan hidupnya dan ingin sejahtera, mereka menghadapi beban itu dengan berbagai cara. Salah satu reaksi yang paling cepat dilakukan adalah mengadakan protes. Namun suatu gejala yang umum di semua Karesidenan adalah bahwa gerakan protes dalam bentuk kekerasan hampir tak pernah terjadi. Yang ada ialah pengiriman satu delegasi besar petani yang mendatangi rumah Residen, menyampaikan keinginan agar Tanam Paksa dikurangi di desanya. Hal seperti inipun terjadi di Distrik Menoreh sekitar tahun 1840 an, ketika Distrik tersebut digunakan untuk Tanam Paksa Tarum (indigo). Masalahnya tanah yang digunakan untuk tarum tidak hanya tanah komunal yang dipakai rakyat, tetapi juga tanah milik individual (tanah Yasan) dipakai. Apalagi tarum merupakan tanaman yang

merusak tanah karena banyak sekali menghisap kesuburan Delegasi petani Menoreh yang menghadap Residen akhirnya mendapatkan penyelesaian dengan cara mengurangi areal tanah untuk indigo hingga beban sedikit dikurangi. Sejak itu tidak terdengar lagi gerakan protes terbuka. Hal ini mungkin disebabkan karena Kepala Desa (Bekel) mendapat lebih banyak kekuasaan untuk mengatur tanah dan petani pelaksana *kwn*. Apalagi Kepala mendapat keuntungan dari hasil Tanam Paksa, hingga makin kuat ikatan keatas. Maka lebih terlihat bentuk protes yang lain, yang tidak terbuka. Antara lain dengan cara memperlambat pelaksanaan pekerjaan. Misalnya ketika rakyat harus menanam kopi sebanyak 2 juta pohon baik kopi pagar maupun membuka kebun kebun baru, rakyat tidak segera melaksanakannya, hingga setelah 2 tahun target tersebut belum tercapai. Pernyataan proter yang lain adalah melarikan diri (minggat), mencari daerah lain dimana *kwn* dan *kwtp* lebih ringan. Terutama juga ketika pembangunan benteng Ambarawa.²²⁾

Akibat lain yang juga menarik adalah bertambahnya desa dan dukuh secara menyolok pada abad 19 seperti nampak pada tabel 2. Pertambahan yang paling menyolok adalah tahun 1834, yaitu lebih dari 1000 dalam waktu 12 tahun. Pertambahan yang sebenarnya mungkin baru terjadi sejak 1830, karena sebelum itu seluruh Kedu sedang dilanda perang. Kenaikan tersebut bersamaan dengan mulainya tanam paksa kopi. Kenaikan ini berlangsung terus sampai tahun 1845, kemudian agak menurun. Di satu pihak perluasan tanaman kopi berarti memperluas areal tanah pertanian, hingga untuk efisiesi kerja mereka membuka dukuh dan desa baru untuk lebih dekat dengan kebun kopi. Di segi lain adalah kesengajaan memperbanyak jumlah desa dan dukuh. Dengan bertambahnya desa dan dukuh maka diperlukan Bekel dan Prabot Desa bau yang jumlahnya mencapai 20½ dari jumlah pelaksana *kwn*. Lurah dan Pamong dibebaskan dari *kwn*. Dengan demikian mereka yang di desa baru atau dukuh berhasil menjadi Bekel atau Prabot, memperoleh pembebasan *kwn* bebas membayar pajak kepala dan beberapa keuntungan kecil-kecil lainnya.

Dengan kebutuhan pelaksanaan *kwn* yang makin meningkat, jumlah mereka harus diperbanyak. Satu-satunya cara untuk menambahnya adalah dengan menambah jumlah pemilik tanah. Maka pada waktu Tanam Paksa dimulai dan *kwn* makin meningkat, terjadi pembagian kembali tanah-tanah desa diantara jumlah orang yang lebih banyak. Tetapi adat yang berlaku di Kedu adalah pemilik tanah desa dengan pembagian yang bersifat tetap. Hingga sekali diberi bagian tanah oleh desa, ia akan tetap memiliki haknya sampai meninggal, dan diteruskan kepada anaknya laki-laki. Pembagian tanah secara periodik nampaknya hanya terjadi dalam keadaan yang terpaksa.²³⁾ Cara lain adalah memberikan sepotong tanah milik petani kepada suatu keluarga agar menjadi pelaksana *kwn*. Hal ini terjadi terutama sebelum tahun 1860.

Meningkatnya pekerjaan *kwn* lambat laun makin memperkokoh dan makin menguatkan kekuasaan Bekel dan Pemerintah Desa. Baik tenaga *kwn* maupun Tanam Paksa bertumpu pada petani dan tanah. Dengan makin dikuasainya tenaga dan tanah ini untuk kepentingan Negara, maka Pemerintah hanya dapat melakukannya lewat Bekel. Dengan demikian Bekel mempunyai kekuasaan penuh terhadap pengaturan tanah dan tenaga rakyat desa.

Dengan pendapatan yang makin banyak dari tanah bengkok yang besar, pendapatan lain dari Tanam Paksa dan uang pengganti bagi pelaksana *kwn* yang berhalangan, maka sebagian Bekel menjadi makin kaya. Bekel beserta para Prabot (Pamong desa) yang kebanyakan adalah kerabatnya sendiri merupakan lapisan atas masyarakat yang jauh lebih baik keadaannya daripada petani biasa pada umumnya, dan proses ini makin mempertajam perbedaan golongan atas dan lapisan bawah desa, yang terdiri dari petani pemilik tanah sempit dan mereka yang tidak bertanah.

KERJA WAJIB NEGARA, TANAM PAKSA DAN PROSES KEMELARATAN.

Bermacam-macam *kwn* yang dibebankan kepada petani pemilik merupakan pengorbanan tenaga dan waktu petani yang berharga untuk petani secara sangat tidak efisien. Terlalu banyak dikerakannya tenaga orang dan waktu untuk pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh paling sedikit setengah jumlah tersebut. Meskipun secara statistik rata-rata hari kerja petani tidak banyak, 17,5 *hk/tahun* (1848), 40 *hk/th* (1858) dan turun jadi 18 *kh/th* (1885) dalam kenyataan jauh lebih berat (periksa tabel 9). Dalam Peraturan Pemerintah (1885 no. 211 Artikel 2) jam kerja sehari adalah 12 jam. Tetapi umumnya memilih paling banyak 5 jam saja, hingga dia harus bekerja 2 hari. Sehingga jumlah 17,5 *hk/th* tidak berarti ia hanya datang bekerja 17,5 kali (17,5 hari). Dari catatan seorang Kontrolir di Karesidenan Bagelen mengenai penggunaan waktu sehari-hari seorang petani diketahui bahwa petani bekerja *kwn* sebanyak 29 kali/hari dalam setahun, antara 3 sampai 12 jam seharinya. Total 125 jam atau rata-rata 4 jam selama 29 hari, untuk *kwn* jalan dan pengairan 24). Kiranya cara ini tidak jauh berbeda dengan petani di Kedu. Selain *kwn*, seorang pelaksana *kwn* juga harus bekerja untuk Tanam Paksa (*kwtp*), untuk desa (*kwd*). Di Distrik Magelang jumlah hari kerja untuk setiap pelaksana adalah 24 *hk* untuk *kwn* dan 123 *hk* untuk *kwn* atau seluruhnya 147 *hk/th*.

Disamping itu petani harus membayar beaya material perbaikan jalan yang ditarik dari seluruh pelaksana *kwn*, per orang per tahun f1,-. Untuk segala jenis pajak rata-rata per petani per tahun f15,- 25).

Dengan makin meningkatnya *kwn* karena Tanam Paksa waktu untuk menggarap tanaman pangan lebih sedikit, areal tanam berkurang, hingga makin banyak ditanam padi mutu rendah dan palawija. Akibatnya mutu gizi petani merosot, hal mana mengakibatkan berkurangnya tenaga, daya tahan tubuh terhadap penyakit dan aktivitas hidup. Diperlukannya tenaga *kwn* yang makin banyak turut menyebabkan proses pemilikan tanah yang makin kecil karena dibagi dengan keluarga lain yang tak bertanah agar menjadi tugas *kwn* pula. Dalam tabel 3 dan 4 tampak bahwa baik pemilikan tanah maupun luas tanam makin menurun selama abad 19.

Kwn berhasil melatih tenaga kerja pertanian untuk pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan masyarakat non pertanian yang berkembang, tetapi justru tidak menyalurkan kelebihan tenaga kerja pertanian ke sektor lain, karena justru yang dikenakan wajib adalah petani pemilik dan bukan buruh tani.

Kwn dan *kwtp* sangat mempengaruhi proses kemiskinan petani di Kedu pada akhir abad 19 seperti disebutkan dalam semua laporan Kolonial, karena

pendapatan petani yang makin kecil akibat tekanan penduduk, makin dikurangi dalam bentuk sumbangan tenaga dan waktu, dan pajak uang tinggi.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOLONIAL MENGENAI KWN

Sistem *kwn* merupakan sistem hubungan kerja tradisional yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan dan keuntungan ekonomi. Sejak semula Pemerintah telah meletakkan kebijaksanaan keuangan yang ketat. Demi menghasilkan pemasukan Negara yang sebanyak-banyaknya maka pengeluaran Pemerintah untuk daerah Koloni ditekan serendah-rendahnya, khususnya untuk pembeayaan pemerintahan pribumi. *Kwn* merupakan penghematan yang sangat besar. Apalagi dipikul secara bersama-sama oleh penduduk Jawa yang padat ini terasa tidak begitu menindas. Kepala-kepala/ pejabat pribumi tidak digaji sepenuhnya dengan uang, karena akan sangat besar bila harus menyesuaikan dengan gaya hidup kepala pribumi yang feodalistik dan sangat konsumtif. Maka tradisi memberikan tanah jabatan tetap dilanjutkan. Bahkan masih ditambah dengan jumlah *pancen*, yaitu wajib kerja pelayanan pribadi pejabat, (dulu masuk *kwn* yang jumlahnya jauh lebih besar daripada jaman Mataram (80 orang per hari). Kebijaksanaan ini mulai berubah ketika keadaan petani Jawa semakin tertindas akibat Tanam Paksa dan kesewenangan para kepala, padahal keuntungan Kolonial makin meningkat. Kritik dari golongan Liberal yang makin berkepentingan untuk dihapuskannya Tanam Paksa dan pembebasan *kwn*, mengharuskan Pemerintah meneliti *kwn* diseluruh Jawa untuk kemudian diberi peraturan tentang jenis-jenis dan waktu yang dituntut. Secara intensif dan menyeluruh mulai dibuat peraturan di seluruh Jawa pada tahun 1864. Setelah diadakan penelitian yang intensif dengan mengambil sampel Karesidenan Kedu pada tahun 1866/1867 berupa sensus sosial ekonomi, menyusul penelitian mengenai pelaksanaan *kwn* dan *kwd* pada tahun 1885, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pembatasan dan penghapusan sebagian *kwn* pada tahun 1885, hingga untuk Jawa tinggal pekerjaan memelihara dan memperbaiki jalan, jembatan, tanggul, saluran air dan dinas jaga gardu dan bangunan pengairan. Mengapa justru wajib kerja untuk jalan dan pengairan yang tetap dipertahankan sampai awal abad ke 20 tidak lain karena merupakan pekerjaan yang paling penting, yang menyerap paling banyak tenaga dan beaya rutin yang banyak. Pemerintah Kolonial sangat hati-hati dalam pengeluaran keuangan. Penghapusan *kwn* harus diganti dengan pendapatan Negara yang dipakai untuk membeayai tenaga upahan dan beaya pemeliharaan dan perbaikan. Maka diciptakan pajak baru, yaitu pajak kepala (*hoofdgeld*), sebesar f1,- per *kwn* per tahun. Namun kenyataannya petani membayar pajak kepala dan masih tetap melaksanakan *kwn*, karena baru sebagian yang dihapuskan. Pajak ini menambah berat petani yang telah dibebani pajak Tanah dan lain-lain berjumlah rata-rata f17,- (untuk Distrik Magelang, 1887). Pelaksanaan penghapusan *kwn* berjalan cukup lama sampai Pemerintah merasa cukup mempunyai dana untuk menggantikannya dengan kerja bebas.

CATATAN

- 1). Wisselius lampiran *Besluit* 18 Juli 1888 no. 8, Deel I, Hoofdst I.
- 2). *Ibid.*, h. 3.
- 3). TNI, 1850, II de leel, h. 221; Wisselius, 1888 no. 8.
- 4). Angka-angka dikumpulkan dari AV, *Historisch overzicht*, Widjojonitisastro, Population Trede in Indonesia, 1970 periksa tabel 1.
- 5). AV, 1827, 1830.
- 6). *Register der Heerendieueten Res. Archief Kedu* no. 1125 AV 1824, Widjojonitisastro *opcit*, h. 5-6; Baud no. 891, *Register de Besluiten* 1884.
- 8). Pendapatan ini dikemukakan oleh Widjojonitisastro *opcit*, Chapter 3; Jan Bremen *Pertumbuhan Penduduk Jawa dan Struktur Demografis*, Bhratara, 1971; Bram Poper *Pertumbuhan Penduduk Jawa*, Bhratara, 1975.
- 9). AV. 1845; *Historisch Overzicht* 1866/67; Wisselius, 1888. Periksa tabel 2.
- 10). KV. 1860.
- 11). AV. 1842, AV 1830, Bremen. *op.cit.*
Peper, *op.cit.*
- 12). Marc Bloch, *Feuedol Society*. 2. Soemarsaid Moertono.
State and Statteraft in old Java, Cornell University 1974, Soempomo,
De Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Residentie Soerakarta, Leiden, 1927.
- 14). F. Fokkens. *Eindresume*, 1888, h. 101 – 103.
Wisselius; Lampiran *Besluit* 1888 no. 8 Deel II, IV.
- 15). AV. 1827, 1830.
- 16). *Historisch Heerendiensten* 1848, Res. Archief Kedoe no. 1125.
- 18). Wisselius, 1888, Fokhens, 1890.
- 19). AV 1844.
- 20). *Verbaal* 30 Mei 1851 no. 34.
- 21). *Historisch Overzicht*, 1827 - 1870.
- 22). *Verbaal* 30 Mei 1851 no. 34.
- 23). Wisselius; Fokkens. h. 99.
- 24). Arminius, *Het Budget Van een Javaanschen Landbouwer*, 1885, hal. 1885 - 1917.
- 25). Wisselius, 1888 no. 8.

- 13). De Volck "Gegovens over Kedoe" (1831) dalam *Adat rechtbundles*, XIV, h. 111 - 112.

KEPUSTAKAAN

MATA TAQ

- Arminus Met *Budget van Een Javaanschen Laudbouwer*, 1885 Bloch, marc Feudal Society, 2.
- Breman, Jan — *Pertumbuhan Penduduk Jawa dan Struktur Demografis, Bharatara*, 1971.
- Fokkens, F. *Eindvesume*, 1888.
- Peper, Bram *Pertumbuhan Penduduk Jawa*, Bharatara, 1975
- Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java*.
New York, Cornell University 1974.
- Soepomo — *Reorganisatie van het Agrarische Stelsel in het Residentie Soerakarta*.
- TNI, 1850, II;
- Valck, De "Gegevens over Kedoe (1830)" dalam *Adatrecht bandels*, XIV.
- Widjojo Nitisastro — *Population Trends in Indonesia*, Ithoca, Cornell, 1970.

SUMBER

- Algemeen Verslag (AV)* 1827, 1830, 1840, 1846.
- Baud, 891, Register der Besluiten 1844.*
- Historisch Overzicht 1827 — 1870.*
- Kultuur Verslag (KV)* 1858, 1860.
- Register Heerendiensten 1848 Residentie Archief Kedoe no. 1125.*
- Verbaal, 30 Mei 1851 no. 34.*
- Wisselius, 1888 no. 8.*

Tabel : 1 Pertumbuhan Penduduk Karesidenan Kedu pada abad 19.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Anak-anak	Jumlah
1823	—	—	—	333.584
1826	—	—	—	242.590 ^{x)}
1830	—	—	—	307.293
1840	90.325	96.796	119.235	304.356
1824	89.625	94.893	122.063	306.581
1844	99.468	105.611	147.454	352.533
1845	100.571	106.947	149.592	357.110
1861	—	—	—	362.692
1866	174.889	192.573	126.429lk 119.907pr	613.798

Sumber : Historisch Overzicht 1827 - 1870;
 AV. 1827 - 1862.
 Widjojo, Population Trend Indonesia, 1970.

Tabel : 2. Perkembangan jumlah Desa dan Pedukuhan di Karesidenan Kedu pada Abad 19.

Daerah	1822		1834		1845		1866		1887	
	Desa	Dukuh								
1. Kab. Magelang.	1761	1381	2420	1419	2305	1695	2315	2493	1918	
2. Kab. Temanggung	848	494	1212	614	1434	721	1208	826	938	
3. Kares. Kedu	2609	1774	3632	2033	3729	2416	3523	3319	2856	

Sumber : Wisselius, 1888.

Tabel 3 Perkembangan Luas Pemilikan Tanah Keseluruhan dan Luas Pemilikan Perorangan di Karesidenan Kedu.

Daerah	1845		1866		1887	
	L. Sawah (bau)	L.P. Ptani (bau)	L S	LPP	L S	LPP
Kar. Kedu			82.775	0,82		
Kab. Magelang			51.279	0,80		
Kab. Temanggung			31.945	0,88-0,90	10,25-0,50	...

Sumber : AV 1845; KV 1866; Wisselius 1888.

Tabel 5 : Perkembangan Luas Tanam Padi Keseluruhan dan Luas Tanam Perorangan di Karesidenan Kedu.

Daerah	1845		1866		1887	
	Luas Tanam selu ruhnya	L. Tanam Padi Petani	LTS	LTP	ETS	LTP
Kar. Kedu	37.010 (bau)	10,50 (bau)	35.184	± 0,35	0,25-0,50
Kab. Magelang	22.524	± 0,35	idem
Kab. Temanggung	12.660	± 0,35	idem

Tabel 5 : Perkembangan Harga Beras Per Pikul di Karesidenan Kedu pada abad 19.

Daerah	1830	1840	1845	1886
Kar. Kedu	f7,50-f8,-	f4,- f8,-	f5,- f7,-
Kab. Magelang	f2,- f3,-

Sumber : AV, 1830, 1840, 1845, Wisselius 1888.

Tabel 7. Perbandingan antara Pelaksana Kwn dengan mereka yang Bebas KWN di Karesidenan Kedu Tahun 1888.

Pelaksana KWN	BEBAS KWN							
	Lurah + Prabot		Priyayi/ Pensiunan /kerja bebas		Rumah + Menumpang		Total Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kab. Magelang	62.407	51,2	13.271	10,	579	1,3	44.684	36,6
							59.534	48,8

Sumber : Wisselius, 1888.

Tabel 8 : Perbandingan persentase Luas Tanah Pertanian dengan Luas Bengkok Kepala Desa di Kab. Magelang (1888).

Daerah	Luas Tanah Peranian (%)	Luas Tanah Bengkok Kepala Desa (%)	Persentase Bengkok thd. Luas tanah pertanian
1. Kab. Magelang	83,9	6,1	10,9
2. Kab. Temanggung			
3. Kar. Kedu.			

Sumber : Wisselius, 1888

Tabel 6 Perbandingan dan Persentase Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga
 Tenaga Kerja Kuat, Kwn, Kwd, dan Bebas Kwn di Kabupaten
 Magelang.

Daerah	Penduduk		Kepala Keluarga		Tenaga Kerja Kuat		Bebas KWN		KWN		Hanya Tu-KWD	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kabupaten Magelang	490.668	100	98.197	20	122.503	25	60.086	12	62.407	2.7	40.418	8

Sumber : Wisselius, 1888.

Tabel 9 Jumlah Pelaksana KWN dan jumlah Hari kerja di Karesidenan Kedu.

Daerah	1848		1858		1885	
	Pelaksana KWN	Hari Kerja	P. KWN	H.K./Th.	P. KWN	H.K./Th
1. Kar. Kedu	75.305	1.304360 perorangan 17,5)	+ 76.500x)	+ 2.965.000 (perorang 40 hk)	89.190	1.613.397 (perorang 18 hk)
2. Afd. Petis Afd. Magelang (7 distrik)	44.534	1.729569

Sumber : Register Van Heerendiinsten, 1848, KV. 1858, Fokkens, 1888.

x). diproyeksikan dari angka 7 distrik (Karesidenan Kedu 12 distrik).

PANGERAN PANJI NATA KESUMA
(Dari Kerajaan Pasir)
Oleh : Mohd. Noor ARS.

I. Pendahuluan

Dari beberapa pejuang Kalimantan Timur, yang menentang pemerintah kolonial Belanda, ada tiga tokoh yang dapat kita kemukakan sebagai pahlawan daerah, ditinjau dari besarnya pengorbanannya dengan tidak memandang harta dan kedudukannya sebagai orang besar kerajaan atau pun sebagai seorang sultan yang memimpin suatu kesultanan. Ketiga mereka itu, ialah pertama Raja Alam Sultan Samliung salah seorang dari raja-raja Berau yang dibuang Belanda pada tahun 1834 ke Makasar, kedua Sultan Salehuddin dari kerajaan Kutai Kartanegara yang menentang gubernemen Belanda dan bangsa Inggeris pada tahun 1844 dan ketiga Pangeran Panji Nata Kesuma putera Sultan Abdurachman dari kerajaan Pasir, yang tiada bersedia menyerahkan kerajaannya kepada Belanda dengan ganti kerugian pada tahun 1908.

Sesuai dengan permintaan Panitia Pengarah Seminar Sejarah Nasional ke III di Jakarta tanggal 12 September 1981 No. 112/IDSN/IX/81, supaya dibuat makalah yang leih khusus dengan judul : **PANGERAN PANJI DARI KERADJAAN PASIR**, maka akan lebih lengkaplah, apabila dalam makalah ini, diutarakan serba ringkas sejarah kerajaan Pasir, sebagai latar belekang sejarah dari perjuangan Pangeran Panji Nata Kesuma bin Sultan Abdurachman, yang biasa disebut Pangeran Panji saja.

II. Berdirinya kerajaan Pasir

Setelah pemerintahan pusat kerajaan Majapahit berkurang kewibawaannya di daerah-daerah berdirilah kerajaan-kerajaan kecil, seperti Kutai, Berau dan Pasir yang menurut Dr. J. Eisenberger dalam Kroniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo, peristiwa itu terjadi pada awal abad ke XV. Raja pertama memerintah di kerajaan Pasir, seorang perempuan bernama Puteri Petung. Pusat pemerintahan berkedudukan di Sado Rengas di hulu sungai Kendilo.

1300 - 1400.

Borneo ondérgaat op diverse plaatsen wederom Hindoe includ, ditimaal vermengd met het Javaanche element, doordat hy uitgeoefend door het ryk van Madjapahit. In tweede helft der viertiende eeuw (1365) worden als wingewesten van dat ryk opgesomd de ryken Kota Waéringin, Sampit, Kapuas, Banjarmasin (Hoofdstand Tandjoengpoera aan de soengei Pawan, bovenstroms van Matam, Werterafdeeling van Borneo, ten Zuidin van Soekadana), de Baritononding, Tabalong in Amoentai, Seboekoe (Oostelyk van Poelau Laoet) Pasir, Koetai en Berao.

Het bestuur, dat wel bestaan zal hebben in het heffen van retributies en het bevorderen van handelsbetrekkingen met Java, uitgeoefend door

troepen en schepen.
Deze wingevesten gaan in het eerste kwartaal der 15 de eeuw voor Madjapahit verloren.

Terjemahan

1300-1400 Pada beberapa tempat di Kalimantan, mengalami kembali pengaruh Hindu, dalam periode ini, bercampur dengan unsur kebudayaan Jawa, berhubung pengaruh tersebut datangnya dari kerajaan Majaphit.

Pada pertengahan abad ke XIV (1365) daerah taklukan kerajaan Majaphit, yaitu kerajaan Kota Waringin, Sampit, Kapuas Banjarmasin (ibukota Tanjungpura di sungai Pawan Hulu sungai Matan di Kalimantan Barat, di selatan Sukadana) Muara Barito, Tabalong di Amuntai, pulau Sebuku di sebelah Timur pulau Laut, Pasir, Kutai dan Berau.

Pemerintahan, pengambilan pajak dan perdagangan dagang dengan Jawa, dilaksanakan oleh menteri-menteri dari pulau Jawa, dibantu oleh pasukan dan armada.

Wilayah kerajaan Majaphit di luar pulau Jawa ini, pada catur wulan pertama abad XV melepaskan diri dari kerajaan Majaphit.

Adapun Raja Puteri Petung itu panjang umurnya, Suaminya tujuh orang kawin cerai. Suaminya yang ke-tujuh bernama Pangeran Indar Jaya, seorang bangsawan berasal dari Gersik. Dengan suaminya yang ke-tujuh inilah ia lama hidup berbahagia. Ketika umurnya seratus tahun barulah ia digantikan oleh puterannya Aji Pati.

Berturut-turut memerintah di kerajaan Pasir itu, Puteri Petung dengan turunannya ialah :

1. Raja Puteri Petung
2. Aji Pati
3. Aji Anom
4. Pangeran Singa Maulana, berputera tiga orang ; Penembahan Sulaiman, Penembahan Adam dan Aji Muhammad.
5. Penembahan Sulaiman
6. Penembahan Adam.

Semua raja-raja ini berkedudukan di Sado Rengas. Sesudah itu kerajaan Pasir diperintah oleh raja-rajanya yang bergelar sultan. Berturut-turut sultan-sultan yang memerintah di kerajaan Pasir yaitu :

1. Sultan Aji Muhammad

Setelah Penembahan Adam meninggal dunia ia, digantikan oleh saudarannya yang bungsu Aji Muhammad. Pada waktu itu, kerajaan Pasir selalu dilanggar oleh rakyat Hulu Dusun dan Hulu Sungai. Perintah untuk memagar dan membuat kubu pertahanan dilaksanakan rakyat dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebelum pagar dan kubu pertahanan itu selesai, kerajaan Pasir diserang oleh rakyat Hulu Dusun dan Hulu Sungai. Rumah-rumah dibakar, harta dirampas, termasuk keraton Pasir yang indah juga turut terbakar.

Karena itu, Sultan Aji Muhammad beserta rakyatnya, berpindah milir sungai Kendilo, mencari tempat yang aman, yaitu Pasir Benawa dekat Pasir Belengkong. Di tempat inilah Sultan Aji Muhammad membuat perkampungan baru, mendirikan istana, mesjid dan perumahan rakyat secara bergotong-royong. Mulai pada waktu itulah Pasir Benawa menjadi tempat kedudukan pemerintahan para sultan-sultan Pasir.

2. Sultan Sepuh

Sesudah Sultan Aji Muhammad meninggal dunia, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Sepuh. Pada waktu Sultan Sepuh memerintah pertanian yang berupa perladangan dan perkebunan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga rakyat Pasir tiada kekurangan makanan. Meskipun Sultan Sepuh merasa dalam keadaan susah, karena kerajaan Pasir telah beberapa tahun lamanya tunduk kepada kerajaan Banjarmasin, Setiap tahun rakyat harus mengantar upeti kepada Sultan Banjarmasin, sepuluh kati mas urai disertai dengan beras dan padi, kelebihan dari permakan rakyat. Karena itulah Sultan Sepuh berkunjung ke Martapura menghadap Sultan Banjar, meminta supaya upeti sepuluh kati itu dapat dikurangi, karena pembayaran itu dirasa terlampaui berat, disebabkan sungai Kondilo, kerap kali Banjir, sehingga pendulangan emas tidak dapat dilakukan.

Sultan memohon agar upeti itu dapat dibayar sekali gus dan kerajaan Pasir dibebaskan dari kekuasaan kerajaan Banjar. Dalam perundingan ini, Sultan Sepuh mengemukakan beberapa alasan yang dapat diterima, karena itu didapat persetujuan upeti kerajaan Pasir dapat ditebus sekali gus dengan setengah pikul (50 kati) emas urai dan pembayaran itu harus dilunasi dalam masa 1 tahun.

Perjanjian ini diterima baik oleh kedua belah pihak dan Sultan Sepuh sanggup membayar pada tahun berikutnya. Ketika Sultan Sepuh kembali di Pasir, maka diadakanlah pemusyawaranat dengan rakyat Pasir. Kemudian Sultan Sepuh meminta kepada rakyat yang ada menyimpan emas atau perhiasan emas, bilamana sampai waktunya akan mengantarkan upeti, dari ternyata kekurangan, supaya menyerahkan emasnya itu kepada kerajaan Pasir.

Mulai pada waktu itu diperintahkan Sultan Sepuh kepada rakyat Pasir tua muda, laki-laki perempuan, anak-anak yang telah dapat menolong orangtuanya, tidak terkecuali supaya bekerja bersama-sama bergotong-royong mendulang emas di kali Kendilo, ialah untuk menebus kerajaan Pasir dari kerajaan Banjarmasin.

Demikianlah tidak ada Banjir, kelihatan beribu-ribu rakyat Pasir, beramai-ramai mendulang emas di sungai Kendilo, sehingga dalam tempo 1 tahun telah didapat hampir 100 kati emas, karena itu segala perhiasan emas yang akan diminta kepada rakyat Pasir, untuk mencukupi kekurangannya, tidak jadi dilaksanakan.

Setelah sampai waktunya menurut perjanjian, maka emas urai yang setengah pikul (50 kati) diserahkan kepada Sultan Banjarmasin oleh Sultan Sepuh untuk menebus kerajaannya. Sejak waktu itu, bebaslah kerajaan Pasir dari ikatan kerajaan Banjarmasin.

3. Sultan Dipati Anom

Sesudah Sultan Sepuh meninggal dunia, ia digantikan oleh kemenakannya yang bernama Dipati Anom. Selama Dipati Anom memerintah rakyat Pasir, menjadi lebih makmur, karena tidak lagi dibebani pekerjaan mendulang emas untuk pembayaran upeti kepada Raja Banjarmasin. Ladang, kebun dapat terpelihara dengan baik.

4. Sultan Sulaiman

Ketika Sultan Dipati Anom meninggal dunia, ia digantikan oleh sepupunya yang bernama Sultan Sulaiman. Pada masa pemerintahan Sultan ini, Sultan Banjarmasin memperingati Sultan Pasir tentang kewajibannya terhadap Radja Banjar yaitu membayar upeti. Hal ini menjadi perhatian kepada Sultan Sulaiman, karena urusan upeti itu, sejak Sultan Sepuh telah diselesaikan dengan membayar upeti sekali, untuk membebaskan kerajaan Pasir dari ikatan kerajaan Banjar. Karena peristiwa itu, telah terjadi puluhan tahun diselesaikan oleh sultan-sultan yang terdahulu, kemungkinan Sultan Banjar pada waktu itu, tidak mengetahui lagi persoalannya itu.

Karena Raja Banjar tidak senang lagi menyelesaikan hal itu dengan Sultan Pasir, lalu kerajaan Pasir itu, diserahkan Sultan Banjarmasin kepada pemerintah Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1826, sesuai dengan tulisan Bydrage Inn. Institut jilid 58 ref VII karangan tuan H.H.P.J. Nusselein antara lain :

.....het landschap Pasir is in 1826 door Sultansbestuur van Banjarmasin aan het Nederlandsche Ind. Governement afgestaan. Met den viertenden vorst Pasir Soeltan Adam werd het eerste politiek contract 1844 gesloten.....

Dalam bahawa Indonesia artinya : Kerajaan Pasir dalam tahun 1826 oleh Sultan Banjarmasin diserahkan kepada Gubernemen Hindia Belanda. Dengan Sultan Pasir yang keempat belas yaitu Sultan Adam, untuk pertama kalinya telah dibuat politik kontrak dengan Gubernemen Belanda, pada tahun 1844.

Walaupun demikian Sultan Sulaiman, tetap memerintah kerajaan Pasir dengan tidak dicampuri oleh pemerintah Belanda.

5. Sultan Ibrahim (1826 - 1837)

Setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia ia digantikan oleh kemenakannya Sultan Ibrahim, putera dari Pangeran Surya Nata Negara. Peristiwa penting dalam pemerintahan Sultan Ibrahim, ialah pergeseran perbatasan antara kerajaan Kutai dan kerajaan Pasir. Sebelumnya perbatasan antara kedua kerajaan itu ialah sebuah sungai yang bernama sungai Aji raden, karena itu Balikpapan dan Penajam masuk wilayah kerajaan Pasir.

Pada waktu Sultan Ibrahim memerintah kerajaan Pasir, seorang puterinya kawin dengan putera Sultan Kutai. Ketika kerajaan Pasir yang bernama Aji Siti Jawiah berangkat ke Kutai dengan suaminya, maka secara resmi Sultan Ibrahim menyerahkan segala hasil laut dan darat kepada Siti Jawiah dengan suaminya. Karena hubungan keluarga kemudian Balikpapan dan Penajam itu seterusnya menjadi daerah kerajaan Kutai.

6. Sultan Makhmud Khan (1838 - 1843)

Sesudah Sultan Ibrahim meninggal dunia, ia digantikan oleh saudara

sepupunya Sultan Makhmud Khan putera yang sulung dari almarhum Sultan Sulaiman. Tiga tahun setelah Sultan memerintah kerajaan Pasir, tiba lah sebuah kapal dagang Belanda yang bernama "Brik". Nahkoda dan anak buahnya datang ke istana untuk berkenalan dengan Sultan Makhmud Khan.

Menurut ceritera itulah pertama kali, negeri Pasir didatangi orang Belanda. Kapal dagang tersebut datang melalui Banjarmasin dengan membawa barang-barang dagangan, seperti kain-kain, barang-barang permainan, roti-roti, gula-gula, cermin, manik-manik, piring dan guci-guci. Barang dagangan ini diperjual-belikan secara barter bertukar dengan hasil hutan seperti rotan, damar dan emas urai hasil pendulangan rakyat.

Selain dari kapal Belanda yang mulai masuk ke negeri Pasir, banyak pula kapal dagang dari Jawa dan Makasar.

7. Sultan Adam (1844 - 1881)

Setelah Sultan Makhmud Khan meninggal dunia, ia digantikan oleh saudaranya Sultan Adam. Pada waktu penobannya menjadi sultan, upacara yang pertama-tama dilakukan, menurut adat lembaga kerajaan Pasir dari sejak pemerintahan Puteri Petung ialah penyerahan alat kerajaan pusaka turun-temurun berupa barang seperti : Gong, ceret, Pinggan Melawen, Batil dari tembaga dan dua buah meriam Si Macan dan Si Gantang. Semua pusaka kerajaan ini diserahkan oleh para bangsawan, orang-orang besar kerajaan dan rakyat Pasir. Menurut adat Pasir susudah raja yang baru dinobatkan itu, menerima alat kerajaan ini, barulah raja itu sah sebagai raja yang diakui oleh orang besar kerajaan dan seluruh rakyat Pasir.

Pada waktu penobatan Sultan Adam itu, barulah seorang wakil pemerintah kolonial Belanda turut menghadirinya yaitu residen Banjarmasin. Sebelum upacara penobatan dimulai, Residen Banjarmasin A.L. Weddik yang berpangkat Comisaris Gubernemen Belanda untuk pulau Borneo, menyerahkan hadiah kerajaan Belanda sebagai tanda persahabatan sebuah peti yang indah buatannya berisikan selembar baju terbuat dari kain lakan yang mahal harganya bersulam kembang yang terbuat dari benang emas, selembar celana dari kain lakan hitam dengan strip pita emas, sebilah pedang berhulukan gading, berbentuk kepala singa bersalut emas, sebuah topi berpasmen emas dan bermahkoṭa dua ekor singa bertatahkan intan, sepasang sepatu dengan kaus kaki dan kaus tangan. Pakaian inilah yang dipakai Sultan Adam pada waktu penobatannya menjadi Sultan kerajaan Pasir.

Setelah Sultan dinobatkan menjadi Sultan, diadakanlah perjanjian antara kerajaan Pasir dengan Pemerintah Belanda, yang disebut korteveklaring atau perjanjian pendek yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

1. Kerajaan Pasir mengakui masuk wilayah jajahan Hindia Belanda.
2. Bawa kerajaan Pasir mengaku setia kepada kerajaan Belanda dan taat kepada Raja Belanda dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
3. Bawa Pasir tidak akan mengadakan hubungan langsung atau pun membuat perjanjian dengan negara lain. Musuh Belanda adalah juga menjadi musuh kerajaan Pasir, sahabat kerajaan Belanda juga menjadi sahabat kerajaan Pasir.

Pada waktu pemerintahan Sultan Adam ada dua orang pedagang yang kerap kali berdagang ke kerajaan Pasir. Pertama Sykh Syarif Hamid Alsegaf seorang pedagang Arab dari Semarang. Sykh Syarif Hamid kerap kali membawakan sultan pestol dan senapan, karena itu Syarif Hamid menjadi sahabat sultan. Kemudian saudagar Arab itu kawin dengan kemenakan sultan yang bernama Aji Musnah. Syarif Hamid Alsegaf kemudian diangkat menjadi menteri kerajaan dan dihadiahi gelar pangeran.

Pedagang yang kedua bernama La Kumai dari Sulawesi Selatan. Karena ia seorang saudagar yang kaya, iapun bersahabat pula dengan Sultan Adam. Kemudian ia dikawinkan dengan puteri bangsawan Pasir yang bernama Aji Rindu, anak dari almarhum Sultan Makhmud Khan. Ia dihadiahi gelar pangeran kemudian diangkat menjadi menteri kerajaan dengan nama Pangeran Mas.

Pada akhir pemerintahannya pemerintah Belanda tidak senang terhadap sultan Adam, karena ia membantu menyembunyikan pejuang-pejuang pengikut Pangeran Antasari yang memberontak terhadap Belanda sejak tahun 1859. Ketika raja-raja pesisir timur Kalimantan diminta Residen Belanda di Banjarmasin untuk menghadap menyatakan tanda setianya kepada gubernemen, Sultan tidak bersedia mengahdap ke Banjarmasin.

8. Sultan Sepuh Adil Khalifatulmukminin (1826-1889)

Setelah Sultan Adam ia digantikan kemenakannya yang bernama Sultan Sepuh Adil Khalifatulmukminin. Sultan ini sangat aktif memajukan pertanian. Pada waktu itulah mula-mula diadakan perkebunan karet di dalam kerajaan Pasir.

Sultan dan keluarganya sendiri juga turut berladang dan berkebun untuk memberi contoh dan memberi dorongan kepada rakyat supaya giat bertani. Jaman sultan ini, ada seorang pedagang ternak kaya dari Sulawesi Selatan yang bernama La Basso. Karena kekayaannya ia diterima meminang seorang keluarga dekat raja yang bernama puteri Aji Reinah. La Basso diberi gelar Pangeran Dipati dan diangkat menjadi menteri kerajaan.

9. Sultan Muhammad Ali Adil Khalifatulmukminin (1889-1896)

Sultan Adil Khalifatulmukminin digantikan oleh putera almarhum Sultan Makhmud Khan yang bernama Sultan Muhammad Ali Khalifatulmukminin. Raja ini seorang taat beragama. Pada bulan puasa, menteri kerajaan dan pejawainya, diberinya kerindanan untuk menjalankan urusan pemerintahan, sebab itu sering perintah residen dari Banjarmasin tidak mendapat layanan dari sultan. Oleh karena itu residen tidak senang atas kebijaksanaan sultan. Residen semakin bertambah marah, mendengar laporan-laporan dari bawahannya, bahwa Sultan Muhammad Ali menaruh simpati terhadap perjuangan Pangeran Antasari dan terlibat dalam melindungi pemberontak-pemberontak yang bersembunyi dalam kerajaannya. Seorang asisten-residen dengan secara diam-diam langsung menyelidiki hal itu, dari rakyat Pasir mengetahui peristiwa itu, meminta agar sultan bersama-sama ke Banjarmasin menghadap residen. Sultan tidak menanggapi permintaan asisten-residen dan menyatakan ia belum bersedia meninggalkan Pasir selama bulan puasa.

Setelah residen menerima laporan itu, residen sangat marah. Sebulan kemudian residen sendiri dengan sepasukan tentara datang ke Pasir. Setibanya di Pasir, residen Belanda menyatakan bahwa sultan tidak cakap, tidak taat kepada peraturan gubernemen dan suka melawan pemerintah. Mendengar pembicaraan residen yang tidak sopan itu, Sultan Muhammad Ali menjadi marah, bahwa sebagai sultan ia berhak menentukan kebijaksanaan sendiri dalam kerajaannya. Baru sekali inilah seorang sultan berani menentang terus terang seorang residen Belanda di kerajaan Pasir. Residen dengan paksa membawa sultan ke Banjarmasin.

Kemudian Sultan Muhammad Ali dimasukkan Belanda dan menentukan Banjarmasin sebagai tempat pembuangannya. Muhammad Ali meninggal dalam pembuangan di Banjarmasin. Sebagai penggantinya diangkat Sultan Abdurrahman putera almarhum Sultan Adam.

1896. In het landschap Pasir heercht neg steeds wanordelijke toestand; de soeltan is zeer slap, niet geen kansmisdadigers uit te leveren en schijnt ook niet erg geneigd een goede verstandhouding met het gouvernement te becoederen

Terjemahan

Kerajaan Pasir selalu tidak aman. Sultan sangat lemah tidak dapat diharapkan untuk menyerahkan penjahat-penjahat. Nampaknya tidak ada kemauan baik untuk bekerja sama dengan gubernurment.

1896. In Oktober wordt aan het wanbestuur van den in 1889 opgetreden Soeltan Mihamad Ali van Pasir, een einde gemaakt door zijn afzetting waartoe residen J. Broers zicht met een compagine militairen naar Pasir had bevegen, en overbreging naar Banjarmasin (waar hy in 1898 overleed) op kosten van nieuwe soeltan Waartoë werd verkozen de oudste zoon van den afgezette functionaris met den titel Soeltan Abdoer rahman; deze teekent een acte van verbandter voorbreidung van een nieuwe politiek contract.

Terjemahan.

Dalam bulan Oktober, pemerintah yang lalim dari Sultan Muhammad Ali yang naik tahta 1889 diakhiri, dengan menurunkannya dari tahta kerajaan. Untuk maksud itu, residen J. Broers sendiri datang ke Pasir dengan sepasukan tentara dan dibawa ke Banjarmasin (dimana ia dalam tahun 1898 meninggal dunia) atas biaya sultan baru. Untuk penggantinya dipilih putera yang tertua dari sultan yang diturunkan dengan gelar Sultan Abdurrahman. Sultan ini menandatangani suatu akte hubungan sebagai persiapan untuk membuat politik kontrak yang baru.

10. Sultan Abdurrahman (1896 – 1897)

Pada jaman pemerintahan sultan ini, gubernemen Belanda mengadakan peraturan memungut belasting atau uang kepala di kerajaan Pasir. Setiap rakyat yang sudah dewasa diwajibkan membayar pajak tersebut : Sultan Abdurrahman tidak lama memerintah, karena meninggal dunia. Pemerintah diserahkan kepada Pangeran Nata Panembahan Sulaiman kemenakan Sultan Abdurrahman. Ketika Pangeran Nata hendak ditetapkan menjadi Sultan ia berkeberatan. Ia memberikan pernyataan kepada residen, ia lebih suka bertani.

11. Pangeran Ratu Raja Besar (1898 – 1900).

Setelah Sultan Abdurrachman meninggal dunia, orang-orang besar para bangsawan dan rakyat kerajaan Pasir memilih Pangeran Ratu Raja Besar putera Sultan Sepuh Afil Khalifatulmikminim menjadi penggantinya. Setelah upacara menurut adat lembaga kerajaan Pasir selesai dilaksanakan dan pemerintah diserahkan oleh Sultan Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, beliau kembali ke kampungnya di Selinau.

Menteri kerajaan pada waktu itu ialah :

1. Aji Meja putera Aji Gaga bergelar Pangeran Mangku Jaya Kesuma menteri pertama.
2. Aji Nyesei putera Pangeran Nata Panembahan Sulaiman bergelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, menteri kedua.
3. Pangeran Panji Nata Kesuma putera almarhum Sultan Abdurrachman menteri ketiga.
4. La Basso gelar Pangeran Dipati sebagai menteri keempat.

Sultan Pangeran Ratu Raja Besar, kerap kali mempercayakan urusan pemerintahan kepada para menterinya. Diantara menterinya yang sangat dipercayainya ialah Pangeran Mangku Jaya Kesuma. Urusan pemerintahan dengan gubernemen Belanda di Banjarmasin, dipercayakannya kepada menteri pertama ini. Mertua Pangeran Mangku Jaya Kesuma bernama La Maraja, adalah seorang saudagar yang kaya raya. Ia banyak mempunyai hubungan dagang dengan saudagar di Banjarmasin, Surabaya, Gresik, Betawi dan Singapura. Karena selalu saja berurusan dengan gubernemen Belanda di Banjarmasin, timbulah ambisinya untuk lebih berkuasa. Dengan bantuan mertuanya yang kaya raya, ia bercita-cita untuk menjadi sultan.

Hubungannya dengan residen J. Broers di Banjarmasin sudah sangat intim. Baik Pangeran Mangku Jaya Kesuma, maupun mertuanya, kerap kali membawakan nyonya Brors buah tangan sebagai tanda persahabatan. Karena hubungan yang sangat baik itu, Pangeran Mangku Jaya Kesuma dan mertuanya La Maraja, tiada merasa malu dan segan dengan terus terang menggumukkan maksudnya itu, kepada residen. Residen J. Broers setuju untuk membantu cita-cita Pangeran Mangku Jaya, karena dengan membantu Pangeran Mangku Jaya Kesuma, residen dapat melaksanakan cita-cita pemerintahannya untuk menjalankan politik adu domba, memecah-belah rakyat dan raja-raja Pasir, yang selama ini bersimpati kepada perjuangan Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan. Untuk mencukupi maksudnya itu, residen La Maraja dan Pangeran Mangku Jaya Kesuma mengatur suatu rencana.

Sultan Pasir Pangeran Ratu Raja Besar dengan menterinya Pangeran Mangku Jaya Kesuma menghadap residen di Banjarmasin. Setiba di Banjarmasin residen menganjurkan kepada sultan, agar memberikan suatu surat kepercayaan sebagai dasar hukum, untuk berurusan soal-soal pemerintahan dengan gubernemen Belanda. Dengan sultan tidak usah susah berurusan pulang balik ke Banjarmasin. Anjuran residen ini, disetujui oleh Pangeran Ratu Raja Besar, untuk memberikan surat kepercayaan kepada menterinya Pangeran mangku Jaya Kesuma sebagai menteri pertama. Oleh residen dibacakan suatu konsep yang telah disediakan lebih dahulu

Sultan setuju atas bunyi konsep itu. Keesokan harinya sultan Pangeran Ratu Raja Besar dan menterinya dipanggil menghadap, untuk menanda tangani surat kepercayaan atau surat kuasa untuk menterinya Pangeran Mangku Jaya. Kemudian sultan menanda tangani surat kuasa itu, dengan tiada membacanya lebih dahulu serta membubuhkan cap kerajaan Pasir. Sesudah itu, Pangeran Mangku Jaya menanda tangani surat kuasa itu dan penghabisannya tuan residen sebagai saksi.

Setelah selesai penanda tangan surat kuasa itu, Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dan menterinya kembali ke Pasir.

Sesudah beberapa lamanya sultan berada di Pasir, tersiar berita bahwa sultan telah menanda tangani suatu penyerahan kekuasaan kepada menterinya Pangeran Mangku Jaya dan mengundurkan diri menjadi sultan. Para bangsawan Pasir yang merasa lebih berhak mewarisi kerajaan dan menggantikan menjadi sultan sangat marah mendengar berita itu. Mereka menghadap Pangeran Ratu Raja Besar untuk meminta kebenaran berita itu. Oleh sultan dijelaskan bahw ia sekali-kali tidak menanda tangani pengunduran diri dan menunjuk Pangeran Mangku Jaya untuk menjadi sultan. Yang ada ialah menanda tangani surat kuasa untuk menterinya Pangeran Mangku Jaya, supaya mudah berurusan di Banjarmasin. Mendengar penjelasan itu, para bangsawan Pasir menjadi lega hatinya.

Tiada berapa lamanya sultan menerima sepucuk surat yang ditanda tangani di Banjarmasin itu. Setelah dibacanya dengan teliti alangkah terkejutnya, karena bunyi surat itu, tiada sesuai dengan konsep yang dibacakannya. Sekarang barulah ia insaf bahwa ia telah ditipu oleh residen dan menterinya Pangeran Mangku Jaya serta kelaianya sendiri tidak hati-hati terus menanda tangani surat kuasa itu dengan tidak membacanya lebih dahulu. Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dengan segera memanggil keluarganya yang lebih berhak untuk menjadi sultan menurut adat lembaga kerajaan Pasir. Mendengar kejadian itu, keluarga sultan sangat marah terhadap perbuatan Pangeran Mangku Jaya yang bersekongkol dengan residen mengkhianati rajanya Pangeran Ratu Raja Besar.

Tiada berapa lamanya, tiba di Pasir tiga buah kapal perang dengan seorang overste dan asisten-residen sebagai wakil residen Banjarmasin, meminta kepada Sultan Pasir Pangeran Ratu Raja Besar untuk mengadakan serah terima kekuasaan dengan Pangeran Mangku Jaya, sesuai dengan bunyi surat yang ditanda tangannya di Banjarmasin. Pada upacara serah terima yang akan dilaksanakan itu, hadir ex sultan Pangeran Nata Panembahan Sulaiman yang menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Ratu Raja Besar.

Beliau menyatakan bahwa pengangkatan Pangeran Mangku Jaya Kesuma menjadi sultan Pasir adalah bertentangan dengan adat lembaga kerajaan yang selama ini dengan taat dilaksanakan oleh para bangsawan dan seluruh rakyat Pasir. Untuk menjelaskan pernyataan itu, ditunjukkan beliau silsilah raja-raja Pasir dan siapa seharusnya yang patut menjadi sultan apabila Pangeran Ratu Raja Besar mengundurkan diri. Pangeran Nata meminta supaya serah terima itu diundurkan, dan mendesak asisten residen agar melaporkah hal itu kepada residen di Banjarmasin.

Juli 1900 Residen menyatakan bahwa timbang terima antara Pangeran Ratu Raja Besar dengan Pangeran Mangku Jaya Kesuma harus dilaksanakan, karena hal itu adalah kemauan sultan sendiri, dan tidak bisa diubah lagi, karena sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Betawi. Untuk melaksanakan serah terima kekuasaan dan pengangkatan Pangeran Mangku Jaya menjadi sultan Pasir, residen sendiri dengan kapal perang Belanda datang ke Pasir disertai dengan sepasukan tentara.

Dengan keadaan terpaksa Pangeran Ratu Raja Besar menandatangani surat serah terima itu. Sekarang tercapailah maksud residen sebagai alat pemerintah kolonial, sesuai dengan politik penjajahan mengadu domba raja-raja dan rakyat Pasir. Pangeran Mangku Jaya dan mertuanya La Maraja mencapai cita-citanya.

III. Pangeran Panji Nata Kesuma Menentang keputusan pemerintah kolonial Belanda

13. Pangeran Mangku Jaya gelar sultan Ibrahim Khaliluddin (1900 - 1908) Pemerintahan Sultan Ibrahim Khaliluddin tidak dapat berjalan lancar, karena banyak para bangsawan rakyat yang tidak menyetujui mengangkatnya sebagai sultan Pasir. Diantara para bangsawan itu, yang besar pengaruhnya di kalangan raja-raja dan rakyat Pasir ialah Pangeran Panji Nata Kesuma putera almarhum Sultan Abdurrachman yang pernah menjadi menteri kerajaan pada jaman Sultan Pangeran Ratu Raja Besar.

Aji Nyesei gelar Panglima Sentik. Wang Kepala atau belasting tidak dibayar rakyat. Sultan Ibrahim tiada berdaya terhadap perlawanan rakyat. Mereka benci terhadap sultan, pertama rakyat tahu perbuatan Sultan Pangeran Ratu Besar, kedua Sultan Ibrahim telah berani melanggar leluhur raja-raja mereka mau menjadi raja dengan tidak menerima pusaka kerajaan dari rakyat secara adat, dan ketiga ada beberapa bangsawan Pasir yang lebih berhak untuk mewarisi tahta dari sultan Ibrahim.

Untuk mengatasi perlawanan rakyat, agar belasting tetap dibayar oleh rakyat, Sultan Ibrahim mengangkat saudaranya Pangeran Menteri menjadi menteri kerajaan. Meskipun demikian rakyat tetap patuh kepada Pangeran Panji dan kawan-kawannya.

1904. De verrregaande slapheid van den soeltan Pasir jegens de anak raja party onder Pangeran Panji, de zoon van Soeltan Abdoerachman welke party hem niet als soeltan wilde erkennen, verwekt in Juli ongerekheden te Tanah Gerogot echter in den kiem gesmoord door daar bescheiden pradoerits.

Terjemahan

Sultan Pasir terlalu lemah terhadap kelompok anak raja-raja dibawah pimpinan Pangeran Panji putera almarhum Sultan Abdurrachman, anak raja-raja itu tidak mau mengakui Sultan Ibrahim dan mengadakan kontran di Tanah Grogot, tetapi dapat dipadamkan oleh serdadu serdadu setempat.

Untuk melemahkan perlawanan Pangeran Panji, Sultan Ibrahim mengusulkan kepada gubernemen Belanda, supaya Aji Nyesei gelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat putera bekas Sultan Pangeran Nata Panembahan Sulaiman menjadi raja Muda. Sebagaimana rakyat yang menjadi pengikut Aji Nyesei menghentikan perlawanan. Sultan Ibrahim merasa kuatir karena Raja Muda Aji Nyesei bertambah pengaruhnya.

Dimintanya beslit pengangkatan Aji Nyesei menjadi Raja Muda Pasir dengan alasan Tuan Residen Banjarmasin, meminta dibuatkan salinannya. Tetapi setelah beberapa kali diminta Raja Muda kembali beslit pengangkatan-nya, oleh Sultan Ibrahim selalu dijawab, belum dikembalikan residen. Raja Muda merasa bahwa ia dipermainkan oleh Sultan Ibrahim. Oleh karena itu, ia bergabung kembali dengan Pangeran Panji menentang Sultan. Pertentangan antara keluarga sultan Ibrahim disatu pihak dan pengikut-pengikut Pangeran Panji dan Aji Nyesei Raja Muda dilain pihak menjadi semakin memburuk, sehingga pemerintahan sultan Ibrahim tidak dapat menguasai keadaan. Rakyat tidak mau membayar uang kepala, menyebabkan pajak itu macet sama sekali. Kedudukan Sultan Ibrahim menjadi semakin sulit, atasannya gubernemen Belanda menganggap ia terlalu lemah, sehingga pembayaran pajak tidak masuk sedikit juapun, sedangkan dipihak para bangsawan dan rakyat tidak mau menuruti perintah dan peraturan gubernemen.

Dalam keadaan yang sulit itu, Sultan Ibrahim mengundang mertuanya La Maraja dan saudaranya Pangeran Menteri serta kaum keluarganya yang berpihak kepadanya, untuk memusyawarahkan situasi yang gawat itu. Pada perundingan itu, sultan dan keluarganya berpendapat bahwa mereka tidak mungkin seterusnya mempertahankan kedudukan Sultan Ibrahim sebagai pemimpin pemerintahan kerajaan Pasir. Mereka sepakat lebih baik pemerintahan kerajaan itu, diserahkan saja kepada gubernemen Belanda, dengan meminta ganti rugi. Sebelum usul penyerahan dimajukan kepada gubernemen Belanda, terlebih dahulu harus diadakan musyawarah dengan para bangsawan dan anak raja-raja Pasir yang berhak atas tahta kerajaan.

Pada suatu hari Sultan Ibrahim mengundang para menterinya, dan orang besar kerajaan Pasir. Dalam pertemuan itu Sultan Ibrahim mengemukakan kesulitan-kesulitan yang akan terjadi kemudian hari, dengan peraturan baru dari gubernemen untuk mengadakan peraturan heerendienst atau rodi, yang mewajibkan rakyat kerja paksa setiap tahun 20 hari disamping kewajiban membayar uang kepala. Jika kita melaksanakan peraturan ini, kita akan bertentangan dengan rakyat, karena jelas rakyat tidak akan menurut saja peraturan yang sangat memberatkan beban dan kehidupan mereka. Dan kalau peraturan ini tidak dilaksanakan, pasti gubernemen akan menghukum kita, karena dianggapnya melawan peraturan gubernemen. Dianjurkannya agar supaya para menteri setuju, demikian juga para bangsawan yang hadir untuk menyerahkan saja pemerintahan kerajaan Pasir langsung dilaksanakan gubernemen Belanda, dengan meminta ganti rugi, untuk para bangsawan yang berhak mewarisi tahta kerajaan.

Dalam perundingan itu, masing-masing mengeluarkan pendapat. Dipihak Aji Nyesei sebagai Sultan Muda dan sebagai menteri tidak bersedia menyerahkan kepada pemerintah Belanda, karena sewaktu-waktu yang baik, ia

dapat menjadi sultan. Dipihak Pengeraan Panji Nata Kesuma bin almarhum Sultan Abdurrachman tidak setuju, kerajaan Pasir adalah pusaka turun-temurun harus diperintah oleh jurat raja-raja Pasir.

Tetapi dipihak Aji Meja Pengeraan Menteri, Pengeraan Mas, Pengeraan Dipati yaitu menteri-menteri kerajaan Pasir, setuju supaya kerajaan Pasir diserahkan saja kepada Belanda dengan ganti rugi. Kalau sudah disetujui gubernemen Belanda, baru uangnya dibagi-bagi kepada menteri-menteri kerajaan dan para bangsawan Pasir yang berhak atas tahta kerajaan. Pendapat yang terakhir ini disokong oleh Sultan Ibrahim Khaliluddin. Kemudian mereka membuat surat pernyataan yang akan dikirimkan kepada residen di Banjarmasin dan diteruskan kepada pemerintahan di Betawi.

Tiada berapa lama berselang didapat balasan dari residen di Banjarmasin, yang isinya bahwa pemerintah gubernemen di Betawi setuju menerima penyerahan kerajaan Pasir dan bersedia mengganti kerugian atau schade-loostelling kepada sultan, para menteri serta kepada para bangsawan Pasir yang berhak atas kerajaan Pasir, dengan perjanjian bahwa sultan, para menteri harus meletakkan jabatan dan menyerahkan segala kekuasaannya dari pemerintah kerajaan Pasir.

Demikian juga para bangsawan Pasir tidak berhak lagi atas kerajaan Pasir.

Mendengar berita bahwa sultan dan para menterinya menyerahkan kerajaan Pasir, Pangeran Panji, Panglima Sentik dan para bangsawan yang menentang usul itu, mengadakan pula gerakan bersama-sama rakyat, tidak mengakui sultan Pasir dengan para menterinya sebagai pemerintah kerajaan Pasir yang sah. Sebahagian besar mendukung Pangeran Panji dan kawan-kawannya.

1905. Door de onmacht van den Soeltan van Pasir ontstaat opnieuw onrust onder Panglima Sentik, een der hoofden der anak radja party, die niet genegen is het landschap aan het gouvernement af te staan. De Soeltan wordt nu door het gouvernement beboet en een colonne naar Pasir gezonden om tegen de kwaadwilligen te patrouilleren, waarmee de rust hersteld. (Juli).

Terjemahan

Disebabkan kurangnya kewibawaan Sultan Pasir, terjadi pula gangguan keamanan dibawah pimpinan Panglima Sentik, seorang dari pemimpin anak raja-raja yang tiada bersenang hati terhadap penyerahan kerajaan kepada gubernemen Belanda. Sultan diminta ganti kerugian oleh gubernemen dan sepasukan tentara dikirim ke Pasir untuk menghadapi perusuh-perusuh itu yang kemudian dapat diamankan kembali.

Setelah surat balasan dari pemerintah di Betawi diterima, Sultan Ibrahim Khaliluddin saudaranya Pengeraan Menteri dan mertuanya La Maraja berlayar ke Banjarmasin. Entah bagaimana pembicaraan dan perundingan Sultan Ibrahim dan residen di Banjarmasin, tak seorangpun mengetahui, selain dari pengeraan Menteri dan mertuanya La Maraja.

Dalam bulan Oktober 1908 oleh residen J. van Weert dengan perantaraan tuan civiel gezaghebber Tanaha Gerogot Kapten Droest memberitahukan kepada Sultan Pasir bahwa permohonannya minta ganti kerugian dengan

menyerahkan seluruh hak-haknya dikerajaan Pasir kepada gubernemen Belanda, diterima baik oleh pemerintah di Betawi dan tidak lama lagi uang ganti kerugian sebanyak N.F. 377.267 (tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah belanda) akan dikirim ke Tanah Gerogot dan diserahkan kepada sultan, para menteri serta para bangsawan yang berhak atas kerajaan Pasir, yang namanya seperti berikut :

1. Sultan Ibrahim Khaliluddin	N.F. 101.945.
2. Pengeran Nata Panembahan Sulaiman	N.F. 85.000.
3. Aji Nyesei Raja Muda	N.F. 66.267.
4. Pangeran Panji bin Sultan Abdurrachman	N.F. 28.865.
5. Pengeran Perabu Kampung Semuntai	N.F. 25.200.
6. Pengeran Menteri Kampung Pasir	N.F. 10.000.
7. Pengeran Dipati Kampung Pasir	N.F. 10.000.
8. Pengeran Mangku Tg. Aru Kampung Landing	N.F. 10.000.
9. Pengeran Mas	N.F. 10.000.
10. Pengeran Singa Jaya Kampung Muara Adang	N.F. 10.000.
11. Pengeran Ratu Raja Besar	N.F. 10.000.
12. Pengeran Suria Nata Kampung Lempesu	N.F. 10.000.
 Jumlah	N.F. 377.267.

Tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh gulden).

Selain daripada itu, diterangkan pula oleh tuan gezaghebber kepada Sultan Khaliluddin, bahwa apabila orang yang tersebut masing-masing telah menerima uang pembagiannya, maka dengan sendirinya Sultan Pasir bersama-sama dengan menterinya, serentak melepaskan jabatannya, tidak turut lagi memerintah di kerajaan Pasir. Begitu juga para bangsawan Pasir, menyerahkan segala hak kekuasaannya atas kerajaan Pasir kepada gubernemen Belanda.

Kemudian berita ini disampaikan pula oleh Sultan Ibrahim, kepada Pengeran Nata Penembahan Sulaiman dan Pengeran Ratu Raja Besar, tetapi dengan lain cara. Dikhabarkannya bahwa pemerintah Belanda akan mengirimkan uang ganti kerugian kepada para bangsawan Pasir yang berhak atas kerajaan Pasir, terutama kepada Pengeran Nata Penembahan Sulaiman, lantaran melepaskan haknya menjadi sultan Pasir tempo hari akan dibayar N.F. 85.000 dan kepada Pengeran Ratu Raja Besar karena meletakkan jabatannya dibayar N.F. 10.000.

Begitu juga para bangsawan yang lain, lantaran melepaskan haknya dijelaskan oleh sultan artinya tidak turut bekerja pada pemerintah, akan mendapat bayaran juga.

Sultan Ibrahim sendiri melepaskan haknya dan menerangkan kepada kedua pengera itu, ia sebagai sultan mendapat ganti rugi sebanyak N.F. 100.000. Mendengar khabar ini, bangsawan Pasir sangat gembira karena akan mendapatkan uang masing-masing sebagai tersebut di atas, dengan pengertian melepaskan haknya atas kerajaan Pasir, yaitu tidak turut bekerja pada pemerintahan Pasir.

Demikianlah dalam bulan April 1908 uang N.F. 377.267 yang dikirim oleh gubernemen Belanda diterima oleh tuan gezaghebber Tanah Grogot berupa uang perak terdiri dari perak dan ringgit, yang akan dibagikan kepada sultan para menteri dan bangsawan Pasir yang berhak atas kerajaan Pasir.

Pada suatu hari yang telah ditentukan oleh tuan gezaghebber Tanah Grogot telah mengundang sultan Ibrahim, para menteri dan para bangsawan Pasir yang berhak atas kerajaan Pasir.

Sesudah semuanya hadir, maka tuan gezaghebber menerangkan bahwa pemerintah gubernemen Belanda telah setuju menerima penyerahan kerajaan Pasir dari Sultan Pasir, para menteri dan para bangsawan Pasir yang berhak atas kerajaan Pasir, dengan ganti kerugian. Dari itu gubernemen Belanda telah mengirim uang sebesar N.F. 377.267. yang masing-masing akan diserahkan kepada yang berhak.

Setelah itu Sultan Ibrahim menjelaskan pula bahwa hadirin dalam bahasa Pasir, bahwa pembayaran ini adalah ganti kerugian kepada para bangsawan Pasir dan tidak turut memerintah kerajaan Pasir artinya melepaskan haknya yang ada di kerajaan Pasir.

Kemudian tuan gezaghebber mengeluarkan suatu akte penyerahan kerajaan dan selembar daftar yang harus ditanda tangani setelah penerimaan uang menurut haknya masing-masing.

Yang pertama-tama menanda tangani surat akte penyerahan dan daftar penerimaan uang ganti rugi ialah Sultan Ibrahim, lalu menerima uang sebanyak N.F. 101.945 berupa uang perak terdiri perak dan ringgit. Yang kedua Pengera Panata Penembahan Sulaiman sebanyak N.F. 85.000. Yang ketiga menanda tangani ialah Pengera Perabu Kampung Semuntai menerima uang sebanyak N.F. 25.2000. Yang keempat Pengera Menteri sebanyak N.F. 10.000. Yang kelima Pengera Dipati sebanyak N.F. 10.000. Yang keenam menanda tangani dan menerima uang sebanyak N.F. 10.000 ialah Pengera Ratu Raja Besar. Yang ketujuh Pengera Mas menerima sebanyak N.F. 10.000. Yang kesepuluh Pengera Singa Muara Adang menerima sebanyak N.F. 10.000.

Yang kesebelas Pengera Panji Nata Kesuma bin Sultan Abdurrachman disuruh menanda tangani menerima uang sebanyak N.F. 28.855. Pengera ini tidak mau menanda tangani surat tersebut serta tidak mau menerima uang sebanyak N.F. 28.855 dan menyatakan kepada gezaghebber Belanda itu, bahwa ia tidak mau menjual negerinya, sedangkan waktu mengadakan perundingan Sultan Ibrahim ia sendiri tidak setuju menyerahkan kerajaan Pasir kepada Gubernemen Belanda.

Mendengar pembicaraan Pengera Panji itu, tuan gezaghebber itu, menjadi marah dan menerangkan bahwa keluarganya yang sama-sama dengan dia telah menanda tangani dan menerima uang tanda setuju dengan penyerahan kerajaan Pasir kepada gubernemen. Kalau pengera tidak setuju menanda tangani dan menerima uang itu, nanti akan diserahkan kepada orang lain.

Kemudian Sultan Ibrahim menerangkan kepada gezaghebber bahwa dalam perundingan antara menteri dan para bangsawan, Pengeran Panji juga menyetujui penyerahan kerajaan kepada Belanda, Pengeran Panji menyangkal karena itu terjadi pertengkaran antara Sultan Ibrahim dan Pengeran Panji. Lalu gezaghebber bertindak mengatasinya. Karena kejadian itu, Pengeran Panji tidak senang, lalu meninggalkan sidang dengan tidak menandatangani surat penyerahan dan tidak menerima uang yang disediakan pembahagiannya, sebagai ganti kerugian untuk menyerahkan haknya atas kerajaan Pasir.

Karena peristiwa itu, Sultan Ibrahim berunding dengan para menteri yang hadir, keputusan mereka uang ganti rugi itu diserahkan kepada Pengeran Ratu Agung Luasi sebanyak N.F. 28.855.

Yang kedua belas disuruh menandatangani ialah Aji Nyesei Raja Muda. Karena Raja Muda sangat bimbang terpaksa ia meminta pertimbangan kepada ayahandanya Pengeran Nata Penembahan Sulaiman yang hadir pada waktu itu. Pikiran beliau kalau uang itu tidak diterima tentu akan dapat marah dari tuan gezaghebber seperti Pengeran Panji dan uang itu tentu diserahkan pula kepada orang lain. Kalau diterima uang itu, berarti menyerahkan pangkatnya sebagai menteri dan uang ganti penyerahan haknya atas kerajaan Pasir dan menerima uang perak dan ringgit seharga N.F. 66.287.

Dengan penanda tanganan surat akte penyerahan kerajaan Pasir kepada gubernemen Belanda dan menerima uang ganti kerugian seperti tersebut di atas, maka pada hari itu juga tenggelamlah kerajaan dan kesultanan Pasir untuk semala-lamanya. Pada hari itu Sultan Ibrahim Khaliluddin dan para menteri kerajaan Pasir serentak meletakkan jabatannya dan menyerahkan segala hak dan kekuasannya kepada wakil gubernemen Belanda Kapten van Droest Gezeghebber di Tanah Gerogot.

IV. Pemberontakan Pengeran Panji terhadap Belanda

Setelah Pengeran Panji bertengkar dengan Kapten Droest, menolak menandatangani surat penyerahan kerajaan Pasir kepada gubernemen Belanda dan tidak mau menerima uang ganti kerugian untuk melepaskan haknya atas kerajaan, ia meninggalkan sidang. Kemudian ia segera bermusyawarah dengan pengikut-pengikutnya Panglima Sentik, Singa Negara dari Pasir tengah, Kepala Suku Dayak Kaka Degu, Aji Muyub dan lain-lain.

1908. Op 1 Mei de invoring van rechstreeksch bestuur in Pasir tegen schade-loosstelling aan landsgrooten; slecht Pengeran Panji verzamelt vorsten-telgen en vogelingen omtrachten het verloren gezag te winnen; door ziekte verplicht naar Banjarmasin te gaan, loopt zijn actie evenwel dood. Verder er nog een Dayakshoolfd, Demoeng, dat zicht daad-werkelyk verzet, doch na eenig wapengeweld onzer patrouillier eveneens onderwerpen.

Terjemahan

Pada 1 Mei 1908 dilakukan pemerintahan langsung oleh gubernemen di kerajaan Pasir dengan ganti rugi. Hanya Pengeran Panji dengan mengumpulkan anak cucu (turunan) raja-raja, mencoba merebut ke-

kuasaan. Karena sakit terpaksa pergi ke Banjarmasin, sehingga gerakan itu mati dengan sendirinya. Selanjutnya oleh seorang Kepala Dayat bernama Demoong mengadakan perlawanan dengan sengit, tetapi setelah dilakukan patroli bersenjata, mereka melarikan diri.

Pengeran Panji adalah seorang yang ramah-tamah dan seorang pemeluk agama Islam yang taat mengerjakan amal ibadat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Banjarmasin ia banyak berkenalan tokoh-tokoh agama dan anggota anggota Serikat Islam yang baru saja berdiri di Banjarmasin. Pada tahun 1914 berdirilah cabang Partai Serikat Islam di Tanah Grogot. Setelah kembali ke Tanah Gerogot ia berdiam di pedalaman bersama-sama dengan adiknya Aji Mojo. Beliau menemui para keluarganya di pedalaman, dan menerangkan kebusukan politik pemerintah kolonial Belanda, yang mengadu-domba para bangsawan dan rakyat Pasir, sehingga terjadi ada diantara bangsanya sendiri yang sampai hati menjual negerinya kepada penjajah Belanda. Dengan sendirinya lama-kelamaan rakyat Pasir mulai sadar akan kecurangan dan politik adu domba Belanda.

Kepala Suku Dayak Kaka Degu dengan beribu-ribu pengikutnya dengan rela menjadi pengikut Pengeran Panji menentang pemerintah dan diantaranya banyak yang masuk menjadi agama Islam yang taat.

Telah bulat mufakat mereka, untuk menyerbu serdadu-serdadu Belanda yang ada di Tanah Gerogot. Berita akan timbulnya pemberontakan, diketahui oleh pemerintah kolonial Belanda di Tanah Gerogot. Dengan segera dikirim sepasukan serdadu yang mempunyai alat persenjataan yang lengkap untuk menangkap Pengeran Panji dengan kawan-kawannya.

Keberangkatan serdadu-serdadu yang dikirim dari tanah Gerogot ini, diketahui oleh Pengeran Panji. Karena itu beliau dengan saudaranya Aji Mojo dengan keluarganya Aji Benson dan Panglima Sentik beberapa kepala Suku Dayak Pasir, mengadakan persiapan untuk melawan serdadu akan datang ke tempat itu.

Pada suatu tempat ditepi sungai Kendilo dengan diam-diam Pengeran Panji dan kawan-kawannya menghadang serdadu-serdadu itu. Pagi-pagi dari tempat persembunyian mereka, kelihatan 6 buah perahu besar-besaran berisi serdadu-serdadu Belanda. Sesudah perahu-perahu itu mendarat di tempat yang tidak jauh dari persembunyian mereka. Pengeran Panji dengan kawan-kawannya serempak menyerang dengan bersenjatakan tombak, sumpitan, mandau dan perisai. Seketika itu, terjadilah pertempuran antara serdadu-serdadu Belanda yang bersenjatakan senapan dan pistol dengan pihak Pengeran Panji bersenjatakan mandau, tombak dan sumpitan.

Karena persenjataan yang tidak seimbang itu, Pengeran Panji dengan kawan-kawannya terdesak dan Pengeran Panji sendiri dan kawan-kawannya banyak yang tertangkap. Dengan keputusan gubernemen Belanda Pengeran Panji dan Panglima Sentik untuk pengamanan sementara diasingkan ke Banjarmasin.

1912. Pengeran Pandji een der voormalige landsgrooten van Pasir, weet in dat voormalige landschap ruim 3000 Dayaks te bekeren tot den Islam inder bedreiging met een komst van Turken die alle ongelooijigen zullen

dooden. Pengeran Pandji doet pogingen om zicht met hulp der nieuw bekeerden tot soeltan van Pasir te doen verheffen; zyn tydige gecaggen neming en aanhousing te Manjermasin voorkomst ongerel dheden.

Terjemahan

Pengeran Panji bekas orang besar kerajaan Pasir, mengetahui bahwa di Pasir ada 300 orang Dayak yang baru masuk Islam dengan mengecoh mereka bahwa bangsa Turki akan datang dan membunuh orang-orang yang tidak beragama. Pengeran Panji berusaha dengan bantuan orang-orang yang baru masuk Islam itu, ia dapat menjadi sultan; dengan penangkapannya pada waktu yang tepat, ia ditahan di Banjarmasin, untuk mencegah keadaan yang berbahaya.

Meskipun Pengeran Panji telah dibuang Belanda ke Banjarmasin, gerakan untuk mengusir Belanda dari Pasir masih diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. Pada tahun 1913 pengikutnya yang bernama Matjanang, mengadakan pula perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Sementara gerakan itu terhenti dengan tertangkapnya Matjanang.

Pada tahun 1915 saudara Pengeran Panji, dengan pengikut-pengikutnya yang terdiri orang Pasir dan Dayak-dayak yang beragama Islam, mengadakan lagi pemberontakan. Ia tertangkap oleh serdadu-serdadu Belanda, kemudian ditahan di Kota Baru. Meskipun beberapa pemimpinnya tertangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda rakyat Pasir tiada gentar terhadap serdadu-serdadu Belanda. Seluruh rakyat Pasir bertekad bulat untuk mengadakan pemberontakan.

Pada bulan Juni 1915 terjadi perlawanan bersenjata di Pasir. Mula-mula kejadian itu, di beberapa kampung, kemudian meluas keseluruhan daerah Pasir sehingga sudah merupakan saat pemberontakan total. Beberapa pemuka-pemuka bangsa Pasir dan kepala-kepala suku Dayak bersatu mengadakan perlawanan. Pemimpin-pemimpinnya terdiri dari Wana, Sebaya dan Uma Bongkat dari daerah Biu Pasir Selatan, Kaka Degu kepala suku Dayak dari hulu Tuyu, Singa Negara dan Walik kedua adalah kepala suku dari Satu Pasir Tengah, yang banyak memperoleh pengikut dengan perjanjian akan membebaskan mereka dari pajak uang kepala dan rodi. Mereka bersumpah untuk melaksanakan wasiat dari Pengeran Panji.

Ketika Pengeran Panji mendekati akhir hayatnya, ditempat tidur pembuangannya di Banjarmasin, ia bersumpah bahwa ia dan pengikutnya akan melakukan pembalasan dendam terhadap pegawai gubernemen yang berkebangsaan Eropah dan mengharap pemerintah kerajaan akan kembali memerintah rakyat Pasir.

Sejalan dengan pemberontakan Pasir itu, Partai Serikat Islam mulai berkembang di seluruh tanah air. Sejak berdirinya Cabang Serikat Islam tahun 1914, organisasi mendapat sambutan yang baik dari rakyat Pasir. Seorang anggota Pengurus dari organisasi itu bernama Soesrokadono dari Surabaya sengaja datang ke Pasir untuk mempropagandakan tentang maksud dan tujuan Sarikat Islam. Dalam rangka kunjungan pengurus S.I. itu, ia mempunyai kesempatan berkenalan dengan bekas Sultan Pasir Sultan Ibrahim Khaliluddin, bekas menterinya Pengeran Menteri, para bangsawan Pasir yang lain. Dari penjelasan saudara Soesrokadono bekas dan para bangsawan Pasir

tertarik, sehingga banyak mereka yang menjadi anggota Serikat Islam. Sultan Ibrahim sendiri bersedia menjadi presiden S.I. di Tanah Gerogot dan adiknya Pengera Menteri menjadi Vice-presiden. Dengan masuknya Aji Nyesei Raja Muda dan Pengera Ratu Raja Besar, anggota Serikat Islam semakin bertambah banyak.

Dengan adanya penerangan politik dari S.I. barulah para bangsawan itu mengerti dan mempunyai kesadaran berpolitik serta insya bahwa selama ini mereka dijadikan alat kolonial dan diadu domba sesama bangsanya. Karena kesadaran itu, barulah mereka mengerti dan mengakui pendirian Pangeran Panji yang tidak mau menyerahkan kerajaannya tanah airnya kepada penjajah Belanda. Dengan diam-diam mereka mendukung dan bergabung dengan kelompok Pangeran Panji di daerah pedalaman.

Hampir semua para menteri, bekas sultan yang menanda tangani surat akte penyerahan kerajaan Pasir, berbalik menentang gubernemen Belanda. Pengera Ratu Raja Besar bersama-sama Andin Ngoko, Anding Gedang dan Anding dek memimpin gerakan dibawah tanah dibagian teluk Apar. Pengera Singa bersama-sama Wana dan Sebaya memimpin gerakan dibawah tanah dibagian Teluk Adang.

Aji Nyesei gelar Pengera Jaya Kesuma Ningrat, bersama-sama dengan Pengera Perwira mengadakan gerakan dibawah tanah di daerah Pasir Benewa sampai ke pedaaman Kali Kendilo.

Dengan adanya perlawanan bersenjata pengikut-pengikut Pengera Panji dan kawan-kawannya serta gerakan politik Serikat Islam dibawah pimpinan ex Sultan Ibrahim, Pengera Menteri, Pengera Raja Muda, Pengera Ratu Raja Besar dengan para bangsawan Pasir, dapat dikatakan roda pemerintahan kolonial Belanda tidak berjalan sama sekali. Patroli-patroli serdadu Belanda kerap kali diserang dengan tiba-tiba, sehingga mereka tidak berani memasuki pedalaman Pasir.

Mula-mula patroli Belanda dibantu serdadu patroli dari Kandangan. Pada bulan Agustus tiba bantuan pasukan dari Banjarmasin. Terjadi pertempuran dengan kelompok pejuang Wana dan Panglima Singa. Kedua pemimpin ini tertangkap serdadu Belanda.

Pada bulan Nopember datang pula 2 pasukan infantri dari Banjarmasin untuk mengamankan daerah pemberontak yang dipimpin oleh Andi Ngoko dan Anding Gedang.

Bulan Desember datang pula bala bantuan serdadu-serdadu Belanda dari Jawa untuk memadamkan pemberontakan itu. Pada tahun 1916 barulah serdadu-serdadu Belanda dengan bala bantuan dari Banjarmasin, Kandangan dan Jawa mengadakan serbuan ke pedalaman Pasir. Mula-mula serdadu-serdadu kolonial Belanda menangkap pemimpin-pemimpin Serikat Islam. Bekas Sultan Ibrahim, Aji Nyesei Raja Muda, Pengera Menteri dan Pengera Perwira dibawa ke Banjarmasin. Dengan keputusan pemerintah kolonial Belanda, cabang Sarikat Islam di Tanah Gerogot dianggap berbahaya untuk kepentingan umum, dan dengan besluit gubernemen tanggal 19 Nopember 1917 No. 34 Partai itu dibubarkan. Pengurus-pengurusnya dinyatakan bersalah karena menghasut rakyat Pasir mengadakan pemberontakan.

Oleh pemerintah Belanda dengan beslit gubernemen tanggal 31 Juli 1918 No. 25 ditetapkan sebagai berikut :

1. Sultan Ibrahim Khaliliddin Kerajaan Pasir dihukum buang sumur hidup dan diasingkan ke Teluk Betung.
2. Pengera Menteri bekas Menteri Kerajaan Pasir dihukum seumur hidup dan diasingkan ke Padang.
3. Pengera Perwira dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Banyumas.
4. Aji Muyub ke Bangkalan.
5. Aji Nyesei Pengera Jaya Kesuma Ningrat Raja Muda Pasir dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Banjarmasin. Sesudah itu, operasi militer Belanda digiatkan terus, sehingga hampir semua pemimpin pemberontakan itu tertangkap dan dijatuhi hukuman.
6. Pengera Singa dihukum buang 10 tahun di Garut.
7. Andin Dek dan Andin Ngoko dihukum masing-masing 10 tahun dan diasingkan ke Aceh dan Sawah Lunto.
8. Andin Gedang Sebaya dan Wana masing-masing dihukum 10 tahun diasingkan ke Semarang, Cilacap dan Belitar.

Demikianlah nasibnya para pahlawan dan pejuang Pasir pada jaman penjajahan Belanda, yang telah berkurban dengan jiwa dan raganya, menjalani hukumannya dengan sabar dan tawakal. Sultan Ibrahim sesudah beberapa tahun di Teluk Betung selalu menderita sakit kemudian dipindahkan ke Cimahi. Sakit beliau bertambah berat sehingga beberapa tahun meninggal dunia di tempat pembuangan itu. Pengera Menteri sesudah beberapa tahun menjalani hukumannya di Padang, meninggal dunia di tempat itu.

Adapun para pejuang-pejuang lain semua senasib, meninggal dunia dalam pembuangan, kecuali Andin Dek dan Pengera Jaya Kesuma Ningrat bekas Sultan Muda dengan selamat kembali ke Pasir sesudah menjalani hukumannya.

Pengera Panji yang ditahan di Banjarmasin, kemudian dengan beslit gubernemen tanggal 22 April 1914 No. 14 dibuang ke Padang, tetapi sebelum berangkat ke tempat pembuangannya meninggal di Pasir.

Demikianlah riwayat kerajaan Pasir dengan pahlawannya Pengera Panji Nata Kesuma dan kawan-kawannya seperjuangan yang menentang pemerintah Belanda yang dengan akal licinnya mengadu-domba dan menindas rakyat Pasir.

Samarinda, 28 September 1981
Penyusun,
ttd.

1. Catatan dari Aji Raden Abdurrachman, ex Sekretaris Dewan Pasir.
2. Informasi dari Aji Nyesei Pengeran Jaya Kesuma Ningrat Raja Muda Pasir.

3. Kroniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo door. Dr. Elisenberger.

Sumber-sumber sejarah/penelitian :

1. Ceritera-ceritera rakyat.
2. Informasi dari Aji Lambat bekas anggota Dewan Pasir.
3. Aji Nyesei gelar Pengeran Jaya Kesuma Ningrat, ex Raja Muda Pasir.
4. Catatan-catatan Aji Raden Abdurrachman pegawai yang diperbantukan pada Neo-Zelbestuur Pasir.
5. Kriniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo door Dr. J. Eisenberger.

Lampiran I

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26/A.I/1981
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN SEMINAR KESEJARAHAN DI JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah mengadakan Seminar Kesejarahan di Jakarta;

b. bahwa untuk dapat tercapainya tertib kerja yang berdaya guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka dipandang perlu membentuk "Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesejarahan di Jakarta".

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1981;
c. Nomor 47 Tahun 1979;
d. Nomor 237/M Tahun 1978;
e. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyempurnaannya;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0222 e/0/1980 tanggal 11 September 1980;
b. Nomor 0122/P/1981 tanggal 7 April 1981;
3. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran 1981/1982 Nomor 462/XXIII/3/1981 tanggal 12 Maret 1981.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Membentuk "Panitia Pengarah Seminar" dengan tugas mengarahkan serta menyelesaikan sesuatu agar penyelenggaraan Seminar Kesejarahan mencapai hasil yang diharapkan.
2. Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai anggota sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Mengangkat Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesejarahan yang bertugas mengadakan persiapan pelaksanaan dan penyelesaian Seminar Kesejarahan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Seminar Kesejarahan yang namanya seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam DIP Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 12 Maret 1981 Nomor 462/XXIII/3/1981.

- KEEMPAT** : Apabila pelaksanaan Seminar Kesejarahan telah selesai, Panitia Seminar dianggap bubar, dan mewajibkan Ketua Panitia Seminar menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya serta pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Keputusan ini berlaku selama 3 bulan mulai 1 Agustus 1981.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 1981.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123

SALINAN KEPUTUSAN INI

Disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri Koordinator,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P. dan K.,
8. Inspektor Jenderal Dep. P. dan K.
9. Kepala BP3K Dep. P. dan K.,
10. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
11. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam Lingk. Dep. P dan K.,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor dan P.N. dalam lingk. Dep. P. dan K.,
14. Semua Kepala Kanwil Dep. P. dan K. di Propinsi,
15. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I.,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P. dan K.
18. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Ybs. untuk seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana
Direktorat Jenderal Kebudayaan,

ttd

Sutarso, SH

NIP. 130186291

LAMPIRAN Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 26/A.I/1981
Tanggal : 17 Juli 1981.

Daftar Susunan Keanggotaan Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesejahteraan di Jakarta

PELINDUNG:

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio — Sebagai Pelindung;

PANITIA PENGARAH:

1. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo — Sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. S. Budhisantoso — Sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Drs. Anhar Gonggong — Sebagai Sekretaris;
4. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto — Sebagai Anggota;
5. Dr. R.P. Suyono — Sebagai Anggota;
6. Drs. Bastomi Ervan — Sebagai Anggota;
7. Drs. Buchari — Sebagai Anggota;
8. Drs. Uka Tjandrasasmita — Sebagai Anggota;
9. Drs. Abdurachman Surjomihar-djo — Sebagai anggota.
Sutrisno Kutoyo — Sebagai Penanggung Jawab Penye-lenggara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 1981
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

ttd.

ttd

Sutarso S.H.

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130186291

NIP. 130119123

Lampiran II

DAFTAR PESERTA SEMINAR SEJARAH NASIONAL III.

I. PANITIA PENGARAH

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Prof. Dr. Haryati Soebadio | — Pelindung |
| 2. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo | — Ketua/Anggota |
| 3. Dr. S. Budhisantoso | — Wakil Ketua/anggota |
| 4. Drs. Anhar Gonggong | — Sekretaris |
| 5. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto | — Anggota |
| 6. Dr. R.P. Suyono | — Anggota |
| 7. Drs. Bastomi Ervan | — Anggota |
| 8. Drs. Buchari | — Anggota |
| 9. Drs. Uka Tjandrasasmita | — Anggota |
| 10. Drs. Abdurrachman Suryomihardjo | —Anggota |

II. PANELIS

- | |
|-----------------------------------|
| 1. Dr. S. Budhisantoso |
| 2. Dr. Taufik Abdullah |
| 3. Dr. Kuntowijoyo |
| 4. Dr. Edi Ekadjati |
| 5. Drs. Amir Ruchiatmo |
| 6. Prof. Dr. Mattulada |
| 7. Dr. Nico Kana |
| 8. Drs. Mundardjito |
| 9. Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar |
| 10. Dr. Steve Jawanae |
| 11. Dr. T. Ibrahim Alfian |
| 12. Dr. Onghokham |
| 13. Dr. Yang Aisyah |
| 14. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto |
| 15. Dra. Mona Lohanda |
| 16. Dra. Sumartini |
| 17. Prof. Dr. Sulastin Sutrisno |
| 18. Dr. Sri Wulan Rudjiati |
| 19. Dr. Ayat Rochaeddy |
| 20. Drs. F.X. Sutjipto |
| 21. Dr. Nico L. Kalangie |

III. Seksi-Seksi:

Seksi Pra Sejarah

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. R.P. Suyono | — Ketua |
| 2. Drs. Goenadi Nitihaminoto | — Anggota/pembawa naskah |
| 3. Drs. Harry Truman Simanjuntak | — Anggota/pembawa naskah |
| 4. Drs. D. Suryanto | — Anggota/pembawa naskah |
| 5. Drs. Haris Sukendar | — Anggota/pembawa naskah |
| 6. D.D. Bintarti | — Anggota/pembawa naskah |
| 7. Dr. R.P. Suyono | — Anggota/pembawa naskah |
| 8. Drs. Santoso Soegondo | — Anggota/pembawa naskah |
| 9. R. Budi Santosa Azis | — Anggota/pembawa naskah |

10. Ny. Nies A. Subagus — Anggota/pembawa naskah
11. J. Ratna Indraningsih Pangabean — Anggota/pembawa naskah
12. Drs. I Made Sutaba — Anggota/pembawa naskah
13. Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata — Anggota/pembawa naskah
14. Dra. Ayu Kusumawati — Anggota/pembawa naskah
15. Dra. Sumiati Atmosudiro — Anggota/pembawa naskah

Seksi Sejarah Kuno

16. Drs. Buchari — Ketua
17. Drs. I Gde Semade Astra — Anggota/pembawa naskah
18. Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo — Anggota/pembawa naskah
19. Dra. Ricadiana Kartakusumah — Anggota/pembawa naskah
20. Drs. Bambang Budi Utomo — Anggota/pembawa naskah
21. Dra. Sri Soejatmi Satari — Anggota/pembawa naskah
22. Drs. Moh. Umar — Anggota/pembawa naskah
23. Drs. Yanto Ditjosuwondo — Anggota/pembawa naskah
24. Drs. Nur Abbas — Anggota/pembawa naskah
25. Edhie Wuryantoro — Anggota/pembawa naskah
26. D.S. Setya Wardhani — Anggota/pembawa naskah
27. Drs. Buchari — Anggota/pembawa naskah
28. Drs. Rusyai Padmawidjaja — Anggota/pembawa naskah

Seksi Sejarah Pasca Kuno

29. Drs. Uka Tjandrasasmita — Ketua
30. Drs. P.J. Suwarno, SH — Anggota/pembawa naskah
31. Ahmad Adaby Darban — Anggota/pembawa naskah
32. Sagimun M.D — Anggota/pembawa naskah
33. Tawalinuddin Haris — Anggota/pembawa naskah
34. H. Abdullah Tayib, BA — Anggota/pembawa naskah
35. Drs. H. Ramli Nawawi — Anggota/pembawa naskah
36. Drs. Fendy E.W. Parengkuhan — Anggota/pembawa naskah
37. Drs. Aminuddin Kasdi — Anggota/pembawa naskah
38. Drs. A.A. Gde Putra Agung — Anggota/pembawa naskah
39. Dra. Marleily Asmuni — Anggota/pembawa naskah
40. M. Th. Naniek Harkantining-sih — Anggota/pembawa naskah
41. Drs. Moch. Hudan — Anggota/pembawa naskah
42. Drs. Ma'mun Abdullah — Anggota/pembawa naskah
43. Drs. E. Kosim — Anggota/pembawa naskah
44. Drs. Sauki Hadiwardoyo — Anggota/pembawa naskah
45. Drs. Daud Limbu Gau — Anggota/pembawa naskah
46. Drs. G. Moedjanto, MA — Anggota/pembawa naskah

Seksi Sejarah Penjajahan Kolonial

47. Drs. Djoko Sukiman /Dr. T. Ibrahim Alfian — Ketua
48. Drs. Suhartono — Anggota/pembawa naskah

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 49. Firdaus Burhan | — Anggota/pembawa naskah |
| 50. Drs. Nasief Chatib | — Anggota/pembawa naskah |
| 51. Drs. Imam Hilman | — Anggota/pembawa naskah |
| 52. Ida Bagus Sideman | — Anggota/pembawa naskah |
| 53. Drs. H. Siahaan | — Anggota/pembawa naskah |
| 54. Drs. A.A. Bagus Wirawan | — Anggota/pembawa naskah |
| 55. Drs. Suwardi, MS | — Anggota/pembawa naskah |
| 56. Dra. Tiurma L. Tobing | — Anggota/pembawa naskah |
| 57. Drs. Hellius Syamsuddin, MA | — Anggota/pembawa naskah |
| 58. Drs. R.Z. Leirissa | — Anggota/pembawa naskah |
| 59. Dra. Julianti Parani | — Anggota/pembawa naskah |
| 60. Drs. Didi Suryadi | — Anggota/pembawa naskah |
| 61. Drs. M. Idwar Saleh | — Anggota/pembawa naskah |
| 62. Drs. Rosad Amidjaja | — Anggota/pembawa naskah |
| 63. A.M. Djuliati Suroyo | — Anggota/pembawa naskah |
| 64. Moh. Noor ARS | — Anggota/pembawa naskah |
| 65. Drs. Djoko Utomo | — Anggota/pembawa naskah |

Seksi Sejarah Pergerakan Nasional

- | | |
|---|--------------------------|
| 66. Drs. Abdurrahman Suryo-
mihardjo | — Ketua |
| 67. Tengku Lukman Sinar, SH | — Anggota/pembawa naskah |
| 68. Dra. Soekesi Soemoatmodjo | — Anggota/pembawa naskah |
| 69. Wardiningsih Soerjohardjo | — Anggota/pembawa naskah |
| 70. Drs. Rusdi Sufi | — Anggota/pembawa naskah |
| 71. Drs. Mardanas Safwan | — Anggota/pembawa naskah |
| 72. Drs. Yusmar Basri | — Anggota/pembawa naskah |
| 73. Dra. Irna Hanny Hadisuwito | — Anggota/pembawa naskah |

Seksi Sejarah Mutakhir

- | | |
|--|--------------------------|
| 74. Prof. Dr. Nugroho Noto-
santo | — Ketua |
| 75. H.A.M. Effendy, SH | — Anggota/pembawa naskah |
| 76. Drs. Gazali Usman | — Anggota/pembawa naskah |
| 77. I Gde Putu Gunawan | — Anggota/pembawa naskah |
| 78. Drs. Suranto Sutanto | — Anggota/pembawa naskah |
| 79. J.R. Chaniago, Drs | — Anggota/pembawa naskah |
| 80. Drs. Adisusilo S.J. | — Anggota/pembawa naskah |
| 81. Ariwiadi | — Anggota/pembawa naskah |
| 82. Tri Wahyuning Mahrus
Irsyam, SS | — Anggota/pembawa naskah |
| 83. Husain Haikal | — Anggota/pembawa naskah |
| 84. Drs. Sutopo Sutanto | — Anggota/pembawa naskah |
| 85. Tanu Suherly | — Anggota/pembawa naskah |
| 86. J. Yogaswara | — Anggota/pembawa naskah |
| 87. Drs. Anhar Gonggong | — Anggota/pembawa naskah |
| 88. Susanto Zuhdi | — Anggota/pembawa naskah |
| 89. Amrin Imran | — Anggota/pembawa naskah |
| 90. Saleh A. Djamhari | — Anggota/pembawa naskah |
| 91. Masfar R. Hakim | — Anggota/pembawa naskah |
| 92. M. Idwar Saleh | — Anggota/pembawa naskah |
| 93. Moela Marboen | — Anggota/pembawa naskah |

Lampiran III

LAPORAN HASIL SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

PENGANTAR

Seminar Sejarah Nasional III dengan tujuan memasyarakatkan kesadaran bersejarah melalui penggalakan penelitian, penulisan, dan publikasi sejarah secara baik telah diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1981 di Jakarta.

Seminar telah membahas 17 makalah dalam sidang-sidang panel dan 86 dalam sidang-sidang seksi, dengan perincian sebagai berikut:

A. SIDANG PANEL

Sidang-sidang panel telah membahas:

1. *Etnohistori* dengan 4 makalah yang terdiri dari:
 - a. "Etnohistori Sebagai Pendekatan Sejarah di Indonesia", oleh Dr. S. Budhisantoso.
 - b. "Studi Kasus Komuniti Sebagai Pendukung Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. N.S. Kalangie
 - c. "Pengkajian Teks Lisan Sebagai Sumber Sejarah" oleh Dr. Stephanus Djawanai.
 - d. "Etnoarkeologi: Peranannya dalam Pengembangan Arkeologi Indonesia", oleh Drs. Mundardjito.

Kesimpulan: Mengingat keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia dan jangkauan masa sejarah yang sangat luas, sementara itu tradisi tulis mentulis dan sumber sejarah masih sangat terbatas, maka dirasa perlu untuk mengembangkan konsep-konsep, metodologi dan cara pengumpulan data yang mampu menggali dan memanfaatkan berbagai sumber sejarah yang tidak tertulis baik yang berupa teks lisan maupun lain-lain.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka pendekatan etnohistori perlu diselenggarakan secara terarah, khususnya dalam mengungkapkan sejarah kelompok etnis sebagai bagian dari masyarakat-masyarakat bangsa.

Sedang etnoarkeologi dirasa perlu dalam usaha memahami sejarah asal-usul, perkembangan, persebaran dan pembauran kebudayaan bangsa di masa lampau sebagaimana bercermin dalam kebudayaan materiil.

2. Historiografi Tradisional dengan 5 makalah yang terdiri dari:
 - a. "Struktur Politik dan Historiografi Tradisional" oleh Drs. F.A. Sutjipto.
 - b. "Kebudayaan Setempat dan Historiografi Tradisional" oleh Dr. Sri Wulan Rudjiati Mulyadi.
 - c. "Sastra dan Historiografi Tradisional" oleh Prof. Dr. Sulastin Sutrisno.
 - d. "Tokoh dan Historiografi Tradisional: Studi Kasus Tokoh Dipati Ukur" oleh Dr. Edi S. Ekajati.
 - e. "Peranan Benda Purbakala dalam Historiografi Tradisional" oleh Dr. Ayatrohaedi.

Kesimpulan: Historiografi Tradisional sebagai satu jenis penulisan sejarah yang disusun secara tradisional, berbeda dengan historiografi modern, karena ia berlandaskan pada pengertian dan pandangan penulis tentang sejarah dan kebudayaannya. Oleh karena itu pengkajian tulisan

sejarah tradisional amat penting artinya bagi penulisan sejarah nasional, khususnya dalam mengungkapkan nilai-nilai budaya, gagasan utama dan keyakinan yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa sejarah.

3. *Sejarah Lokal* meliputi 3 makalah, yaitu:

- a. "Di sekitar Sejarah Lokal di Indonesia" oleh Dr. Taufik Abdullah.
- b. "Sebuah catatan Tentang Bagaimana Lokalnya Sejarah Lokal" oleh Dr. Ibrahim Alfian.
- c. "Sejarah Lokal" oleh Dr. Ongkokham.

Kesimpulan: Penulisan sejarah lokal sangat penting artinya dalam menyusun sejarah nasional mengingat perkembangan masyarakat yang beragama sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar maupun kecil yang pernah berkembang dan banyaknya masyarakat kesukuan serta perkauman yang mengalami sejarah di lokalitas masing-masing, memerlukan pendekatan penulisan sejarah yang lebih banyak memperhatikan keadaan setempat dengan dinamikanya masing-masing.

4. *Sejarah Lisan* meliputi 3 makalah yang terdiri dari:

- a. "Wawancara Simultan: Suatu Experimen Dalam Sejarah Lisan" Oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
- b. "Sumber Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Kontemporer Indonesia" oleh Dra. Mona Lohanda.
- c. 'Kegunaan Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. Kuntowijoyo.

Kesimpulan: Kelangkaan sumber dokumenter mendorong sejarawan untuk mencari sumber lisan. Untuk penulisan sejarah mutakhir terutama sejarah revolusi, pengumpulan sumber lisan sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena semakin jauh jarak waktu yang semakin surut usia serta daya ingat para pelaku sejarah, akan semakin sukarlah penggaliannya. Dikhawatirkan bahwa sumber sejarah lisan itu akan punah sebelum berhasil direkam.

B. SIDANG SEKSI

Sidang-sidang seksi telah membahas:

1. *Prasejarah* yang meliputi 14 makalah (lihat lampiran daftar makalah)
2. *Sejarah Kuno*: meliputi 12 makalah (lihat lampiran daftar makalah)
3. *Sejarah Abad XVI — XVIII* meliputi 15 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
4. *Sejarah Abad XIX — Masa Perlawanan Terhadap Penjajah*, meliputi 16 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
5. *Sejarah Awal Abad XX — Perguruan Nasional* meliputi 10 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
6. *Sejarah Mutakhir* meliputi 19 makalah (lihat lampiran daftar makalah).

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sidang-sidang seksi telah menyimpulkan bahwa jarak antara Seminar Sejarah Nasional II dan III terlalu jauh, sehingga tampak adanya kesenjangan mutu antara makalah yang ditulis oleh para peserta Senior dan peserta yunior.

Adapun kesimpulan dari masing-masing seksi ialah sebagai berikut:

- 1. PRASEJARAH:**
 - a. Beberapa makalah mengungkapkan data baru yang penting untuk melengkapi sejarah manusia dan kebudayaannya. Pada masa prasejarah di Indonesia.
 - b. Sebagian makalah membahas keadaan masyarakat masa kini yang masih hidup dengan tradisi prasejarah (etnoarkeologi).
 - c. Dari pembahasan ternyata terdapat kesinambungan unsur-unsur kebudayaan prasejarah yang melintasi batas kurun waktu Indonesia Hindu, Indonesia Islam dan berlanjut sampai masa kini.
- 2. SEJARAH KUNA**
 - a. Tampak kemajuan dalam penelitian Sejarah Kuna, ternyata dibahasnya temuan-temuan baru, dan munculnya tafsiran-tafsiran baru atas sumber yang telah tersedia.
 - b. Munculnya muka-muka baru yang di antaranya baru pertama kali tampil dalam forum nasional, tetapi telah menunjukkan karya ilmiah yang cukup bermutu.
 - c. Adanya beberapa makalah yang mutunya agak kurang, yang diajukan oleh peserta dari daerah, yang rupa-rupanya amat kekurangan sumber kepustakaan sebagai bahan referensi.
 - d. Nampak kurangnya perhatian terhadap penggunaan sumber-sumber naskah kuna, baik yang membahas segi-segi prosesual, maupun segi struktural Sejarah Kuna Indonesia.
 - e. Dari makalah-makalah yang diajukan tampak bahwa para peneliti sejarah kunadihambat oleh kurang tersedianya hasil-hasil penelitian filosofis, khususnya, mengenai naskah-naskah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum, keagamaan, peraturan tentang tingkah laku bagi golongan-golongan masyarakat, dan lain-lain.
- 3. SEJARAH ABAD XVI — XVIII**
 - a. Di antara 14 makalah, hanya ada lima yang mengungkapkan data-data baru yang penting bagi memperkaya pengetahuan Sejarah Indonesia, yaitu mengenai masuk dan proses perkembangan Islam di Bima, Lombok, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali.
 - b. Masuk dan proses perkembangan Islam di Indonesia menimbulkan perubahan sosial-budaya dan pergeseran kekuasaan.
Walaupun demikian tetap terdapat kesinambungan sosial-budaya yang berciri Indonesia.
- 4. SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH**

Minat dan peran-serta dalam penulisan dan pembahasan sejarah abad XIX sangat besar, namun demikian kritisisme historis belum mendapat perhatian yang serius. Di samping itu masalah pendekatan atau kerangka acuan masih belum mendapat tempat dalam sebagian besar makalah.
- 5. SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL**

Beberapa makalah yang dibahas mengenai sejarah awal abad XX dan Pergerakan Nasional menunjukkan adanya penguasaan metodologis dan kemampuan penulisannya.
- 6. SEJARAH MUTAKHIR**

Nampak besarnya minat masyarakat terhadap sejarah Mutakhir, sehingga menuntut kecermatan dan peningkatan kemampuan metodologis dalam penelitian dan penulisan sejarah.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka diajukan saran-saran

umum sebagai berikut:

- a. Agar Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan secara bersinambung sekurang-kurangnya 4 tahun sekali.
- b. Agar topik yang hendak dibahas ditentukan terlebih dahulu, sehingga masalahnya lebih terpusat dan lebih banyak waktu untuk pembahasan. Selanjutnya saran dari masing-masing seksi ialah sebagai berikut:

1. PRASEJARAH

- a. Untuk menyempurnakan/memantapkan kronologi prasejarah Indonesia, penggunaan metode pertanggalan radiometris sangat diperlukan.
- b. Untuk menyusun perkerangkaan prasejarah Indonesia berdasarkan pada sosial ekonomi, diperlukan peningkatan penelitian paleo-ekologi yang terpadu.
- c. Penyebarluasan pola sosial ekonomi dalam perkerangkaan prasejarah Indonesia perlu ditingkatkan pola pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

2. SEJARAH KUNA

- a. Diharapkan kepada pemerintah, cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyediakan perpustakaan yang memadai bagi Universitas dan Institut yang mempunyai jurusan Sejarah dan Arkeologi, khususnya majalah-majalah ilmiah dalam kedua bidang tersebut. Baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Disarankan agar pemerintah memberi rangsangan bagi para ahli filologi untuk menggarap naskah-naskah kuna sebagai sumber informasi bagi penelitian dan penulisan sejarah dan arkeologi Indonesia.

3. SEJARAH ABAD XVI — XVIII

Peningkatan penelitian sejarah abad XVI — XVIII dirasa perlu untuk dilakukan secara lebih mendalam dengan memperhatikan sumber-sumber informasi dan metodologi yang sesuai, sehingga dapat mengungkapkan sejarah secara objektif.

4. SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

- a. Dirasa perlu peningkatan penelitian dan penulisan sejarah perlawanan terhadap penjajah dari seluruh daerah di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dipetik untuk dijadikan bahan guna menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air bagi segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan penyusunan bibliografi yang menyangkut sejarah dan kebudayaan dari setiap daerah yang antara lain memuat daftar makalah yang terdapat dalam majalah-majalah seperti *IMT, TNI, TBG, BKI*, dan lain-lain.
- c. Hendaknya diusahakan pula bahan-bahan arsip yang penting untuk penulisan sejarah suatu daerah.

5. SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

6. SEJARAH MUTAKHIR

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Jakarta, 13 Nopember 1981

Tim Perumus Seminar Sejarah Nasional III

Lampiran IV

DAFTAR MAKALAH SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

I. MAKALAH SEKSI PRA SEJARAH:

1. Tradisi Megalitik pada Makam Islam/Asta Tinggi Sumenep, oleh Drs. Goenadi Nitihaminoto.
2. Tradisi Masa Perundagian pada Masyarakat Batak, oleh Drs. Harry Truman Simanjuntak.
3. Watu Kandang Matesih: Arti pentingnya dalam Masa Perundagian, oleh Drs. D. Suryanto.
4. Peninggalan Megalitik khususnya tentang kubur Batu Megalitik Terjan, oleh Drs. Harry Sukendar.
5. Moko sebagai salah satu unsur penting masa perundagian, oleh DRA. D.D. Bintarti.
6. Masalah-masalah kronologi Prasejarah Indonesia, oleh Dr. R.P. Suyono.
7. Awal perdagangan gerabah di Indonesia, oleh Drs. Santoso Soegondo.
8. Tinjauan tentang tradisi kapal perimbas-penetak di Indonesia, oleh Drs. R. Budi Santosa Azis.
9. Tradisi serpih bilah di Indonesia, oleh Dra. Ny. Nies A. Subagus.
10. Situs kubur tempayan di Anyer, Jawa Barat, oleh Drs. J. Ratna Indra-ningsih.
11. Bentuk-bentuk megalit di Pura Bukit Mentik di desa Buwahan Kintamani, Bangli, oleh Drs. I Made Sutaba.
12. Pola penguburan sarkofagus di desa Tigawasa Buleleng, oleh Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata.
13. Peninggalan tradisi masa perundagian di Sumba Timur, oleh Drs. Ayu Kusumawati.
14. Tradisi masyarakat bercocok tanam di Liwolere, Larantuka, Nusa Tenggara Barat, oleh Dra. Sumiati Atmosudiro.

II. MAKALAH SEKSI SEJARAH KUNO

1. Teori tentang asal usul Ratu Cri Sang Ajnadevi, oleh Drs. Gde Made Astra.
2. Betulkah Artasura Retna Bumi Banten seorang raja Bali yang murka dan hina oleh Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo.
3. Rakryan Sanjiwana, oleh Dra. Richadiana Kartakusumah.
4. Timbul dan berlanjutnya pemukiman di daerah Kedu, oleh Drs. Bambang Budi Utomo.
5. Sejarah Batang Kuno dan sekitarnya. Studi wilayah Sejarah Lama, oleh Drs. Moh. Oemar.
6. Mithos Ratu Adil Jawa sebagai usaha motivasi penyatuan kembali Kerajaan Jenggala, oleh Drs. Yanto Dirjosuwondo.
7. Peninggalan Hinduisme di Aceh, oleh Drs. Nur Abbas.
8. Wanua I Tpi Siring, data prasasti jaman Balitung, oleh Drs. Edhi Wurjantoro.
9. Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu, oleh Dra. D.S. Setya Wardani.
10. Ulah pemungut pajak dalam masyarakat Jawa Kuno (Faudulent tax officials in ancient Javanese Society), oleh Drs. Buchari.
11. Candi Cangkuang dan permasalahannya, oleh Drs. Rusyai Padmawidjaja.
12. Kerajaan Kuantan, oleh Dra. Marlaely Asmuni.

III. MAKALAH SEKSI SEJARAH ARAB KE-16 – 18

1. Sejarah Kauman Yogyakarta. sebuah Studi perubahan Sosial, oleh Ahmad Adaby Darban.
2. Sombaopu, Bungaya dan beberapa kesalahan dalam penulisan sejarah, oleh Sagimun M.D.
3. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Lombok, oleh Tawalinuddin Haris.
4. Sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Bima, oleh H. Abdullah Tayib, B.A.
5. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan sampai akhir abad ke-18, oleh Drs. H. Ramli Mawawi.
6. Pengaruh penyebaran agama Islam terhadap kehidupan sosial politik di daerah Sulawesi Utara, oleh: Drs. Fendy E.W. Parengkuhan.
7. Peranan kepurbakalaan Islam untuk memahami kedatangan dan persebaran Islam di Jawa, oleh Drs. Aminuddin Kasdi.
8. Sejarah masuknya Islam di Karangasem Bali, oleh Drs. A.A. Gde Putra Agung.
9. Faham keislaman dan perkembangan politik dalam masa kerajaan Islam di Demak, oleh Drs. Moch Hudan.
10. Catatan singkat tentang Masyarakat kota Banten Lama abad ke-16, oleh Dra. M. Th. Naniek Harkantiningsih.
11. Masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah Sumatera Selatan; suatu tinjauan historis, oleh Drs. Ma'mun Abdullah.
12. Pertumbuhan idem kekuasaan Jawa: Studi kasus Kerajaan Mataram pada masa pertengahan abad XVIII, oleh Drs. Sauki Hadiwardoyo.
13. Masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, oleh Drs. Daud Limbu Gau.
14. Pergeseran kekuasaan dalam sejarah Mataram, oleh Drs. G. Moedjanto, MA.

IV. MAKALAH SEKSI MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

1. Bekel dan Gerakan sosial: Kasus Srikaton Surakarta 1888, oleh Drs. Suhartono.
2. Interpretasi positif atas pengaruh Inggeris Bengkulu, oleh Firdaus Burhan.
3. Perlawanan Sultan Mangkutur terhadap Belanda di Mandailing, oleh Drs. Nazief Chatib.
4. Peristiwa pembunuhan Asisten residen Nagel tahun 1845, oleh Drs. Imam Hilman.
5. Perang Kusamba 24 Mei 1949, oleh Ida Bagus Sidemen.
6. Keterlibatan Belanda dalam percaturan politik di Kalimantan Barat pada abad ke-19, oleh Drs. H. Siahaan.
7. Puputan Klungkung 28 April 1958. Perlawanan terhadap penjajah, oleh Drs. A.A. Bagus Wirawan.
8. Perlawanan Raja Haji Marhum Telok Ketapang-Malaka menghadapi Belanda (1782 – 1784), oleh Drs. Suwardi MS.
9. Pengkristenan Tanah Batak pertemuan dua kepentingan (Usaha mempertahankan Hababatahon dan kolonialisme Belanda) oleh Drs. Tiurma L. Tobing.
10. Perang Ngali dan Perang Sapugara di pulau Sumbawa tahun 1908, oleh Drs. Helius Syamsuddin, M.A.
11. Raja Jailolo (1811 – 1932). Gerakan Nativisme di Maluku, oleh Drs. R.Z.

Leirissa

12. Tradisi lokal dan penulisan sejarah Buton, Dra. Julianti Parani.
13. Pemberontakan Petani di Tanggerang 1924, Drs. Didi Suryadi
14. Wajib kerja di Karesidenan Kedu pada abad ke-19, oleh A.M. Djuliati Suroyo.
15. Pangeran Panji dari Kerajaan Pasir, oleh Noor Ars.
16. Pemogokan Buruh tani di Yogyakarta tahun 1882, oleh Drs. Djoko Utomo.

V. MAKALAH SEKSI PERGERAKAN NASIONAL

1. Tuhan Sang Nahuallu Raja Siantar, oleh Tengku Lukman Sinar S.H.
2. Sekolah Kartini suatu usaha untuk menyebarkan dan meningkatkan kecerdasan wanita pada permulaan abad ke XX, oleh Drs. Sukesi Soemoatmodjo.
3. Dua Radicale Concentratic; Sebuah perbandingan, oleh Wardiningsih Soerjohardjo, SS.
4. Pengaruh Pendidikan Barat terhadap kedudukan ekonomi Uleebalang di Aceh oleh Drs. Rusdi Sufi.
5. Beberapa pengalaman wawancara untuk menulis sejarah perintis kemerdekaan oleh Drs. Mardanan Safwan.
6. Pelaksanaan Sejarah Lisan dalam penelitian sejarah pemberontakan De Zeven Provincien, oleh Drs. Yusmar Basri.
7. Soewardi Soerjaningrat dalam pengasingan, oleh Dra. Irna Hanny Hadi Soewito.
8. Peranan Inlandsche Matine Bond (IMB) dalam pemberontakan di atas kapal De Zeven Provincien, oleh Rochmani Santosa.
9. Mangkunegaran dan Nata Surata, oleh Dra. Darsiti Suratman.
10. Suatu Pendekatan Sejarah Sosial Kota Yogyakarta akhir abad ke-19 awal abad ke-20.

VI. MAKALAH SEKSI SEJARAH MUTAKHIR

1. Kapan lahirnya Pancasila, oleh R.A.M. Effendy, SH
2. Pengaruh persetujuan Linggarjati terhadap perjuangan ABRI Divisi IV, Periode revolusi Fisik 1945 — 1949, oleh Drs. Gazali Usman.
3. Usaha Petani dalam mempertahankan hidup. Kisah pendudukan Jepang di Madiun, oleh Drs. I Gde Putu Gunawan.
4. Pemberontakan PKI Mr. Mohammad Joesoeph tahun 1946 di Cirebon, oleh Drs. Soeranto Soetanto.
5. Wajah dua muka sebuah kekuatan politik. Badan Pekerja KNIP periode Jakarta, oleh Drs. J.R. Chaniago.
6. Pengaruh Rasionalisme terhadap Badan-badan Perjuangan dan TNI (1947 — 1950), oleh Drs. Ariwiadi.
7. Cina Islam di Indonesia (Pengenalan awal terhadap PITI) oleh Tri Wahyuning Mahrus Irsyam, SS.
8. Minoritas Tionghoa dalam sastra Indonesia, oleh Husain Haikal
9. Pemerintahan Nasional kota Jakarta, oleh Drs. Soetopo Soetanto.
10. Kekuatan Gerilya di daerah Priangan pada waktu Divisi Siliwangi hijrah 1948, oleh Drs. Tanu Suherly.
11. Lahirnya Badan-badan Perjuangan dan BKR di kota Bandung sampai timbulnya MDPP/MPPP, oleh Drs. J. Jogaswara.
12. Qahhar Mudzakkar: Pergumulan dalam siri. Suatu Sisi situasi gerakan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Pada 1950 — 1965, oleh Drs. Anhar Gonggong.

13. Bogor Shu pada masa pendudukan Jepang (1942 — 1945) oleh Susanto Zuhdi
14. Markas Besar Komando Sumatera 1948 — 1949, oleh Drs. Amrin Imran.
15. Kekuatan-kekuatan revolusi di Surabaya (1945), oleh Saleh A. Djamhari.
16. Operasi lintas laut menembus blokade Belanda (1946 — 1949), oleh Drs. Masfar R. Hakim.
17. Sejarah pembentukan UUD '45 dan pengesahannya, oleh Drs. Moela Marboen.
18. Sumbangan Prof. Dr. Soepomo terhadap perumusan Dasar Negara dan UUD 1945, oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
19. Perkembangan Peranan Ulama Dalam Arena Politik di Aceh Utara, oleh Drs. P.J. Suwarno, SH.
20. Rakyat dan Tentara di Bibis 1949, oleh Drs. Adisusilo S.J.

Panitia Seminar Sejarah
Nasional III

